



**SEJARAH PENDIDIKAN DASAR PADA MASA KOLONIAL
BELANDA TAHUN 1900-1920**

SKRIPSI

Oleh
Cyntia Ayu Lestari
170210302042

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2023



**SEJARAH PENDIDIKAN DASAR PADA MASA KOLONIAL
BELANDA TAHUN 1900-1920**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh

Cyntia Ayu Lestari

170210302042

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2023

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, mama Luluk Khoirul Mila dan papa Feri Harianto yang dengan segenap jiwa membesarkan saya, meberikan kasih sayang, dan perhatian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Adik tercinta Sania Dwi Ayu dan bude Lutfiyah Ratnawati yang selalu memberikan dukungan semangat dan kasih sayang;
3. Semua guru TK, SD, SMP, SMA dan dosen FKIP Sejarah Universitas Jember yang telah mendidik, memberi ilmu dan membimbing dengan tulus, penuh kesabaran.
4. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.



MOTTO

“The beauty of hard work is the reward of labour”

(Anthony Baidoo)



Baidoo. 2015. 29. 313 Quotes. Ghana: Christian Authorhouse.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cyntia Ayu Lestari

NIM : 170210302042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Sejarah Pendidikan Dasar pada masa Kolonial Belanda tahun 1900-1920” merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Serta bersedia untuk mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Februari 2023

Yang menyatakan,

Cyntia Ayu Lestari

NIM 170210302042

SKRIPSI

**SEJARAH PENDIDIKAN DASAR PADA MASA KOLONIAL
BELANDA TAHUN 1900-1920**

Oleh

Cyntia Ayu Lestari

170210302042

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama

: Dr. Sumardi, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota

: Dr. Nurul Umamah, M.Pd

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sejarah Pendidikan Dasar pada masa Kolonial Belanda tahun 1900-1920” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada:

Hari, Tanggal : Jum’at, 17 Februari 2023

Tempat : Gedung 1 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sumardi, M.Hum.

NIP. 196005181989021001

Anggota I,

Drs. Marjono, M.Hum

NIP. 196004221988021001

Dr. Nurul Umamah, M.Pd

NIP. 196902041993032008

Anggota II,

Dr. Mohamad Na’im, M.Pd

NIP. 196603282000121001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.

NIP. 196006121987021001

RINGKASAN

Sejarah Pendidikan Dasar pada masa Kolonial Belanda tahun 1900-1920.

Cyntia Ayu Lestari, 170210302042; 2023; xv+108 halaman; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.

Pendidikan dasar anak-anak pribumi diawali dengan pengajaran sederhana mengenai kehidupan sehari-hari. Namun, semenjak bangsa Eropa datang ke Indonesia pada awal abad ke-16 dengan misi pelayarannya pendidikan dasar di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan pengaruhnya. Perubahan dan pengaruh menjadi hal yang baru dan berdampak besar dalam pendidikan di Indonesia. Perubahan dan pengaruh tersebut menjadi persoalan penting yang ingin di ungkapkan dalam penulisan ini sehingga ditemukan Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana pendirian pendidikan dasar oleh Pemerintahan Kolonial Belanda yang beragam tahun 1900-1920 dan bagaimana pelaksanaan pendidikan dasar yang beragam masa pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1900-1920. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan lebih dalam sejarah pendidikan dasar di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Manfaat penelitian ini dapat menjadi referensi, menambah pengetahuan, penelitian lanjutan untuk para pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang menggunakan 5 langkah yakni, pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, penulisan sejarah. Pendekatan yang digunakan politik pendidikan dengan teori kebijakan public oleh William Dun.

Hasil penelitian ini yaitu pendidikan dasar yang beragam masa kolonial Belanda, dilatar belakangi oleh kekhawatiran pemerintahan kolonial Belanda akan kedudukannya di Indonesia. Awal mulanya pendidikan hanya dikhususkan untuk anak-anak pegawai dari negeri Belanda yang pindah di Indonesia. Industry yang besar milik Belanda di Indonesia membutuhkan pegawai karena mereka tidak dapat menerus mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia. Maka pendidikan dibuka untuk

masyarakat pribumi untuk mencetak pegawai rendahan. Pendidikan yang dijalani hanya pendidikan yang sederhana hingga terjadi krisis akibat merosotnya tanah Jawa karena kerja paksa. Hal tersebut menarik tokoh-tokoh sosialis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pulau Jawa. Periode tersebut disebut dengan Politik Etis. Pendidikan menjadi salah satu tujuan politik etis mulai dikerjakan dengan pembangunan sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi. Meski politik etis berjalan rupanya hal tersebut tidak murni sepenuhnya. Kekhawatiran pemerintahan kolonial dalam kedudukannya melahirkan kebijakan politik pendidikan yakni: gradualisme, dualisme, kontrol sentral, keterbatasan tujuan, prinsip konkordansi, tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Kemudian pemerintahan Belanda membagi sekolah menjadi dua berdasarkan bahasa pengantar pendidikannya, yakni sekolah pribumi dan sekolah non-pribumi (barat). Sekolah pribumi adalah sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pendidikannya. Sementara, untuk sekolah non pribumi (barat) merupakan sekolah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sekolah pribumi terdiri dari beberapa sekolah, sekolah dasar kelas satu, sekolah dasar kelas dua, sekolah desa atau sekolah rakyat, sekolah lanjutan, sekolah peralihan. Kemudian untuk sekolah non-pribumi (barat) sekolah terdiri dari ELS, HCS, HIS pada kurun waktu 1900-1920.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah kolonial Belanda yang memiliki tujuan awal mencerdaskan anak-anak turunan Belanda tanpa disengaja telah memberikan pengaruh dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan mulai dipandang penting untuk didapatkan selain sebagai jaminan pekerjaan di masa depan. Untuk mengurangi anak-anak cerdas yang dapat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia, pemerintahan Belanda menciptakan pendidikan anak-anak pribumi yang sulit dan tidak memiliki kejelasan masadepan. Pemerintahan kolonial Belanda melakukannya dengan membagi sekolah-sekolah anak pribumi, dan menerapkan tahapan pendidikan yang panjang. Hal tersebut dimaksudkan agar anak pribumi selalu berada di tingkat lebih rendah dibandingkan anak Belanda.

PRAKATA

Puji syukur atas segala karunia dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Sejarah Pendidikan Dasar pada masa Kolonial Belanda tahun 1900-1920”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Drs. Marjono, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus dosen pembimbing akademik;
5. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu, pikiran dan perhatian terhadap penulisan skripsi ini;
6. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku pembimbing anggota yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Marjono, M.Hum., selaku penguji I yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Dr. Mohamad Na'im M.Pd., selaku penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, atas semua ilmu, motivasi dan pengalaman yang diberikan dengan penuh cinta selama menjadi mahasiswa Pendidikan Sejarah;

10. Kedua orangtuaku papa Feri Harianto dan mama Luluk Khoirul Mila yang selalu mendukung dengan cinta kasihnya tiada henti-hentinya dan selalu mendoakan;
11. Adik tercinta Sania Dwi Ayu dan budhe Lutfiyah Ratnawati yang selalu mendoakan dan menyemangati dengan tulus dalam penyelesaian penelitian ini;
12. Sahabatku Anita Verawati yang setia menemani disaat sulit, senang dan selalu memberikan semangat;
13. Teman Seperjuangan skripsian, Dini Eka Ayu Rumani , Siti Nur Jannah, Laily Setyawati, dan Bella Larasati yang sama-sama menguatkan selama pengerjaan skripsi hingga selesai;
14. Semua pihak yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 17 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
BAB 3. METODE PENELITIAN	25
3.1 Pemilihan Topik	25
3.2 Pengumpulan Sumber (Heuristik)	26
3.3 Verifikasi (Kritik Sejarah, Keabsahan Sumber)	27
3.4 Interpretasi: Analisis dan Sintesis	30
3.5 Penulisan Sejarah (Historiografi)	30

BAB 4. PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR YANG BERAGAM OLEH PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA TAHUN 1900-1920.....	32
4.1 Politik Etis Sebagai Penggerak Pendidikan	34
4.2 Kebijakan Politik Pendidikan Kolonial Belanda	38
4.3 Pendidikan Dasar yang Beragam masa Pemerintahan Kolonial Belanda	47
4.3.1 Pendidikan Dasar Pribumi masa Pemerintahan Kolonial Belanda.....	47
4.3.2 Pendidikan Dasar Non-Pribumi (Barat) masa Pemerintahan Kolonial Belanda.....	50
BAB 5. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DASAR YANG BERAGAM MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA TAHUN 1900-1920.....	56
5.1 Pelaksanaan Pendidikan Dasar Pribumi masa Pemerintahan Kolonial Belanda.....	57
5.1.1 Sekolah Dasar Kelas Satu (De School der Eerste klasse)	57
5.1.2 Sekolah Dasar Kelas Dua (De School der Tweede klasse)	60
5.1.3 Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (Volksschool).....	68
5.1.4 Sekolah Lanjutan (Vervolgschool).....	73
5.1.5 Sekolah Peralihan (Schakelschool)	73
5.2 Pelaksanaan Pendidikan Dasar Non-Pribumi (Barat) masa Pemerintahan Kolonial Belanda.....	74
5.2.1 ELS (Europese Lagere School)	74
5.2.2 HCS (Hollands Chineesche School).....	87
5.2.3 HIS (Hollands Inlandsche School)	90
BAB 6. PENUTUP.....	98
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN..... 105



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Jumlah Sekolah Kelas Satu	59
Tabel 5.2 Jumlah Sekolah Kelas Dua	63
Tabel 5.3 Jumlah Murid Menurut Usia Tahun 1909.....	65
Tabel 5.4 Jumlah Murid Sekolah Kelas Dua di Tahun 1915, 1917, 1919.....	66
Tabel 5.5 Jumlah Murid Sekolah Kelas Dua yang Berasal dari Sekolah Desa.....	66
Tabel 5.6 Uang Sekolah di Sekolah Kelas Dua	67
Tabel 5.7 Jumlah Murid di Sekolah Desa	72
Tabel 5.8 Jumlah Murid ELS Berdasarkan Kebangsaannya.....	84
Tabel 5.9 Jumlah Perpustakaan dan Buku di ELS	85
Tabel 5.10 Populasi Penduduk Eropa dan Belanda Menurut Usia tahun 1930	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Volksschool Jambi, Zuid-Sumatra tahun 1915 68
Gambar 5.2 Europese Lagere School 1885-1910 76
Gambar 5.3 Europese Lagere School Danau Sentani, Jayapura, Papua tahun 1935 . 81
Gambar 5.4 Hollandsch Chinesche School Makassar tahun 1910..... 87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Koran Jawa Pos tahun 1914	105
Lampiran 2 Koran De Telegraaf tahun 1913	106
Lampiran 3 Buku Pendidikan Hindia Belanda tahun 1838.....	107
Lampiran 4 Sistem Persekolahan Zaman Kolonial Belanda abad ke-20	108



BAB 1. PENDAHULUAN

Bab 1 pendahuluan, penulis memaparkan beberapa hal sebagai berikut : (1) Latar Belakang; (2) Penegasan Judul; (3) Ruang Lingkup Penelitian; (4) Rumusan Masalah; (5) Tujuan Penelitian; (6) Manfaat Penelitian.

1.1 Latar Belakang

Sejarah pendidikan dasar era kolonial di Indonesia memiliki pola yang unik dan rumit. Awalnya pendidikan dasar yang didapatkan masyarakat Indonesia hanya mencakup pembelajaran sederhana. Pendidikan dasar yang didapatkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Alpian dkk, 1019:67-69). Pendidikan yang diajarkan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian di awal abad ke-16, bangsa Eropa melakukan pelayaran untuk menjelajah samudra dan mencari rempah-rempah di wilayah Indonesia. Keputusan untuk menetap dan berdagang, rupanya memberikan perubahan yang sangat besar di sektor perekonomian, budaya, hingga pendidikan.

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang mengalami perubahan mulai mendapatkan pengaruh. Mulanya bangsa Portugis mengatur dan menfokuskan pendidikan dengan tujuan menyebarkan agama Katolik. Penyebaran dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah sekolah misionaris, dengan harapan terlahir kaum agamis baru dan memenuhi misi gereja (Syaharuddin & Susanto, 2019:34). Kemudian tiba orang-orang Belanda dan menggantikan kekuasaan Portugis dengan kepentingan berdagangnya. Perubahan pemegang kekuasaan mendorong masyarakat Indonesia menuntut agar orang-orang Belanda melanjutkan pendidikan yang telah didirikan Portugis. Namun, Pemerintahan Kolonial Belanda menerapkan kebijakan pendidikan diskriminatif dan membatasi perkembangan pendidikan lokal (Rifa'i, 2017:56).

Keadaan pendidikan tersebut sengaja diciptakan Pemerintahan Kolonial Belanda dengan tujuan mencetak warga Bumiputra yang patuh pada urusan

penjajahan. Pemerintahan Kolonial Belanda beranggapan melalui pendidikan, tenaga kerja dapat diciptakan untuk membantu kedudukan penjajah dan mematuhi kepentingannya. Akibatnya pendidikan yang berjalan hanya sebatas pengetahuan dan kecakapan karena minimnya tujuan. Sifat pendidikan tersebut berangsur-angsur berubah di awal abad ke-20. Perubahan tersebut dilatar belakangi lahirnya Politik Etis (*Etische Politiek*) oleh Van Deventer pendukung golongan sosialis yang mengkritik tegas keadaan Tanah Jawa yang serba merosot. Van Deventer menerbitkan sebuah artikel di tahun 1899 berjudul "*Hutang Kehormatan*" yang dimuat majalah *De Gids*. Isi artikelnya mengatakan pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil panen Tanam Paksa. Keuntungan tersebut merupakan hutang Belanda kepada rakyat Indonesia yang harus dikembalikan dengan cara apapun, meski dalam bentuk yang lain. Pendapat tersebut dikenal dengan nama "Trilogi Van Deventer" yang memuat pendidikan, irigasi, emigrasi.

Lahirnya Politik Etis ini lambat laun mengubah pandangan politik Kolonial terhadap tanah air. Bukan sebagai daerah menguntungkan, melainkan menjadi daerah yang perlu dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan juga peningkatan budaya. Pendidikan dasar masa kolonial Belanda dimulai di tahun 1900 sebagai bentuk upaya kebijakan Politik Etis yang telah ditetapkan dan pendidikan modern dilahirkan. Pendidikan modern dicetuskan oleh Snouck Hurgronje, yang merupakan ahli agama Islam dan penasihat bumiputra dikalangan anak-anak lapisan atas. Terjalinlah hubungan akrab antara pemerintahan jajahan dengan golongan atas masyarakat Bumiputra. Agar pemerintah Belanda dapat tetap mempertahankan kolonialisnya di Indonesia.

Rupanya hubungan akrab tersebut menciptakan kecemburuan. Orang-orang Eropa yang kontra dengan lahirnya politik etis berpendapat bahwa Pemerintah Kolonial tidak perlu serius memajukan pendidikan Bumiputra. Hanya perlu menyediakan pendidikan yang betul-betul diperlukan oleh anak Bumiputra. Hal tersebut kemudian menciptakan pendidikan sederhana untuk anak Bumiputra (Makmur dkk, 1993:73-74). Kelahiran Politik Etis memang mengalami beberapa

perubahan sesuai kebutuhan pendidikan pribumi. Namun, dalam pelaksanaannya hanya dijalankan oleh segelintir orang saja dan masih terdapat adanya kesenjangan.

Kesenjangan tersebut tersebut dapat dilihat dari cara pemerintahan kolonial Belanda mendirikan pendidikan dasar di Indonesia. Sekolah dasar di Indonesia dibedakan menjadi 2 yakni pendidikan dasar pribumi dan pendidikan dasar non-pribumi (barat). Pendidikan dasar khusus pribumi merupakan sekolah yang menggunakan bahasa melayu atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pendidikannya, sementara untuk pendidikan dasar non-pribumi (barat) adalah sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pendidikan. Sekolah pribumi, merupakan sekolah yang khusus didirikan untuk anak-anak bumiputra. Kurikulum, fasilitas, dan pengelolaannya sangat sederhana karena dikelola masyarakat bumiputera sendiri. Pendidikan dasar pribumi terbagi menjadi: sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, sekolah desa/sekolah rakyat, sekolah lanjutan, sekolah peralihan.

Pendidikan dasar pribumi dapat dikatakan pendidikan yang tidak memiliki masadepan. Karena tidak dapat melanjutkan kependidikan menengah hingga tingkat universitas. Sekolah-sekolah tersebut didirikan hanya semata-mata mengurangi tingkat buta huruf masyarakat Indonesia. Karenanya kegiatan belajar dan mengajarnya bersifat sederhana. Bahkan tingkat tamat sekolahnya rendah karena berbagai alasan internal dan eksternal. Selain hal tersebut sekolah pribumi tidak populer dikalangan masyarakat karena tidak menjamin mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dan perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda.

Pendidikan dasar non-pribumi (barat) merupakan sekolah-sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda, Indo-Belanda, non-pribumi (cina), dan anak-anak golongan priayi. Sekolah non-pribumi (barat) terbagi menjadi 3 yakni ELS, HCS, HIS. Kurikulum, fasilitas dan pengelolaannya disamakan dengan sekolah dasar di negeri Belanda. Awalnya sekolah yang berdiri adalah ELS (Europese Lagere School) karena, memang fokus pendidikan didirikan hanya untuk anak-anak Belanda dalam upayah meningkatkan nasionalisme Belanda. Kegiatan pembelajaran sengaja

menggunakan bahasa Belanda dan kurikulum Belanda. Keberadaan siswa-siswa pribumi kalangan atas, dan anak-anak timur asing. Ditemukan kesulitan beradaptasi untuk anak-anak non-Belanda.

Kesulitan pemahaman dalam pembelajaranpun terjadi pada anak pribumi dan timur asing. Anak-anak priayi pribumi dan timur asing tidak dapat mengimbangi sistem pendidikan yang digunakan ELS (Europese Lagere School). Karena ELS tidak memiliki fleksibilitas tersebut, pemerintah kolonial Belanda mendirikan HCS (Hollands Chinese School) dan HIS (Hollands Inlandse School). Meski telah dibedakan berdasarkan jenisnya sekolah-sekolah tersebut nyatanya masih menggunakan pengaruh Belanda dalam kegiatan pembelajarannya (Nasution, 1994:20-33).

Umumnya anak-anak golongan priayi menyukai kehidupan serba kebarat-baratan, akibat pengaruh Belanda yang diterapkan dalam pendidikan. Pengaruh belanda (westernisasi/gaya barat) lambat laun berkembang di Hindia Belanda (Indonesia). Tujuan awal untuk memupuk kesadaran nasional untuk anak-anak Indo-Belanda. Mulai merambat dalam jiwa masyarakat Indonesia dan tunduk kepada pemerintahan kolonial (Sumarno dkk. 2019:372). Pendidikan gaya barat (Westernisasi) ini memiliki dampak yang buruk bagi masa depan Indonesia. Selain kurang memajukan pendidikan untuk masyarakat bumiputera hal ini juga dapat mengakibatkan krisis perkembangan budaya lokal.

Kesadaran akan budaya lokal sangat dibutuhkan untuk masa depan bangsa. Budaya lokal berfungsi sebagai perekat hubungan masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya dalam menyatukan tujuan. Keberadaan budaya lokal dapat menumbuhkan kesadaran bersejarah, bernegara, dan bertanah air (Syahputra dkk, 2020:85). Sebagai manusia modern era ini, melestarikan dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme berbangsa dan bernegara merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Contohnya dengan mengetahui dan memaknai alur sejarah pendidikan dasar era kolonial. Uraian diatas telah menunjukkan perjalanan yang rumit yang dialami pendidikan dasar di Indonesia.

Pemahaman sejarah pendidikan dasar di Indonesia akan memberikan pemahaman nilai dari perjuangan, perjalanan, dan peristiwa penting bangsa yang telah dilalui sebelum kita lahir. Kesadaran tersebut akan memupuk perasaan bangga dan menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Karena pendidikan merupakan usaha sadar dan direncanakan dalam pengembangan diri setiap individu (Makkwaru, 2019:116-117). Sayangnya masyarakat yang memiliki kesadaran sejarah dan nasionalisme hanya kalangan tetua yang menjadi saksi perjalanan sejarah. Padahal bangsa dan Negara membutuhkan generasi muda yang dapat melanjutkan misi mengembangkan kesadaran lokal bangsa untuk kemajuan suatu bangsa.

Tidak banyak masyarakat Indonesia yang ingin tahu/mempelajari bagaimana sejarah pendidikan dasar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya kesadaran sejarah di kalangan generasi muda yang banyak dikeluhkan guru-guru di internet hingga banyak terbitan artikel berjudul “kurangnya kesadaran sejarah di kalangan remaja masa kini”. Salah satunya adalah artikel milik Sulhan yang berusaha meningkatkan kesadaran sejarah siswa SMP dengan memanfaatkan sumber isu kontroversial. Beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran siswa menurut artikelnya yakni: (1) kecenderungan kehidupan serba modern, sehingga mengabaikan nilai-nilai, (2) materi yang kurang cocok dengan misi pengembangan kesadaran sejarah siswa, (3) pelajaran IPS diabaikan karena tidak menjadi mata pelajaran Ujian Nasional, (4) motivasi siswa yang kurang, (5) guru yang kurang kompeten (Sulhan, 2016:157). Meski pembelajaran sejarah dihadirkan di mata pelajaran sekolah-sekolah nyatanya tidak cukup untuk membangun kesadaran sejarah. Padahal jika kita dapat memahami betul tujuan bangsa dalam melestarikan sejarah bangsa kita dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Mata pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah juga terbatas pada materi dan peristiwa umum dalam pembabakan yang telah disepakati sejarawan Indonesia. Karena hanya terdapat 2 jam pelajaran tiap minggunya, sehingga materi yang diajarkan juga terbatas. Salah satu materi yang tidak dibahas adalah sejarah

pendidikan Indonesia. Sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran sejarah dan nasionalisme penulis memilih topik sejarah pendidikan dasar pada era kolonialisme belanda. Menulis dan membaca kajian sejarah bangsa kita akan membantu membentuk jiwa nasionalisme. Karenanya tujuan penulisan ini adalah mengkaji secara mendalam mengenai Sejarah pendidikan dasar masa Kolonial Belanda, memahami latar belakang pemerintahan kolonial mendirikan pendidikan dasar, dan bagaimana keadaan pendidikan dasar di Indonesia masa itu. Penulisan ini berbeda dengan penulisan sebelumnya mengenai pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Yang menjadikannya lebih menarik adalah kefokusannya dalam menjelaskan tiap aspek dalam pendidikan seperti kurikulum, keadaan sekolah, kualitas guru, hingga fasilitas yang didapatkan di sekolah dasar. Penjelasan sekolah dasar pribumi hingga non-pribumi (barat). Harapannya dengan adanya kajian ini, pembaca akan memahami bagaimana perjalanan pendidikan dasar di Indonesia yang melalui perjalanan panjang dan berat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik pendidikan, hal ini didasari untuk menggambarkan kegiatan politik pendidikan masa kolonial Belanda yang dapat diungkap. Kemudian peneliti menggunakan Teori kebijakan publik, yang menjelaskan mengenai tindakan pemerintahan kolonial dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat Hindia-Belanda. Kemudian menjawab pertanyaan mengenai apa yang melatar belakangi Pemerintahan Kolonial Belanda mendirikan pendidikan dasar yang beragam (seperti mengelompokkan golongan sosial)? Bagaimana pelaksanaan pendidikan dasar yang beragam di masa Pemerintahan Kolonial Belanda pada kurun waktu 1900-1920?. Terkait hal diatas harapan penulisan ini dapat memajukan pendidikan di masa depan dan para pembaca memiliki jiwa kesadaran akan sejarah bangsa (jiwa nasionalis). Penelitian ini dikemas dalam judul **“Sejarah Pendidikan pada Masa Kolonial Belanda tahun 1900-1920”**.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan Judul dibutuhkan untuk menghindari adanya salah interpretasi dalam pemahaman judul penelitian ini, penulis menjabarkan kata per-kata dalam judul penelitian untuk mempertegas pengertian. Penjabaran ini bertujuan sebagai penjelas tulisan agar mudah dipahami. Adapun pembagian pengertian dalam judul sebagai berikut:

Sejarah, merupakan sebuah rekonstruksi peristiwa di masa lalu. Perekonstruksian yang dilakukan bertujuan untuk membangun kembali suasana kejadian di masa lalu/lampau (peradaban manusia yang telah terjadi) dan berguna secara intrinsik dan ekstrinsik. Guna sejarah sebagai intrinsik ialah, sejarah sebagai ilmu, sejarah menjadi jalan untuk mengetahui masa lalu/lampau, sejarah menjadi pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Kemudian, guna sejarah sebagai ekstrinsik yakni sejarah dapat digunakan pendidikan liberal untuk mencerdaskan bangsa. Sejarah telah berkembang menjadi mata pelajaran yang didapatkan disekolah. Penerapan tersebut dimaksudkan agar sejarah dapat membantu mengembangkan pendidikan moral, nalar, keindahan, ilmu bantu, latar belakang, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, rujukan dan bukti (Kuntowijoyo, 2018:14-20). Gambaran mengenai keadaan pendidikan dasar di masa lalu direkonstruksi dalam bentuk tulisan penelitian ini. Proses penulisannya dibantu dengan sumber-sumber yang relevan dan memiliki tujuan untuk menyebarkan pemahaman sejarah pendidikan dasar masa kolonial belanda.

Pendidikan dasar, dilangsungkan guna mengembangkan kemampuan, sikap, keluasan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang berguna dalam hidup bermasyarakat. Pendidikan dasar sebagaimana dapat didapatkan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, juga sama halnya pada pendidikan dasar masa kolonial Belanda. Kejadian yang dialami masa itu berjalan dengan budaya yang berkembang masa itu pula. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh tiap manusia dalam mengembangkan potensi diri hingga memiliki kesadaran akan kekuatan spiritual, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia dan

keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut UU RI No 2 Tahun 1989 Pendidikan dasar diwajibkan didapatkan oleh seluruh masyarakat untuk memenuhi persyaratan dalam melanjutkan pendidikan menengah (Makkwaru, 2019:116).

Masa kolonial Belanda, dimulai semenjak pembubaran kongsi dagang VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) di Hindia Timur pada 31 Desember 1799. Pembubaran VOC meresmikan bahwa Indonesia menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan kerajaan Belanda dengan nama Hindia-Belanda (Nederlands-Indie). Politik kolonial merambat pada sistem pajak dan sewa tanah. Penguasa seperti Daendels dan Raffles yang memiliki sifat idealisme mendukung liberalisme dalam sistem pajak dan sewa tanah. Sifat idealisme rupanya tidak dapat bertahan lama kemudian kembali pada sistem konservatif dan feodalistis akibat desakan negeri induk. Eksploitasi melalui sistem pajak dan sewa tanah ini akhirnya berakhir dan digantikan oleh sistem tanam paksa (1830-1870) (Makmur dkk, 1993:10).

Tanam paksa dicetuskan oleh Van den Bosch hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengembalikan modal yang terkuras akibat perang Jawa dan perang Belgia. Tanam paksa memaksa masyarakat Pulau Jawa membayar pajak dengan bentuk hasil-hasil pertanian. Pengumpulan hasil pertanian dinilai dapat menguntungkan karena diekspor dalam jumlah besar kemudian dikirim ke Eropa dan Amerika dengan keuntungan yang tinggi. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari perjanjian dan merugikan masyarakat Jawa. Kemudian, politik kolonial lainnya seperti sistem kolonial liberal (1870-1900), sistem politik kolonial etis (1900-1920) kemudian *Devide et Impera* (Absiroh dkk, 2017:5-7).

Pendidikan Dasar pada masa Kolonial Belanda, mulai berkembang di masa politik etis. politik etis dengan tujuan mulia yang bertujuan menyejahterakan keadaan tanah Jawa yang mengalami keadaan yang sangat merosot. Memiliki 3 misi pembangunan yakni, irigasi, emigrasi, edukasi. Edukasi merupakan salah satu aspek yang dikembangkan, menjadi aspek penting untuk menyejahterakan tanah Jawa. Kemudian upayah-upayah dilakukan, akhirnya pendidikan mengalami perubahan

kemajuan meski dalam penerapannya terdapat kesenjangan ras antara masyarakat bumiputera dan orang-orang barat. Pendidikan dasar yang awalnya hanya dikhususkan untuk anak-anak belanda mulai dibuka untuk anak-anak pribumi. Sayangnya dalam penerapannya banyak sekali perbedaan fasilitas yang diberikan. Hingga terdapat 2 jenis sekolah berdasarkan bahasa pengantarnya yakni sekolah dasar pribumi dan sekolah dasar non-pribumi (barat). Pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda didasari pada kepentingan politik dan ekonomi yang dibutuhkan. Karenanya beberapa kebijakan politik yang diskriminatif dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan yayasan pendidikan.

Peneliti memilih topik ini karena dirasa topik ini memiliki keunikan dalam peristiwanya. Dari berbagai penelitian terdahulu yang peneliti temukan, semuanya hanya terfokus kepada pendidikan dengan bahasa pengantar Belanda yang dikelola oleh pemerintahan kolonial Belanda yakni ELS, HCS, dan HIS. Kelebihan penulisan ini terletak pada pembahasan pendidikan dasar pribumi yang berbahasa pengantar bahasa daerah/lokal dan dikelola oleh masyarakat pribumi sendiri. Sebagai semestinya orang umum di era ini hanya memahami pendidikan dasar hanya didapatkan di sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama saja. Padahal pendidikan dasar dimasa pemerintahan kolonial Belanda harus dijalani dengan rumit sesuai dengan status sosial yang dimiliki. Belum lagi jika hanya anak petani dari kelas rendah harus menempuh berbagai pendidikan dasar jika ingin melanjutkan pendidikannya. Keunikan lainnya terletak pada tiap aspek yang dimiliki tiap sekolah dasar seperti kurikulum, guru, inspeksi, fasilitas sekolah dll. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam penulisan penelitian ini.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dimaksudkan untuk menghindari adanya penyimpangan fokus permasalahan kajian penulisan. Karenanya penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi lingkup temporal, spasial, dan materi.

Ruang lingkup temporal penelitian ini adalah rentang waktu 1900-1920. Alasan peneliti memilih rentang waktu 1900 hingga 1920 karena pada kurun waktu tersebut pendidikan dasar mengalami perkembangan terfokus yang dikelola oleh pemerintahan kolonial Belanda. Perkembangan diawali di tahun 1900 ketika politik etis mulai disuarakan dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Politik etis dilatarbelakangi oleh kaum sosialis yang peduli dengan kondisi tanah Jawa yang serba merosot akibat eksploitasi yang berat dari tanam paksa. Politik etis terkenal dengan program *Trias Van Deventer* yang meliputi irigasi, Emigrasi, dan Edukasi.

Edukasi sebagai aspek yang dikaji peneliti menjadi sangat penting di bahas. Edukasi ini diperlukan dalam penerapan program irigasi dan emigrasi. Sehingga terjadi evolusi pada pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda saat itu. Perubahan kearah lebih maju tersebut ingin peneliti kaji namun terkhusus untuk perkembangan pendidikan dasarnya. Latar belakang politik ekonomi yang dijalankan pemerintah Kolonial memberikan kebijakan dan sistem yang berbeda untuk pendidikan anak bumiputera dan anak Belanda. Kemudian batas akhir penelitian dipilih hingga tahun 1920. Tahun 1920 dipilih karena pendidikan dasar pada masa itu dirasa sudah cukup memadai (tidak ada perkembangan kebijakan pendidikan dasar lagi di tahun selanjutnya, hanya penambahan jumlah sekolah). Kemudian, fokus pemerintahan kolonial Belanda dalam pengembangan pendidikan setelah tahun 1920 adalah melanjutkan pengembangan sistem pendidikan menengah, ujian kepegawaian, hingga universitas.

Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah Negara Indonesia yang dulunya disebut Hindia-Belanda. Fokusnya dikhususkan pada pulau Jawa karena pulau Jawa merupakan pulau yang mengalami dampak langsung dari kemerosotan akibat tanam paksa dan kegiatan kolonial yang merugikan lainnya. Karena memang asal mula kelahiran politik etis disebabkan kerugian yang dialami Indonesia yang terfokus di Jawa. Peneliti membatasi lingkup bahasan di pulau Jawa dan pulau sekitar yang mendapatkan pengaruh dari perkembangan pendidikan yang dijalankan dari misi politik etis pada kurun waktu 1900-1920.

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah apa yang melatar belakangi pemerintahan kolonial Belanda mendirikan pendidikan dasar yang beragam. Kebijakan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda dalam mengelola pendidikan dasar di Indonesia. Kemudian penjelasan tiap-tiap sekolahnya yang dibagi menjadi 2 yakni pendidikan khusus pribumi (sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, sekolah desa, sekolah lanjutan, sekolah peralihan) dan pendidikan non-pribumi (barat) yang dibagi menjadi (ELS, HCS, HIS) dan memuat bagaimana kurikulum, inspeksi, keadaan murid, guru, dan fasilitas yang didapatkan disekolah dasar tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Ruang Lingkup diatas peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendirian pendidikan dasar oleh Pemerintahan Kolonial Belanda yang beragam tahun 1900-1920?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan dasar yang beragam masa Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1900-1920?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

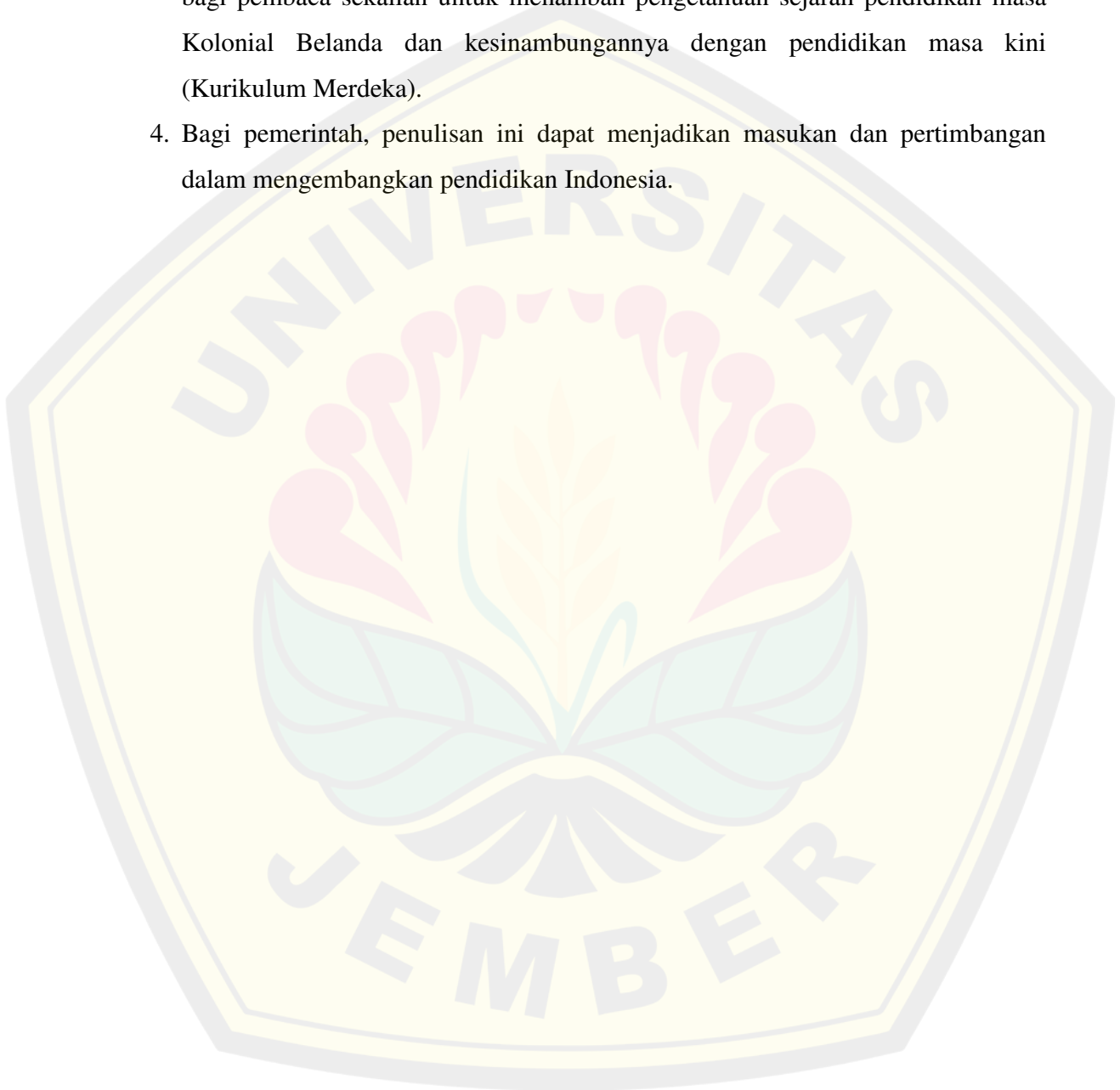
1. Menganalisis Pendirian pendidikan dasar oleh Pemerintahan Kolonial Belanda yang beragam tahun 1900-1920.
2. Menganalisis pelaksanaan pendidikan dasar yang beragam masa Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1900-1920.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi dosen atau tenaga pengajar, hasil dari penulisan ini dapat dipergunakan sebagai referensi yang berguna dalam pengajaran peserta didik.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penulisan ini dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan, bahan pertimbangan, dan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan sejarah pendidikan masa Kolonial Belanda dan kesinambungannya dengan pendidikan masa kini (Kurikulum Merdeka).
3. Bagi para pembaca tulisan ini, diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian untuk menambah pengetahuan sejarah pendidikan masa Kolonial Belanda dan kesinambungannya dengan pendidikan masa kini (Kurikulum Merdeka).
4. Bagi pemerintah, penulisan ini dapat menjadikan masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan pendidikan Indonesia.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah uraian teratur dan logis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. Literatur penelitian terdahulu sangat diperlukan dan dapat membantu peneliti mendapatkan gambaran mengenai rencana penulisan, temuan ide baru, dan dapat menulis lebih baik. Setelah pengumpulan literatur penelitian terdahulu, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah *Riview*. *Riview* yang dilakukan memuat kekurangan dalam penulisan penelitian dan apa lagi yang harus ditulis dan diteliti. Jika penulis memilih topik persoalan sejarah belum terdapat historiografinya, maka literatur yang sekiranya memiliki keterkaitan dapat digunakan (Abdurahman, Dudung. 2011: 125). “Sejarah Pendidikan Dasar pada masa Kolonial Belanda” merupakan topik penelitian yang sebelumnya banyak dilakukan oleh peneliti lain. Namun, setiap peneliti memiliki sudut pandang yang berbeda dan memiliki keterbatasan pendapat. Berikut merupakan literatur yang di *riview*.

Buku berjudul “Sejarah Pendidikan Indonesia” karya Nasution, S. Tahun 1994 bertujuan menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia mulai dari zaman VOC hingga pendidikan tinggi di Indonesia. buku ini menjelaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia dijalankan secara lambat namun pasti. Pemerintah Belanda membagi sekolah-sekolah di Indonesia dengan latar belakang kebutuhan lapisan masyarakat. Hal itulah yang mengharuskan pendidikan berjalan vertikal dan terus adanya pengembangan.

Kelebihan buku ini terfokus dalam menjelaskan keadaan pendidikan (sekolah-sekolah) yang berdiri dan berkembang di masa itu secara berurutan, penjelasan tiap sekolahnya jelas terdiri dari point-point penting seperti kurikulum, guru, buku pelajaran cukup menjadi gambaran keadaan pendidikan masa itu. Kekurangannya pembahasan tiap subbabnya kurang meluas, penjelasan hanya gambaran secara umum. Karena, dalam penelitian ini peneliti menonjolkan bagaimana keadaan pendidikan dasar masa Kolonial Belanda, sedangkan buku ini menjelaskan

keseluruhan pendidikan masa itu (mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi). Sehingga fokus dalam pendidikan dasar kurang dan belum ada pembahasan mengenai sekolah lanjutan dan sekolah terusan (Nasution, 1995:1-2).

Buku yang berjudul “Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan” karya Makmur dkk yang diterbitkan tahun 1993. Tujuan dibuatnya buku ini untuk melengkapi seri terbitan Sejarah Pendidikan di Indonesia oleh proyek IDSN. Buku ini memuat uraian perkembangan pendidikan di Indonesia sejak bangsa barat tiba hingga menjelang kemerdekaan (1600-1945). Yang dimuat didalamnya adalah bagaimana pengaruh Portugis, kemudian pengaruh Belanda mengenai penjabaran lembaga, tujuan, isi proses pendidikan pada masa itu. Pembagian bab berdasarkan runtutan waktu otomatis bahasan meluas dan menjelaskan semua jenjang pendidikan. Hal ini menjadikan perbedaan materi yang dibahas oleh peneliti dalam penulisan ini. Karena peneliti akan menfokuskan pada hal-hal yang terkait dengan pendidikan dasar masa Kolonial Belanda. Buku ini memiliki kelebihan yakni pembahasan yang lebih banyak tentang pendidikan masa Kolonial Belanda dari pada buku milik Nasution. Sudut pandang baru cukup membantu peneliti mendapatkan gambaran baru dari segi penjelasan menurut pembabakan waktu yang lebih jelas (Makmur dkk, 1993:1-2).

Artikel berjudul “Pendidikan pada masa Pemerintahan Kolonial di Hindia Belanda tahun 1900-1930”. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang diberikan pemerintahan Kolonial Belanda pada masa 1900-1930. Isi artikel memuat (1) Latar belakang pelaksanaan pendidikan Pemerintahan Kolonial tahun 1900-1930. Dimulai dari system tanam paksa yang diadakan mengakibatkan adanya kritik dan penolakan dari berbagai pihak, kemudian politik liberal yang menyebabkan Belanda dilanda kemiskinan dan hal-hal lainnya, (2) Awal pelaksanaan pendidikan untuk bumiputera masa pemerintahan kolonial tahun 1900-1930. Para penganut politik etis menganggap pendidikan memiliki peran utama dalam kemajuan bangsa, (3) Pendidikan dibawah Van Heutsz dan resensi ekonomi, 1904 Van Heutsz seorang pahlawan Belanda dalam perang Aceh yang ingin merubah pendidikan selama 4 tahun agar lebih praktis untuk anak-anak bumiputera,

(4) Tingkatan pendidikan pada masa kolonialisme tahun 1900-1930, terdapat sekolah dasar berbahasa belanda untuk anak bumiputera, sekolah lanjutan, sekolah tinggi (Afandi dkk, 2020:21-27).

Artikel ini memiliki tujuan yang sama dengan penelitian ini, ingin mengetahui bagaimana latar belakang Pemerintahan Kolonial Belanda mendirikan pendidikan dan bagaimana berjalannya pendidikan pada masa itu. Namun yang menjadi perbedaan artikel milik Afandi ini dan penelitian yang ditulis adalah penelitian ini terfokus kepada pendidikan dasar bagaimana keadaan pendidikan dasar masa Kolonial Belanda. Kemudian artikel Afandi hanya terbatas pada politik etis saja, jika penelitian ini terbatas mulai kelahiran politik etis hingga berakhirnya masa Kolonial Belanda.

Jurnal berjudul “Educational Policy in the Colonial Era” karya Lilie Suratminto yang ditulis pada tahun 2013 bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan Hindia Belanda pada awal abad ke-19 bersamaan dengan perkembangan semangat nasionalisme Indonesia. Pokok pembahasan dalam artikel mencakup (a) Pendirian sekolah di Hindia Belanda. Sekolah umum yang didirikan di Batavia tahun 1817 untuk anak-anak eropa yang disebut Europeesche Lagere School. Kemudian rencana pembangunan sekolah untuk anak adat pribumi yang menunggu pengesahan raja belanda, sekolah anak adat diharapkan dapat mempercepat implementasi *Cultuur Stelsel*. Kemudian didirikan sekolah lainnya, (b) Pendidikan selama etika periode polis, tekanan partai parlemen mengakibatkan Belanda mengubah beberapa kebijakan di Hindia Belanda, (c) Macam-macam sekolah pada masa kolonial (Suratminto, 2013:78-81).

Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda sangat ditonjolkan sesuai dengan judul penelitian terhadulu ini. Bagaimana Belanda mendirikan sekolah untuk kepentingan pribadinya dan bagaimana menjalankan kepentingannya. Masa-masa sulit yang harus dilalui anak-anak pribumi sebelumnya, yang kemudian pendidikan anak pribumi sedikit mendapatkan perhatian setelah lahirnya politik etis. Cukup menjelaskan bagaimana kebijakan yang diterapkan masa itu. Sudut pandang baru peneliti dapatkan dalam penelitian terdahulu ini, melihat dari sisi kebijakan yang

diterapkan. Penjelasan mengenai keadaan pendidikan masa kolonial Belanda menjadi kesamaan dalam penulisan ini dan penelitian terdahulu ini. Kurangnya penjelasan mengenai pendidikan dasar dapat diterima dikarenakan bahasan dalam penelitian terdahulu ini membahas pendidikan disegala jenjang.

Penelitian terdahulu berjudul “Education During National Movement in Java 1908-1928”. Bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana politik pendidikan masa kolonial Belanda yang melatar belakangi pendidikan di pulau Jawa masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Pasalnya pada saat itu kekuasaan politik dipegang oleh kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memiliki hubungan erat dengan orang-orang berkuasa di Indonesia. pendidikanpun menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan dari politik pemerintahan kolonial Belanda. Politik etis pun tidak berjalan secara semestinya oleh karena itu pendidikan di Pulau Jawa bisa dikatakan berat sebelah.

Pendidikan yang dijalankan tidak sesuai dengan kata kelayakan. Berikut yang merupakan ciri politik pendidikan yang dijalankan pemerintahan kolonial Belanda. (a) Dualisme, merupakan pembedaan dunia pendidikan, antara anak-anak Belanda dengan anak-anak Pulau Jawa. (b) Gradualisme, adalah pendidikan yang berjalan sangat lambat. Pendidikan masa ini dikatakan melambat, karena memang pemerintahan kolonial Belanda sengaja memajukan anak-anak Belanda dibandingkan anak-anak Pulau Jawa. (c) Konkordansi, adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menyesuaikan sistem pendidikan dengan sekolah yang ada di Belanda. Sehingga anak-anak Pulau Jawa tidak dapat melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi karena sulit menyesuaikan diri. (d) Kontrol sentral, merupakan peran pemerintah kolonial Belanda dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Semua usulan untuk memajukan pendidikan harus mendapatkan persetujuan dari gubernur jenderal atau direktur pendidikan. (e) Keterbatasan tujuan, Pemerintah kolonial Belanda bertujuan mendirikan sekolah untuk menceta pekerja pegawai rendah perkebunan pemerintah. Hal tersebut berimbas pada kurikulum yang sederhana. (f) Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis (Jannah dkk, 2018:131-135).

Penelitian terdahulu ini memiliki fokus kajian pada Pendidikan Pulau Jawa pada saat itu. Karena memang politik etis perpusat pada merosotnya tanah Jawa. Kelebihannya penelitian ini mencantumkan ciri politik pendidikan kolonial Belanda dalam menerapkan pendidikan. Kekurangannya karena pembahasan berfokus pada jenjang waktu yang sedikit seharusnya pembahasan lebih meluas dan detail (seperti, sekolah kelas satu, kelas dua, ELS, HIS, HCS dan bagaimana kurikulum, kebijakan, guru, sistem penerimaan siswa dll). Relevansi dengan penulisan ini terletak pada bagaimana pemerintahan kolonial Belanda memiliki ciri politik pendidikan yang sangat diskriminatif kepada anak-anak pribumi.

Penelitian terdahulu berjudul “Pendidikan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya tahun 1901-1942”. Bertujuan untuk mengetahui latar belakang kebijakan kolonial Belanda di Surabaya, jenjang pendidikan apa saja yang diterapkan masa itu, bahasa yang digunakan dan bagaimana pendidikan lanjutan yang dapat diterima anak-anak Surabaya. Pembahasan dalam penelitian terdahulu meliputi pembahasan pendidikan pada masa Kolonial Belanda ditingkat dasar yang didirikan di Surabaya. Persekolahan berjalan dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda (Westersch Lager Onderwijs).

Terdapat 3 jenis sekolah yang didirikan di Surabaya saat itu. Sekolah Rendah Eropa/ELS (Europeesche Lagere School), Sekolah Cina-Belanda/HCS (Hollandsch Chineesche School), Sekolah Bumiputra-Belanda/HIS (Hollandsch Inlandsche School), Sekolah Peralihan (Schakelschool) dan Sekolah Taman Kanak-kanak (Frobelschool). ELS sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, dan anak-anak priayi. Mulanya terdapat peraturan belajar 3 tahun. Namun terdapat perubahan ditahun 1907 masa pembelajaran diperlama menjadi 7 tahun. HCS/sekolah Cina pertama di Surabaya didirikan ditahun 1093 oleh perkumpulan Ho Tjiong Hak Kwan. Bahasa yang digunakan Kuo Yu yang merupakan bahasa nasional milik tiongkok. Lama belajar juga 7 tahun. HIS sekolah pribumi didirikan tahun 1914 di Surabaya, mengikuti sekolah lainnya yaitu lama belajar 7 tahun (Prayudi & Salindri, 2015:24-25).

Kelebihan dari penelitian terdahulu ini konsisten dalam bahasannya yang hanya terfokus pada sejarah pendidikan di Surabaya. Tepat pada point yang ingin dijelaskan seperti kita mengetahui bahwa Surabaya merupakan daerah yang diharuskan mendirikan sekolah Belanda karena lokasinya yang strategis dekat pelabuhan. Sekolah dekat pelabuhan memudahkan kolonial Belanda mendapatkan pegawai rendahan yang dapat dipekerjakan. Hubungannya dengan penelitian yang ditulis beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa memang politik etis sebagai latar belakang berkembangnya pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan lebih meluas karena mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdampak kemajuan pendidikan akibat pengaruh politik etis.

Penelitian terdahulu berjudul “Menyikap Perkembangan Pendidikan Sejak masa Kolonial Hingga Sekarang” milik Dadang Supardan. Bertujuan untuk mengetahui munculnya asumsi-asumsi dan komitmen-komitmen dalam sejarah pendidikan yang tidak disertai pemikiran kritis. Fokus penelitian terdahulu tentang kekhawatiran penulis dalam menyikapi sejarawan lain yang meneliti mengenai Sejarah Pendidikan di Indonesia. Penelitian terdahulu ini mengklaim bahwa banyak penulis sejarah yang tidak memperhatikan maksud politik dari pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Para sejarawan harus membuka mata mengenai pandangan Sejarah Pendidikan yang luas dan kompleks. Mulai dari permasalahan zaman VOC, Hindia Belanda, Politik Etis, Pendudukan Jepang, Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru atau Era Reformasi. Sejarawan harus dapat menjelaskan dan bersifat sebagai publik juga politis.

Pasalnya penulisannya mengakibatkan pedagogi bersifat politis, dan politis bersifat pedagogis. Padahal pendidikan kritis bukan tentang pembelajaran di kelas saja namun bagaimana membeaskan masyarakat. Untuk mewujudkan kesetaraan, demokrasi, politik kebudayaan, pendidikan kritis bagi masyarakat dan peserta didik (Supardan, 2008:96). Kelebihannya dapat menyadarkan betapa pentingnya memperhatikan pandangan sejarah dari segi yang luas dan tidak tercampur dengan pandangan dengan perasaan pribadi yang dapat mempengaruhi tulisan. Hal ini sangat

memiliki keterkaitan dengan penulisan ini agar membantu jalannya penulisan agar berjalan dengan baik. Kekurangannya sebaiknya menggunakan bahasa yang dimengerti hingga solusi dalam masalah dapat diterapkan dengan baik oleh penulis lainnya. Kesamaan dengan tulisan ini adalah pembahasan pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman yang menunjukkan berkembangnya pendidikan masa itu.

Artikel yang berjudul “Perkembangan dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda di Indonesia Abad 19-20” milik Zofrano dkk. Bertujuan untuk memahami berbagai macam pelaksanaan pendidikan masa kolonial Belanda di Indonesia setelah lahirnya politik etis. Pembahasan dalam artikel ini seperti bagaimana kondisi pendidikan masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang memiliki banyak pengajaran. Berdasarkan kelompok sosial sekolah khusus Pribumi, Eropa, Timur Asing. Kemudian perkembangan pendidikan setelah berjalannya politik etis. Semua hal tersebut yang akhirnya melahirkan pendidikan Modern yang menumbuh kembangkan Nasionalisme yang berbasis soft skill untuk mencetak tenaga terampil. Dapat dikatakan Pendidikan Masa Kolonial Belanda memiliki tujuan untuk meningkatkan martabat dan mencerdaskan bangsa Indonesia (Sultani dkk, 2020:91).

Artikel sebagai bukti bahwa pendidikan masa kolonial Belanda memiliki peran besar dalam pendidikan di masa ini. Penjelasan dalam artikel mudah dipahami, dari keterpurukan pendidikan Indonesia yang nyatanya memiliki dampak yang bagus untuk masa depan. Maka dari itu artikel ini dipilih untuk dibahas dalam bab penelitian terdahulu ini. Karena memiliki keterkaitan materi bahasan dan cara penulis ingin meniru artikel ini menyampaikan tujuan tulisan. Diharapkan penulisan ini dapat menjelaskan dengan baik seperti artikel ini dalam mengutarakan tujuan penulisan. Perbedaan yang ada nantinya peneliti lebih menekankan pada tujuan adanya pendidikan tingkat dasar. Karena pendidikan dasar merupakan pendidikan resmi pertama yang didapatkan anak-anak Indonesia pada masa itu.

Penelitian terdahulu dengan judul “Why was the Dutch legacy so poor? Education Development in the Netherlands Indies, 1871-1942” yang ditulis oleh Ewout Frankema (2013) Bertujuan untuk mengungkap mengapa Belanda mewarisi

pendidikan yang buruk. Tulisannya menjelaskan mengenai penyebab dasar dari warisan Belanda yang buruk. Penyebabnya adalah buruknya pengelolaan Pemerintahan Belanda dalam mengelola keuangan pendidikan. Buruknya pengelolaan menjadikan pendidikan terhambat dan terjadinya ketidaksetaraan golongan. Fokus bahasan mengenai (a) Beberapa fakta bergaya, dipercayai pengalaman pendidikan di Indonesia digambarkan pada fakta yang dibuat-buat. Kemajuan pendidikan yang kuat, ketidak setaraan structural dalam pendidikan kolonial. (b) Investasi buruk kolonial dalam pendidikan, (c) Menjelaskan warisan yang buruk, hal ini dimaksudkan dengan tinggalkan belanda tentang perubahan administrasi kolonial yang terkait dengan perdebatan metropolitan dalam pembiayaan sekolah-sekolah (Frankema, 2013:309-318).

Penelitian terdahulu ini dikerjakan berdasarkan karya Anne Booth yang berfokus membahas evolusi yang berbeda dengan sistem pendidikan kolonial di Asia Timur dan Tenggara. Kelebihannya adalah penjelasan secara rinci 2 alasan Belanda meninggalkan warisan pendidikan yang buruk (1) pengelolaan uang pendidikan yang memang sengaja dibuat demikian, (2) sikap diskriminatif akibat perbedaan/kesenjangan contohnya agama. Kekurangannya seharusnya peneliti dapat menemukan alasan lain selain 2 alasan tersebut. Artikel ini memiliki hubungan dengan penulisan ini karena penulis juga mengkaji menggunakan pendekatan politik pendidikan. Maka diperlukan rujukan yang membahas mengenai politik yang dijalankan pemerintahan kolonial Belanda dalam menjalankan pendidikan di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang telah ditemukan hampir semuanya menyebutkan perkembangan pendidikan diawali dengan lahirnya politik etis. Berkaitan dengan politik etis Sumarno dkk. (2019) dalam jurnal yang berjudul "Ethical Politics and Educated Elites in Indonesian National Movement" bertujuan menganalisis latar belakang dan implementasi politik etis dengan menggunakan metode sejarah. Pokok bahasannya adalah kemunculan politik etis yang melahirkan kaum elit terdidik di Indonesia yang kemudian membentuk gerakan nasional. Politik etis yang lahir akibat

kaum sosialis yang peduli akan kondisi tanah Jawa yang mengalami kemerosotan dan bertujuan untuk pengembangan pendidikan, irigasi, dan emigrasi/transmigrasi. Perkembangan pendidikan yang pesat kemudian melahirkan elit terdidik Indonesia. Elit terdidik menyatukan tujuannya untuk membangun gerakan nasional untuk melawan penjajahan (Sumarno dkk. 2019:369).

Artikel ini jelas lebih dalam menjelaskan mengenai politik etis. Latar belakang kebijakan yang berjalan, bagaimana penerapannya, prinsip politik etis, mengenai pendidikan emigrasi dan transmigrasi. Kekurangannya hanya sedikit menjelaskan mengenai pendidikan. Hubungannya adalah latar belakang politik etis menjadikan penelitian terdahulu ini menarik untuk menjadi rujukan penulisan ini.

Artikel Desiderius, Berjudul “De Ethhische Beweging in De Opvoeding” dimuat pada De Java-Post di tahun 1914. Menjelaskan adanya pengaruh politik etis dengan perkembangan dalam pendidikan mulai dari tulisan, pedagogik, proposal, lembaga pendidikan. Perkembangan dan penyempurnaan pendidikan ini rupanya memiliki keterkaitan dengan teori protestan. Hubungan moral sosial yang digambarkan dalam politik etis juga berhubungan dengan jiwa protestan. Kaitannya adalah pendidikan digambarkan dengan pemahaman manusia sebagai makhluk bebas yang membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam misi kemanusiaan (Desiderius, 1914:276).

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memberikan informasi berupa berita mengenai kelahiran politik etis yang berkaitan dengan komunitas keagamaan. Orang Eropa beranggapan saling menghargai antar manusia merupakan perbuatan yang bermoral baik dan dapat mendekatkan diri dengan tuhan. Kelebihan artikel ini, menunjukkan pada tahun 1914 masa politik etis berlangsung orang-orang pada masa itu juga telah mempercayai bahwa adanya politik etis memang membawa pengaruh baik. Contohnya, kemajuan bidang pendidikan. Kekurangannya artikel ini hanya diterbitkan dengan sedikit penjelasan. Sehingga, informasi yang didapatkanpun hanya sedikit. Kaitannya dengan penulisan ini, artikel ini dapat menjadi sumber primer yang membantu penyelesaian tulisan.

Artikel Soer Hdbi, dalam De Java-Post berjudul “Algemeen Overzicht” menjelaskan, terdapat peristiwa yang mengakibatkan ketidak nyamanan para guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah Indonesia. Ketidak nyamanan tersebut disebabkan kekecewaan para guru dengan atasannya. Para petinggi sekolah dirasa kurang bijaksana dan tidak professional dalam menjalankan tugasnya. Guru-guru yang mengajar merasa memiliki misi penting untuk mencerdaskan anak-anak didiknya dan keinginan untuk memajukan sistem pendidikan saat itu. Namun, mereka ragu untuk mengutarakan pendapatnya karena pengawasan sekolah dan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah cenderung diputuskan oleh kepala sekolah. Kemudian persoalan ini menjadi penyebab terhambatnya perkembangan sekolah pada saat itu tahun artikel ini terbit 1914 (Hdbl, 1914:281).

Tujuan utama dari artikel tersebut ialah menginformasikan bahwa kesenjangan dalam dunia pendidikan telah terjadi. Harapannya pembaca Koran dapat membantu untuk menyelesaikan kesenjangan antara guru dan atasan tersebut. Kelebihan artikel informasi yang diberitakan cukup membuktikan masa itu memang terjadi control sentral oleh pemerintah kolonial Belanda. Kekurangannya informasi terbatas, namun dapat diterima mengingat keadaan masa itu kurang kondusif karena semua aspek pemerintahan berada ditangan kolonial. Informasi ini menjadi literatur primer penting dalam keburukan politik pendidikan yang terapkan Belanda.

Penulisan sejarah memerlukan pendekatan dan teori yang dapat membantu penulis menyelesaikan masalah dan mengaitkan fakta-fakta temuan yang terkait dengan topik yang akan ditulis. pendekatan dan teori akan membantu menjadikan tulisan menjadi satu kesatuan yang baik. Teori dalam penulisan akan sangat berguna untuk menjalankan analisis sebagai dasar berfikir.

Penulisan ini menggunakan pendekatan Politik Pendidikan. Politik pendidikan mengkaji kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan dalam menjalankan pendidikan. Politik Pendidikan merupakan semua urusan dan tindakan (sebagaimana kebijakan, siasat dll) yang dijalankan oleh pemerintahan dalam Negeranya atau Negara lain meliputi tipu muslihat atau kecurangan dan dipergunakan sebagai nama

disiplin pengetahuan yakni ilmu politik. Aktifitas yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh kemudian dijalankan dengan mengubah/mempertahankan bentuk susunan dalam masyarakat (Sarnoto, 2012:30-31).

Politik Pendidikan dimaknai sebagai kesimpulan politik Negara, karena penerapan pembahasannya dimuat dari nilai-nilai dan tradisi Negara. Kemudian sistem rancangan masyarakat mengenai bentuk Negara dalam sistem pendidikan. Karena, tatanan politik dengan bangsa dan sistem politik merupakan hubungan yang saling menguatkan. Tujuan Politik Pendidikan sendiri adalah memperjelas arah kemajuan pendidikan dalam membangun bangsa dan Negara yang lebih baik dimasa depan (Sunarso, 2021:19). Menurut peneliti, pendekatan Politik Pendidikan cocok digunakan sebagai membantu menganalisis permasalahan dalam karya tulis ini. Karena saat itu pemerintah Belanda merancang kebijakan-kebijakannya dengan maksud memperkuat kedudukan politik dan ekonominya di Hindia-Belanda. Kekuatan politik menjadi kunci untuk dapat mengontrol masyarakat dan memperkaya ekonominya. Kebijakan tersebut bersifat merugikan karena sifatnya yang tidak memperdulikan masyarakat asli dan menurunkan kesejahteraan dalam banyak aspek kehidupan (pendidikan, perekonomian, kebudayaan, keagamaan dll).

Sebagai rujukan teoritis peneliti memilih teori Kebijakan Publik William Dunn. Analisis kebijakan publik merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode dan teknik dalam menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Hal ini diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan disektor publik. Karenanya analisis ini sangat dibutuhkan oleh politisi, konsultan, dan pengambil keputusan pemerintah. Berjalan dengan waktu Intensitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat semakin bertambah, dengan ini kebutuhan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan publik juga meningkat (dunn, 2003).

Kebijakan publik merupakan aturan-aturan yang dibuat pemerintah bersama keputusan politik untuk mengatasi masalah, persoalan atau isu-isu yang ada di masyarakat. Tindakan pemerintah mengenai pembuatan kebijakan publik dipastikan memiliki tujuan. Dalam sistem politik kebijakan publik di terapkan oleh lembaga-

lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan akan melaksanakan kebijakan hari demi hari hingga terciptanya kinerja kebijakan. Penerapan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan akan melibatkan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan (Soepeno, 2018:346-347). Teori ini sangat cocok digunakan karena berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Karena sistem kontrol sentralnya yang dipegang oleh Menteri Jajahan sebagai perwakilan raja Belanda mengutus Gubernur Jendral dalam mengurus pemerintahannya di Hindia-Belanda. Penentuan kebijakan pendidikannya Gubernur Jendral dibantu lembaga khusus penasihat yakni *Raad van Indie*. Kemudian penerapan kebijakan dijalankan oleh direktur departemen yang memiliki permasalahan dan dilanjutkan kepada para inspektur. Penerapan kebijakan biasanya dilakukan pada kegiatan kerja sehari-hari. Kebijakan tersebut kemudian merambat hingga masyarakat Indonesia masa itu.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo memiliki lima langkah, berikut (1) Pemilihan topik; (2) Pengumpulan sumber/Heuristik; (3) Verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber); (4) Interpretasi: analisis dan sistesis; (5) Penulisan sejarah/Historiografi (Kuntowijoyo. 2018: 69).

3.1 Pemilihan Topik

Penulisan sejarah memiliki tahapan dalam penyusunannya, tahap yang pertama adalah pemilihan topik. Kuntowijoyo menjelaskan, bahwa pemilihan topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual sang penulis, keduanya memiliki sifat subjektif dan objektif. Ketertarikan pribadi dalam pemilihan topik dan kemampuan peneliti menulis topik dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisannya. Peneliti harus memahami inti isi dari penulisan penelitian yang akan dilakukan, bagaimana berjalannya penulisan, apa sumber yang akan digunakan penulis, fokus permasalahan apa yang dibahas dalam penulisan, dan permasalahan apa yang akan di ungkap (Kuntowijoyo, 2018:70-72).

Penulisan ini, memilih topik Sejarah Pendidikan untuk bahan yang akan ditulis. Alasan penulisan topik didasari kedekatan emosional peilihan topik ini adalah kurangnya kesadaran sejarah penulis, dan rasa ingin tahu penulis mengenai sejarah pendidikan dasar di Indonesia. Untuk kedekatan intelektual penulis tertarik mengkaji lebih dalam karena telah menempuh mata kuliah sejarah pendidikan dan ketersediaan sumber-sumber yang dapat membantu penyelesaian penulisan ini. Permasalahan yang didapat adalah kurangnya kesadaran sejarah dalam jiwa penulis dan masyarakat sekitar akibat berkembangnya era globalisasi yang erba praktis dan modern. Kemajuan tekonologi di pendidikan membuat kita semua tidak menyadari sejarah yang terjadi dibudang pendidikan sebelumnya. Karena rasa penasaran tersebut peneliti akhirnya memilih topik ini. Peneliti ingin mengungkap latar belakang sejarah pendidikan dasar di Indonesia masa Pemerintahan Kolonial Belanda.

Peneliti telah menentukan rencana penelitian, judul penelitian ini perlu diteliti karena, sedikit orang yang membahas tentang pendidikan dasar masa kolonial Belanda. Kebanyakan penelitian terdahulu yang telah ditemukan menjelaskan seluruh jenjang pendidikan dan kurang terpusat. Peneliti ingin menfokuskan penulisan pada pendidikan dasar. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah memberikan wawasan dan bahan bacaan baru bagi pembaca agar mengetahui sejarah lebih dalam pendidikan dasar masa kolonial Belanda. Harapannya para pembaca dapat merekonstruksi keadaan masa itu dalam pikirannya. Cakupan waktu dan tempat yang diteliti meliputi tahun 1900-1920 (lahirnya politik etis hingga perkembangan pendidikan dasar telah cukup memadai dan pergantian fokus pemerintahan kolonial mengembangkan sekolah tingkat lanjut) tempatnya, di wilayah Indonesia yang terkena dampak perkembangan pendidikan politik etis.

3.2 Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber atau data sejarah yang dilakukan peneliti harus memiliki kesesuaian dengan topik yang akan ditulis. kesesuaian diharapkan memudahkan dan mempercepat pengerjaan penulisan. Kuntowijoyo menjelaskan dalam bukunya sumber sejarah dibagi menjadi dua yakni sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Penulisan penelitian ini peneliti banyak menggunakan sumber tertulis yang merupakan kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan kita biasa menyebutnya dokumen. Dokumen dapat berupa laporan-laporan pemerintahan, atau dokumen yang telah diterbitkan, atau catatan perjalanan seseorang, surat kabar, surat-surat pribadi yang memuat sejarah dll (Abdurahman, 2011:36). Sementara itu sumber tertulis dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Herlina, 2020:24).

Sumber Sejarah yang akan digunakan dalam penulisan, harus memiliki kesesuaian dengan topik dalam penelitian. Scope temporal dan spasial juga perlu diperhatikan dalam pencarian sumber, agar mempermudah penulisan. Penelitian ini

termasuk dalam penelitian studi literatur oleh karena itu peneliti berusaha mencari literatur yang terkait dengan topik. Literatur berupa buku-buku dan jurnal.

Berikut literatur berupa sumber primer yang telah peneliti temukan: (1) Koran De Java Post berjudul “Weekblad Van Nederlandsch-Indie” terdapat artikel-artikel yang membahas keadaan Hindia Belanda pada saat itu politiknya maupun pendidikan yang berjalan. Koran ini terbit pada tahun 1914, (2) Koran “De Telegraaf” berjudul “Het Meest Verspreide Groote Dagblad” nomor 7716 yang terbit 16 Desember 1913, Amsterdamsche. Menjelaskan bagaimana keadaan saat itu di gereja kaum liberalis yang mulai menyuarakan pendapatnya. (3) buku berjudul “Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie” karya Dr. I. J. Brugmans, menjelaskan keseluruhan perjalanan pendidikan di Hindia Belanda dan ditulis tahun 1938.

Kemudian sumber sekunder yang telah ditemukan adalah: (4) Buku Sejarah Pendidikan Indonesia di tulis oleh Nasution (1995) menjelaskan keseluruhan pendidikan yang didirikan oleh orang Eropa disemua jenjang pendidikan, (5) Buku berjudul “Sejarah Pendidikan di Indonesia zaman Penjajahan” karya Djohan Makmur dkk. Yang diterbitkan tahun 1993, (6) buku berjudul “Hindia-Belanda 1930” Karya Dr. J. Stroomberg. Dicitak tahun 2018, (7) buku berjudul “Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan” karya dr. Muh. Said. Yang diterbitkan tahun 1981, (8) buku projek Depdikbud. Berjudul “Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat” tahun 1998, (9) buku projek Depdikbud. Berjudul “S Pendidikan Daerah Jawa Timur” tahun 1980/1981. Diatas merupakan sumber yang telah peneliti temukan. Kemudian sumber-sumber yang belum dicantumkan, buku-buku di UPT perpustakaan Unej, buku di Internet, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, dan sumber yang belum ditranslate kedalam bahasa indonesia.

3.3 Verifikasi (Kritik Sejarah, Keabsahan Sumber)

Setelah menentukan topik yang akan ditulis dan sumber telah terkumpul, langkah selanjut adalah verifikasi/kritik sejarah atau keabsahan sumber. Kritik sejarah sangat diperlukan untuk peneliti dalam penulisan sejarah. Hal ini akan membantu

penulis untuk melihat sumber dan data yang digunakan dapat digunakan atau tidak. Karena sejarah membutuhkan sumber dan data yang akurat untuk menghindari adanya konflik dalam penulisan. Terdapat dua macam verifikasi yaitu Auntenisitas/kritik ekstern dan kredibilitas/kritik intern (Kuntowijoyo, 2018:77). Berikut ini sumber yang akan dikritik untuk diuji validitasnya.

Kritik ekstern, merupakan pembuktian keaslian sumber berdasarkan fisik sumber yang ditemukan. Jika ditemukan sumber berupa dokumen tertulis peneliti harus memperhatikan fisik dan penampilan sumber tersebut. Bagaimana kondisi kertasnya, tinta yang digunakan, gaya tulisan, bahasa yang gunakan, kalimat, ungkapan-ungkapan didalamnya dan lainnya. Apakah terlihat seperti sudah lama?. Sumber harus dapat menjawab pertanyaan seperti: Kapan sumber di buat?, dimana sumber dibuat?, siapa yang membuat sumber?, dari bahan apa sumber dibuat?, apakah sumber dalam bentuk asli?, (Abdurahman, 2011:105-107).

(1) Koran De Java Post berjudul “Weekblad Van Nederlandsch-Indie” ditulis Verschijnt Elken Vrijdag terbit pada tahun 1914. Sumber yang ditemukan pada situs jurnal belanda. Merupakan hasil scan dari Koran asli yang kemudian dipublish pada internet. Tahun penerbitan 1914 saat politik etis mulai bekerja dan menyebarkan pengaruhnya. Jadi dapat dikatakan sumber primer. Beberapa artikel yang diterbitkan di dalamnya menjelaskan keadaan pada saat itu, (2) Koran “De Telegraaf” berjudul “Het Meest Verspreide Groote Dagblad” nomor 7716 yang terbit 16 Desember 1913, Amsterdamsche. Menjelaskan bagaimana keadaan saat itu di gereja kaum liberalis yang mulai menyuarakan pendapatnya. Merupakan sumber primer karena tahun terbitan dalam jangkauan berjalannya politik etis. Menjelaskan keadaan di Belanda untuk memperjuangkan politik etis hingga berita tersebut sampai hingga Hindia Belanda, (3) buku karya Brugmans yang berjudul “Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie” tahun 1938, dapat dikatakan sebagai sumber primer karena bunya ditulis oleh dia sendiri yang menjadi saksi perjalanan pendidikan masa politik etis dan tinggal di Batavia.

Selanjutnya adalah kritik Intern, merupakan pembuktian keaslian sumber berdasarkan isi yang terdapat pada sumber yang ditemukan. Kritik ini menentukan kredibilitas suatu sumber yang telah peneliti temukan. Peneliti harus menyelidiki isi dalam sumber/data yang ditemukan kemudian menelaah apakah isi sumber dapat dijadikan bahan untuk penulisan atau tidak, apakah isi sumber memiliki keterkaitan dengan sejarah atau tidak. Pertanyaan yang harus dijawab seperti “Nilai bukti apa yang ada dalam sumber?” (Abdurahman, 2011: 107).

(4) Buku Sejarah Pendidikan Indonesia di tulis oleh Nasution (1995), dalam isinya menemukan kelengkapan pembahasan mengenai sekolah dasar pada masa politik etis. Bahkan sebelum politik etis. Sumber yang digunakan pun memungkinkan untuk menjadikan buku ini sebagai sumber sekunder, (5) Buku berjudul “Sejarah Pendidikan di Indonesia zaman Penjajahan” karya Djohan Makmur dkk. Yang diterbitkan tahun 1993. Merupakan buku yang dapat digunakan sebagai sumber sekunder dikarenakan penulis pastinya pernah mengalami kelanjutan dari peristiwa sejarah yang kemudian menuliskannya dalam bentuk buku ini, (6) buku berjudul “Hindia-Belanda 1930” Karya Dr. J. Stroomberg. Dicitak tahun 2018. Pembahasan yang dibahas memiliki ketepatan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. Dan melalui banyak pertimbangan dalam penulisan buku dikarenakan terbit di tahun 2018 pasti telah melakukan riset yang tinggi oleh karena itu dapat digunakan untuk sumber sekunder, (7) buku berjudul “Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan” karya dr. Muh. Said. Yang diterbitkan tahun 1981. Berisi penjelasan pendidikan masa Pemerintahan Kolonial Belanda pada saat itu. Maka buku ini dapat digunakan sebagai sumber, (8) buku proyek Depdikbud. Berjudul “Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat” tahun 1998, (9) buku proyek Depdikbud. Berjudul “Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur” tahun 1980/1981. Kedua buku ini merupakan porjek pemerintahan untuk menyelidiki bagaimana alur sejarah pendidikan kala itu. Peneliti yang meneliti pun banyak dan terbagi menjadi beberapa team di seluruh bagian Indonesia, hal ini juga menjadi alasan buku ini dapat digunakan.

3.4 Interpretasi: Analisis dan Sintesis

Interpretasi adalah penafsiran yang digunakan sebagai inti subjektivitas. Tanpa adanya penafsiran sejarahwan data tidak akan berbicara. Interpretasi terdiri dari dua macam analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan sumber. Sintesis adalah menyatukan sumber (Kuntowijoyo, 2018:78-79). Interpretasi yang dapat disebut analisis sejarah tujuannya adalah melakukan sintesis atas beberapa fakta sejarah sehingga disusun secara menyeluruh. Peneliti dituntut dapat mencapai pengertian faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa sejarah. Interpretasi bisa dilakukan dengan membandingkan data untuk menyimpulkan peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama. Sehingga penulis dapat mengetahui situasi, tindakan, pelaku, dan tempat peristiwa tersebut (Abdurahman, 2011:111-112).

Berikut penafsiran inti subjek dari penulisan ini: (1) keadaan pendidikan dasar sebelum politik etis merubah sistem pendidikan, (2) latar belakang pemerintah kolonial Belanda mendirikan pendidikan dasar yang beragam di Indonesia (pengaruh politik etis dan penerapan kebijakan pendidikan), (3) bagaimana keadaan pendidikan dasar yang beragam setelah pengaruh politik etis, (4) bagaimana sistem dan penerapan pendidikan dasar dengan 2 jenis sekolah berdasarkan bahasa pengantarnya pendidikan pribumi (sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, sekolah desa, sekolah lanjutan, sekolah peralihan) dan pendidikan non-pribumi (barat: ELS,HCS,HIS) yang terdiri dari kurikulum, kualitas guru, dan fasilitas sekolah pada masa kolonial Belanda tahun 1900-1920.

3.5 Penulisan Sejarah (Historiografi)

Penulisan Sejarah merupakan langkah akhir dalam 5 tahapan penelitian sejarah. Penulisan Sejarah atau Historiografi adalah pencatatan perjalanan sejarah yang dianggap sangat penting untuk dimengerti dan dikaji lebih dalam oleh ahli sejarah, calon sejarahwan, dan masyarakat yang peduli dengan perkembangan sejarah. Aspek kronologi sangat penting dalam penulisannya. Terdapat 3 bagian dalam penulisan sejarah yaitu: (1) Pengantar, merupakan penjabaran permasalahan,

latar belakang, historiografi dan bagaimana pemikiran kita mengenai tulisan orang lain, pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, teori dan konsep yang digunakan, sumber sejarah. (2) Hasil Penelitian, menjabarkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Penulis dituntut untuk profesional dan memiliki rasa tanggung jawab dalam tulisannya. (3) Simpulan, menjabarkan generalisasi kemudian melanjutkannya dengan menerima, memberikan catatan, atau menolak (Kuntowijoyo, 2018:80-82).

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, penegasan judul, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
2. Bab II tinjauan pustaka, memuat penulisan karya peneliti terdahulu yang topik penelitiannya serupa. Berisi kajian, teori, dan pendekatan dalam mengkaji masalah.
3. Bab III metode penelitian, langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk meneliti topic sejarah ini. Menggunakan 5 tahapan penelitian yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, penulisan.
4. Bab VI Pembahasan, mengenai pendirian pendidikan dasar oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1900-1920.
5. Bab V Pembahasan, mengenai pelaksanaan pendidikan dasar yang beragam pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1900-1920.
6. Bab VI kesimpulan dan saran, penejasan dalam bab ini meringkas secara garis besar penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan memiliki kegunaan untuk menjelaskan isi penelitian dalam bentuk pokok pikiran kemudian untuk saran sebagai masukan peneliti untuk memperbaiki penulisan dan mengembangkan penelitian selanjutnya.

BAB 4. PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR YANG BERAGAM OLEH PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA TAHUN 1900-1920.

Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1596. Kedatangan Belanda dilatar belakangi oleh motif perdagangan. Motif itu berkembang di tahun 1602 dan melahirkan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). VOC adalah perusahaan dagang milik orang-orang Belanda Protestan. Selain berdagang motifnya juga menyebarkan agama Protestan. Pendidikan masa VOC diselenggarakan dengan tujuan misi keagamaan Protestan dan menghasilkan pegawai rendahan. Sekolah yang didirikan sengaja di tempatkan pada daerah yang sebelumnya mendapatkan pengaruh Portugis yang beragama Katholik (di Maluku). Peletakan tersebut bertujuan untuk menghapus pengaruh portugis dan keberadaan agama Katholik agar tergantikan dengan agama Kristen Protestan.

Sekolah mulai didirikan di Jakarta di tahun 1630. Kemudian berkembang menjadi 3 sekolah di tahun 1636. Kurikulum yang diajarkan berlandaskan gereja Protestan. Meskipun tidak terdapat kurikulum yang pasti, sekolah ini memberikan pelajaran mengenai agama, katekismus, menulis, membaca, dan bernyanyi (Arta, 2015:56-58). Selagi menetap di Indonesia karena berdagang, orang-orang Belanda menyebarkan agamanya (Kristen protestan). Kegiatan penyebaran agama tersebut lambat laun menjadi awal mula kebijakan pendidikan kolonial Belanda (Rifa'i, 2017:57).

Perkembangan pendidikan rupanya mulai mengalami kemerosotan di pertengahan abad ke-18. Siswa yang bersekolah hanya 350 murid di pulau Jawa. Terdapat uang sumbangan pendidikan kepada sekolah di Jakarta. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan karena tidak ada satupun guru Belanda yang dapat mengajar di sekolah. Akibatnya pendidikan di masa pemerintahan VOC memiliki keadaan yang memprihatinkan dan menyedihkan dibanding dengan sebelum Belanda tiba di Indonesia (Nasution, 1995:7). Keadaan tersebut di dukung dengan bangkrutnya VOC di tahun 1799, karena masalah internal. Setelah ambruknya VOC,

kekuasaan VOC di Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintahan negeri Belanda (Syaharuddin & Susanto, 2019:35).

Tahun 1801 pemerintahan Hindia Belanda dengan gamblang mengatakan bahwa tanah jajahan (Indonesia) harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada perdagangan Hindia-Belanda untuk memperkaya negeri Belanda. Mereka berusaha dengan segenap tenaga untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negerinya. Kekuasaan tradisional tetap digunakan agar dapat mengontrol penduduk pribumi. Golongan priyayi mendapatkan golden tiket sebagai pegawai pemerintah. Pemerintah kolonial beranggapan pendidikan harus dimulai dari dasarnya karena telah mengalami kegagalan pada masa VOC.

Pendidikan yang dirasa kurang baik. Mendapatkan perhatian dari gubernur Daendels. Menurutnya pendidikan hendak dilancarkan bagi anak-anak pribumi untuk mengenalkan apa itu kesusilaan, adat istiadat, dan pengertian agama-agama. Namun tidak dapat direalisasikan karena kurangnya dana pengajaran. Praktik kolonialisasi sempat berhenti karena Belanda dikalahkan Inggris. Inggris menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahannya di tahun 1811-1816. Setelah Belanda merebut kembali Indonesia, barulah muncul anggaran belanja pendidikan orang Indonesia. Pendidikan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendah di kantor pemerintahan kolonial atau kantor lainnya (Nasution, 1995:8).

Komisaris jendral yang di bentuk pemerintah Belanda tiba di Indoensia Pada tanggal 19 Agustus 1816 terdiri dari Elout, Buyskes, dan Van der Capellen dengan tugas khusus menerima pemerintahan Indonesia dari tangan John Fendall yang menggantikan kedudukan Raffles. Komisaris jenderal datang ke Indonesia dengan membawa sejumlah besar pegawai dan ribuan tentara. Pegawai berbangsa Belanda berfungsi melaksanakan tugas kepegawaian yang memperlancar jalannya roda pemerintahan. Tentara yang banyak memiliki tugas menjaga keamanan dan keselamatan para petugas pemerintah. Banyaknya orang berkebangsaan Belanda, mulai mendapatkan perhatian dalam bidang pendidikan. Utamanya bagi putra-putri pegawai bangsa Belanda yang ada di Indonesia. Banyaknya orang berkebangsaan

Belanda karena anak-anak Belanda yang ikut orang tua mereka yang bekerja di tanah jajahannya. Masalah pendidikan mendapatkan perhatian dari pemerintah kolonial, yang kemudian dikeluarkannya peraturan umum mengenai pendidikan di sekolah-sekolah. Sayangnya peraturan tersebut tidak menyinggung mengenai pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan memang diperuntukkan untuk orang-orang Belanda saja. Meski Sebagaimana sebelum Belanda menguasai tanah air pendidikan masyarakat pribumi sebagian besar berasal dari pengajaran agama Islam di pesantren (Depdikbud, 1981:95).

Sifat pendidikan pemerintahan kolonial yang egois dan diskriminatif tersebut dapat menghambat perkembangan pendidikan lokal masyarakat yang telah ada. (Burgers, 2011:143). Pendidikan yang dilahirkan pemerintah kolonial Belanda sebenarnya tidak pernah dinyatakan secara tegas tujuannya. Tetapi dari berbagai fakta yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan jika tujuan pendidikan tidak lain adalah usaha untuk mensejahterahkan kekuasaannya di Indonesia. Hal tersebut direalisasikan dengan membentuk dan memenuhi kebutuhan tenaga buruh kasar bagi kepentingan industri kaum modal Belanda. Untuk mengembangkan bisnisnya, orang Belanda membutuhkan tenaga kerja yang baik. Pendidikan dapat melatih dan mendidik seseorang menjadi tenaga pertanian, tenaga teknik, tenaga administrasi, dan lain-lain yang dapat diangkat sebagai pekerja-pekerja golongan kelas 2/kelas 3 (Gunawan, 1986:21).

4.1 Politik Etis Sebagai Penggerak Pendidikan

Rencana kelompok liberal dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat harus menghapus harapannya karena krisis ekonomi yang terjadi tahun 1885. Selama masa liberal, kapitalisme swasta memegang peran penting dalam kebijakan penjajahan. Perusahaan-perusahaan mulai masuk dan mengakibatkan struktur ekonomi tidak lagi individual melainkan menjadi kapitalis. Bersamaan dengan kepentingan-kepentingan baru yang mulai mempengaruhi politik kolonial Belanda di Indonesia. Dipahami dengan jelas, bahwa orang Belanda menyadari keberadaan

kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Tanah air kita yang dianggap harta karun menjadi salah satu harapan untuk perkembangan perdagangan dan industri Belanda. Sayangnya penduduk asli yang tinggal di letak kekayaan tersebut tidak dihargai dengan baik.

Orang Belanda hanya memikirkan kekayaan produk yang dihasilkan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan memanfaatkannya sebaik mungkin (Muller, 1873:8). Karenanya industri-industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar menguntungkan yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan mulai bertambah mulai dari modal Belanda kemudian pasar internasional. Semuanya berlomba-lomba mencari celah baru untuk investasi dan eksploitasi. Perusahaan-perusahaan mulai mendukung penjajah untuk menciptakan suasana tentram, adil, modern, dan kesejahteraan. Perdagangan dan industri yang besar membutuhkan banyak pekerja. Sehingga kebutuhan tenaga kerja sangat dicari dan dibutuhkan. Pekerjaan dengan upah rendah yang dilakukan masyarakat Bumiputera jelas sangat menguntungkan pengusaha perkebunan. Kesejahteraan rakyat semakin menurun akibat eksploitasi tersebut yang biasa disebut Tanam Paksa.

Akibat kondisi tersebut, kritik-kritik banyak dilontarkan dalam buku Max Havellar (1860) karya Multitatuili (Douwes Dekker). Banyak pendapat yang mendukung usulan pemerintah kolonial Belanda mengurangi beban penderitaan rakyat Indonesia. Van Dedem yang merupakan anggota parlemen Belanda, mengucapkan secara resmi bahwa politik etis adalah garis politik kolonial baru. Pada pidatonya di tahun 1891. Keuangan Indonesia harus dipisahkan dari negeri Belanda, kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus diperjuangkan menuju politik konstruktif. *Van Kol*, *Van Deventer*, dan *Brooschoot* meneruskan perjuangannya dengan melancarkan politik kolonial progresif tersebut. Van Kol menuntut pemerintahan Belanda untuk mengembalikan keuntungan yang telah diperoleh pemerintah Belanda selama 1 abad dari penghasilan rakyat (Depdikbud, 1998:69-70).

Van Deventer menulis artikel dalam majalah *De Girs* dengan judul "Hutang Kehormatan". Dalam tulisan itu menjelaskan hasil panen yang sangat berharga telah

didapatkan pemerintah Belanda melalui tanam paksa. Keuntungan yang diperoleh berjuta-juta gulden. Tahun 1867 sampai 1878 jika ditaksir keuntungan mendapatkan 187 juta gulden. Belanda memiliki hutang atas rakyat Indonesia yang harus dipulangkan meskipun dikembalikan dalam bentuk yang lain karena hal tersebut merupakan hutang kehormatan. Sebagai bangsa bermoral hal tersebut menjadi kewajiban Belanda untuk mengembalikan hutangnya dengan memajukan dan menyejahterahkan tanah jajahannya.

Pandangan Van Deventer rupanya menarik perhatian ratu Belanda Wilhelmina, yang kemudian berbicara pada pidatonya dengan judul "*Ethische Richting*" "*Nieuw Keurs*" yang bermakna haluan etis atau haluan yang baru di tahun 1901. Berisi penegasan usaha-usaha memperbaiki buruknya keadaan ekonomi rakyat Indonesia, seperti membentuk badan penyelidikan alasan kemunduran kesejahteraan rakyat Indonesia (Daliman, 2017:63-64). Ratu Wilhelmina mengembangkan usaha-usaha masyarakat pribumi dengan cara menghidupkan kembali usaha-usaha agraris atau industrial, kemudian dilahirkan peraturan baru untuk mencegah kemerosotan yang lebih jauh. Peraturan berupa pemberian pinjaman tak berbunga sebesar f 30 juta dengan jangka pengembalian 5 sampai 6 tahun dan pemberian hadiah sebesar f 40 juta. Sesuai dengan usulan Van Deventer, Kielstra dan D. Fock dalam memperbaiki taraf hidup penduduk Indonesia.

Pemerintah kolonial Belanda memandang politik etis sebagai politik paternalistis. Maksudnya adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurus kepentingan anak negeri tanpa mengikutsertakan anak negerinya. Sebagai kekuatan Kristen, Belanda wajib mengikut semua kebijakan pemerintah untuk menembus kesalahan dan panggilan moral yang perlu dipenuhi. Kaum moralis liberal menganggap politik kolonial berkewajiban sekiranya bangsa maju terhadap bangsa yang terbelakang. Kata lainnya politik etis adalah penerapan gagasan yang dimuat dalam teori *mission sacree* atau *the white man's burden*. Berarti orang Eropa berkulit putih memiliki tugas memajukan peradaban bangsa-bangsa kulit berwarna. Sebagai bangsa yang terjajah

Indonesia tentu memandang politik etis hanya suatu dalil untuk mengintimidasi penjajahan mereka.

Politik etis memiliki aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi ditunjukkan dengan adanya kemajuan upaya penyediaan dana untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek sosial bermaksud meningkatkan kesejahteraan sosial melalui desa. *Van den Bosch* yang memiliki keyakinan eksperimen yang dilakukan oleh *Raffles* menyebabkan rakyat semakin miskin, karena menggunakan desa sebagai alat mempertahankan ketentraman dan ketertiban untuk mendongkrak warga desa meningkatkan produksi materil. Tentu saja hal tersebut memperlemah solidaritas desa.

Orang-orang penganut politik etis atau pembaharu etis memiliki tujuan untuk memperkuat desa dan mempertinggi kesejahteraan sosial untuk mendorong pemerintah yang demokratis sesuai dengan ide tradisi liberal. Hal tersebut direalisasikan dalam undang-undang pemerintahan desa tahun 1906 yang dasarnya bersumber pada amandemen konstitusi 1903. Prinsip-prinsipnya diletakkan dalam sebuah dekrit raja 1904. Tujuannya memberikan batas atau norma bagi penduduk desa dalam administrasi, mengawasi, kekayaan tanah, urusan-urusan desa, pendapatan, dan pengeluaran desa (Daliman, 2017:69-71).

Politik etis telah merubah pandangan politik kolonial. Pandangan mengenai Indonesia sebagai daerah yang menguntungkan kini berganti menjadi Indonesia merupakan daerah yang perlu disempurnakan untuk mencukupi kepentingannya. Pendapat Van Deventer tersebut dikenal juga dengan trilogi Van Deventer atau Trias etika yang berisi pendidikan, irigasi, dan emigrasi (Gunawan, 1986:20). Usaha-usahanya adalah membangun irigasi di daerah pertanian atau perkebunan, sementara untuk mengadakan emigrasi dilakukan di daerah yang dianggap padat penduduk, dan melancarkan pendidikan untuk anak-anak bangsa Indonesia. Pendidikan dengan pengaruh politik etis melahirkan beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (Rifa'i, 2017:73).

Berkaitan dengan alurnya politik etis telah menggambarkan landasan idiil dalam menerapkan pendidikan di Hindia-Belanda. Pemerintah kolonial merujuk kebijakannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak-banyaknya untuk golongan bumiputera, karenanya penggunaan bahasa Belanda diharapkan dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, pemberian pendidikan tingkat rendah diperuntukan golongan bumiputera dan disesuaikan sesuai kebutuhannya. Kedua jalur tempuh pendidikan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan unsur lapisan atas dan tenaga kerja terdidik dan berbutu tinggi untuk guna industri, ekonomi (Gunawan, 1986:20). Politik etis dilahirkan dengan tujuan misi kemanusiaan. Hal tersebut menandai masa transisi politik liberal menuju politik etis.

Politik etis telah mempengaruhi pendidikan sehingga terdapat perubahan sebagai berikut: Pendidikan dibuka untuk anak lapisan atas yang sebelumnya pendidikan hanya diduduki oleh anak Belanda, bahasa dan kebudayaan barat diterima oleh masyarakat Indonesia karena belum adanya pengetahuan nasionalisme, kesempatan untuk mempelajari bahasa Belanda diperbanyak, giliran masuk HIS diperluas, anak lapisan tengah dan rendah mendapatkan kesempatan bersekolah di pendidikan khusus yang disediakan pemerintah Belanda, pendidikan cita-cita RA Kartini didirikan untuk mengatasi masa *mendere welvaart*, jumlah sekolah kelas Dua ditambah, infrastruktur sekolah untuk anak Indonesia mulai diperbaiki, sekolah kelas Dua dibuka bagi bangsa Cina dan pembukaan HCS, *ambonsche burgerschool* dijadikan HIS, didirikan sekolah kejuruan seperti sekolah teknik, Didirikan sekolah perempuan seperti Nijverheidschool (Depdikbud, 1998:70-72).

4.2 Kebijakan Politik Pendidikan Kolonial Belanda

Pendidikan memang mengalami perkembangan setelah lahirnya politik etis. Namun, politik etis nyatanya dalam penerapannya hanya dijalankan oleh segelintir orang saja. Bahkan terdapat perdebatan di negeri Belanda antara pro dan kontra mengenai penerapan politik etis. Hasil pendidikan untuk anak-anak Bumiputera

sangat memprihatinkan. Meski telah bersekolah selama 5 tahun, nyatanya anak tamatan dari sekolah desa atau sekolah kelas 2 menjadi buta huruf. Karenanya mereka mendapati kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan. Anak lulusan kelas Duapun diharuskan magang ke kecamatan dan menunggu lowongan (Rifa'i, 2017:74-75). Politik tetaplah politik, maka dari itu politik pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan politik kolonial belanda. Politik yang dijalankan telah didominasi oleh golongan yang memiliki kuasa. Nilai-nilai etis dalam mengembangkan kematangan politik dan kebebasan tanah jajahan tidak diperhatikan. Sikap-sikap teseut didapatkan beberapa ciri politik dan praktik pendidikan yang dijalankan pemerintahan kolonial Belanda sebagai berikut:

1. *Gradualisme*

Pendidikan disediakan oleh pemerintah kolonial dalam lingkungan jajahan yang berkembang bertahap dan berjalan lamban. Pergerakan tersebut memang disengaja agar penduduk Indonesia mempertahankan pendidikan mereka seperti Belanda belum tiba di Indonesia. Namun sejak VOC dibentuk, VOC tergerak mengembangkan pendidikan penduduk asli. Hubungannya akan mempermudah meraih tujuan dalam mencari keuntungan (mencari pegawai rendah). Negeri Belanda dengan pendidikan gerejanya tidak dianjurkan oleh VOC untuk menjadi patokan dalam mengembangkan pendidikan Indonesia. Alasannya Belanda tidak ingin perkembangan pendidikan akan melahirkan kaum terpelajar yang dapat membahayakan kedudukan monopoli mereka.

Ketika pemerintahan Belanda mengambil ahli dalam pemerintahan Indonesia, mereka terpengaruh oleh pikiran liberalisme dan mengakui bahwa pendidikan sangat dibutuhkan untuk anak-anak Belanda yang tinggal di Indonesia. Kemudian didirikanlah pendidikan tersebut di awal abad ke-19, anak Indonesia tidak diberikan pendidikan yang sama. Dana pendidikan diberikan pertama kalinya di tahun 1848. Dana dibutuhkan untuk pendidik dan mencetak pegawai pengawas perkebunan. Kemudian di tahun 1863 pemerintah memiliki 52 sekolah. Meski sekolah telah didirikan pemerintahan tidak menginginkan pendidikan diberikan kepada masyarakat

pribumi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menjadikan bumerang untuk pemerintahan kolonial. Karenanya pemerintah kolonial Hindia Belanda menolak tawaran dari negeri Belanda dan Amerika untuk mendirikan sekolah misi Kristen di Indonesia. Sebaliknya perhatian khusus banyak ditujukan hanya untuk anak-anak Belanda saja.

Sekolah didirikan di akhir abad ke-19. Anak Belanda mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik daripada di negaranya sendiri (Belanda). Anak-anak turunan Belanda dapat memasuki pendidikan menengah mulai tahun 1860. Sementara pendidikan lanjut bagi anak Indonesia baru disediakan di tahun 1914. Pemerintah Belanda tidak rela mengorbankan biaya yang banyak bagi pendidikan anak pribumi. Pemerintah Belanda hanya memberikan 5 hingga 10% dari keuangan yang dikeluarkan Filipina dalam mengembangkan pendidikan. Lambatnya pendidikan anak Indonesia juga disebabkan urusan penguasaan penduduk yang dipegang oleh raja masing-masing. Orang-orang Belanda tidak ingin merubah adat istiadat yang telah berkembang saat itu. Meskipun mendapatkan dorongan dari gubernur jenderal, nyatanya raja-raja setempat tidak berusaha banyak dalam pendidikan (hanya sebagian kecil saja). Penduduk Indonesia juga tidak menunjukkan ketertarikan dan minat akan pendidikan orang Belanda. Bahkan masyarakat lapisan atas menaruh curiga kepada niat pemerintahan Belanda dalam mendidik anak mereka. Kemudian pandangan tersebut berbanding terbalik dengan waktu yang terus berjalan. Pada awal abad ke-20, pendidikan barat (sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda) menjadi hal yang sangat berharga dan menjadi kunci untuk menjadi pegawai pemerintah juga melanjutkan pelajaran. Desakan untuk mendapatkan pendidikan semakin kuat. Pemerintah kolonial tidak dapat lagi mengulur-ulur perkembangan sistem pendidikan.

Gradualisme dianggap sangat menguntungkan untuk kedudukan Belanda di Indonesia. Memberlakukan pembatasan kesempatan belajar anak-anak Indonesia untuk menjaga anak Belanda selalu lebih maju. Hal tersebut didukung asumsi bahwa pendidikan yang maju dapat membahayakan pemerintah Belanda. Pendidikan yang diberikan tanpa adanya jaminan pekerjaan akan menimbulkan banyak elit intelektual yang frustrasi dan akan menjadi ancaman bagi pemerintah Belanda. Kekhawatiran

orang Belanda akan orang Indonesia yang merasa dirinya setara dengan orang Belanda dan akan menyerang bangsa kulit putih. Alasan-alasan tersebutlah yang menyebabkan perkembangan pendidikan memang disengaja berjalan dengan lambat (Nasution, 1995:20-23).

2. *Dualisme*

Dualisme telah diterapkan semenjak masa VOC menguasai Indonesia. Pemerintahan, pengadilan, dan hukum tanah mendapatkan kesenjangan antara pemerintahan kolonial dan masyarakat Bumiputera. Tindakan ini diawali motif kepraktisan dalam memperoleh kesempatan yang menguntungkan pihak Belanda. Kemudian pemerintah Belanda menerima hal ini sebagai suatu prinsip yang efektif. Dualisme menjadi salah ciri politik kolonial yang menonjol dalam sistem pendidikan Hindia Belanda. Alasannya, karena perbedaan sekolah yang didirikan dari golongan rasial dan sosial. Akibatnya, pendidikan terbagi menjadi dua jenis yaitu sekolah Barat dan sekolah pribumi. Bahasa pengantar, inspeksi, guru, kurikulum, dan biaya semuanya dibedakan.

Sekolah dengan orientasi barat dijalankan dengan bahasa Belanda kemudian sekolah pribumi dijalankan dengan bahasa Melayu atau bahasa daerah. Sekolah Belanda memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara untuk pendidikan pribumi tidak mendapatkan kesempatan untuk meneruskan pelajaran (jalan buntu). Ciri dualisme lainnya ialah anak-anak Belanda yang berasal dari golongan sosial yang tinggi dapat menempuh pendidikan di ELS/sekolah kelas Satu. Sementara untuk anak-anak Belanda yang berasal dari golongan rendah dapat bersekolah Belanda ELS tapi bukan kelas Satu. Perbedaan serupa juga dialami di pendidikan anak pribumi. Anak desa memasuki sekolah desa kemudian untuk anak yang tinggal di perkotaan missal di pusat perdagangan dan industri dapat menempuh sekolah kelas Dua.

Kat Angelino menyatakan pada bukunya berjudul politik kolonial pembedaan anggota masyarakat berdasarkan ras tidak dibenarkan. Dualisme yang terjadi berlandaskan atas kepentingan yang berbeda-beda dari beberapa kelompok penduduk

Hindia Belanda. Faktanya seperti anak dari golongan Belanda memiliki latar belakang yang berbeda dengan anak pribumi. Berdasarkan tujuan pemerintah kolonial untuk mencerdaskan turunannya, sebab itulah pendirian sekolah di bedakan tergantung golongan mananya. Namun sepertinya tidak mungkin jika dualisme tidak dipertimbangkan dari penekanan ras. Karena banyak ditemui anak-anak Indo-Belanda yang tinggal di desa dengan lingkungan orang-orang pribumi. Anak-anak ini tidak dapat berbicara bahasa Belanda karena lahir dan besar di lingkungan Pribumi. Anak-anak Indo-Belanda tidak dapat membayar sekolah, karena orang tua yang miskin, namun mendapatkan perlakuan khusus berupa kemudahan menempuh sekolah Belanda dari anak-anak golongan tinggi Indonesia yang kaya raya. Sementara untuk anak-anak Indonesia yang bukan Belanda (golongan pribumi) diwajibkan membayar biaya sekolah dengan harga yang lebih tinggi. Belanda mempertahankan status kolonial. Sehingga perbedaan antara penguasa dan masyarakat yang dikuasai sangat jelas. Kolonial Belanda dan Indonesia hidup di dunia yang berbeda (Nasution, 1995:24-26).

3. *Kontrol Sentral*

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam masalah dan persoalan pendidikan. Tidak terdapat perubahan jika tidak mendapatkan persetujuan dari gubernur jenderal atau direktur pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda berada di bawah kontrol gubernur jenderal. Gubernur jenderal juga melaksanakan pemerintahannya atas nama raja Belanda. Gubernur jenderal dilantik oleh raja dengan usul dewan menteri, terutama menteri jajahan. Gubernur jenderal eksekutif tertinggi dapat mengeluarkan peraturan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri jajahan. Posisi gubernur jenderal berada dibawah menteri jajahan.

Persetujuan tersebut sebenarnya membatasi kebebasan dan kekuasaan gubernur jenderal. Tugas Gubernur jenderal diatur oleh atasan dan harus mengawasi administrasi pusat demi keselamatan dirinya sendiri. Untuk mengajukan suatu kebijakan Gubernur jenderal dibantu Raad Van Indie (badan penasehat) yang memiliki fungsi legislatif dan eksekutif. Terdiri dari wakil ketua dan empat anggota

yang ditunjuk raja Belanda. Gubernur jenderal sebagai ketua tanpa suara biasanya jarang menghadiri rapat karena komunikasi dilakukan melalui korespondensi (surat-menyurat). Dalam kegiatan surat-menyurat, gubernur jenderal meminta pendapat Raad Van Indie. Pendapat Raad Van Indie diharuskan ada dalam keputusan persetujuan antara gubernur jenderal dengan badan ini. Biasanya keputusan gubernur jenderal selalu dinyatakan sesuai dengan nasehat Raad Van Indie.

Pelaksanaan tugas tersebut gubernur jenderal didukung oleh sekretariat umum yang mengurus korespondensi (surat-menyurat) dengan kepala kepala departemen. Gubernur jenderal dibantu sejumlah besar pegawai negeri yang terbagi menjadi beberapa departemen. Departemen agama, pendidikan, dan industri. Kepala departemen sebagai pelaksana kebijakan yang diperintahkan gubernur jenderal. Kepala departemen dilantik dan bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Pengambilan keputusan gubernur jenderal didasari oleh keterangan direktur departemen yang bersangkutan.

Semisal direktur pendidikan yang menginginkan keterangan secara rinci dari beberapa inspektur sekolah dalam mendapatkan informasi akan suatu masalah yang terjadi. Kemudian informasi tersebut akan diberikan kepada gubernur jenderal serta gambaran dan saran. Kemudian gubernur jenderal mengirim keterangan tersebut kepada dewan Hindia Belanda (Raad Van Indie) agar mendapatkan nasehat. Setelahnya persoalan tersebut diberikan pada menteri jajahan serta pendapat dan saran yang telah dikumpulkan. Menteri jajahan akan menarik kesimpulan terakhir. Prosedur berdasarkan jenjang jabatan ini harus ditempuh dengan cermat. Karena jalan untuk mendapatkan suatu persetujuan kebijakan dapat tercapat ketika direktur pendidikan menyampaikan usulannya kepada gubernur jenderal, kemudian gubernur jenderal menyampaikannya kepada menteri jajahan. Jika tidak mengikuti aturan tersebut kebijakan/usulan apapun tidak pernah akan terjadi. Sayangnya semua keputusan pendidikan hanya diputuskan oleh pegawai Belanda tanpa berdiskusi dengan orang-orang Indonesia. Sebab itu pendidikan dikontrol secara sentral, orang

tua dan guru tidak memiliki hubungan dan pengaruh dalam politik pendidikan karena semuanya telah ditentukan oleh pemerintah pusat (Nasution, 1995:26-28).

4. Keterbatasan Tujuan

Sekolah yang didirikan pemerintah Belanda pertama kali untuk anak Indonesia bertujuan untuk mendidik anak-anak aristokrasi agar menjadi pegawai pemerintah. Pemerintah kolonial membutuhkan pegawai untuk bekerja di perkebunan yang perlu dikembangkan selama masa tanam paksa. Karenanya pemerintah kolonial mendirikan pendidikan untuk orang-orang Indonesia karena kebutuhan tersebut. Tahun 1864 terdapat ujian khusus untuk menjadi pegawai rendah yang harus dilaksanakan sebagai syarat menjadi pegawai pemerintah. Pekerjaan yang awalnya dibuka untuk Indo-Belanda seperti pegawai administrasi kemudian tersedia untuk orang Indonesia.

50 tahun selanjutnya hanya ELS satu-satunya sekolah yang memberikan persiapan pendidikan untuk ujian pegawai. Ijazah merupakan hal penting untuk menjadi pegawai rendah dalam waktu yang panjang. Sekolah untuk anak-anak raja yang dimaksudkan untuk memberikan pendidikan umum kemudian direorganisasi dan diberi nama OSVIA. Perluasan pendidikan diputuskan oleh kebutuhan juru tulis dan pegawai yang kian meningkat. Pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta sangat membutuhkan pegawai administrasi dengan bayaran murah dengan ini pendidikan barat dibuka untuk orang Indonesia. Kebutuhan pegawai mengharuskan perluasan jumlah sekolah dan pengetahuan yang diajarkan. Maka perluasan vertikal sistem pendidikan diperlukan. Peluang pendidikan harus dipersempit untuk mencegah bahaya politik dan sosial potensial.

Pekerjaan menjadi pegawai pemerintah sangat dihargai pada zaman kolonial. Sebagai pegawai pemerintah otomatis menjadi pendukung otoritas kekuasaan pemerintahan Belanda. Kebanyakan orang Belanda sendiri yang dipekerjakan oleh pemerintah kolonial. Tidak banyak pekerjaan yang dibuka untuk orang Indonesia yang berpendidikan. Kewiraswastaan hampir dihanguskan oleh monopoli pemerintah kolonial Belanda. Perdagangan berada di tangan orang Cina. Kemudian gubernur

jenderal Idenburg mengusulkan di tahun 1902 untuk membangkitkan industri pribumi dengan modal pribumi juga melatih orang Indonesia untuk mengembangkan industrinya sendiri. Dalam penerapannya ternyata orang Indonesia tidak memerlukan tenaga yang terampil. Kebanyakan pekerjaan yang dilakukan di desa dilakukan secara gotong royong. Tenaga yang memiliki keterampilan khusus tidak mendapatkan tempat. Orang Cina memonopoli perekonomian di kota-kota. Untuk pabrik barat hanya memperkerjakan anak-anak Belanda lulusan teknik menengah. Alasan-alasan tersebut mengakibatkan sulitnya pekerjaan untuk orang Indonesia. Jalan keluarnya adalah mendapatkan pekerjaan di pemerintahan atau perusahaan milik barat. Sekolah dipandang sangat penting dan merupakan suatu persyaratan untuk menjadi pegawai pemerintah (Nasution, 1995:29-30).

5. *Prinsip Konkordansi*

Prinsip konkordansi memiliki tujuan agar sekolah Hindia Belanda memiliki kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda. Dimaksudkan untuk mempermudah perpindahan murid Hindia Belanda ke negeri Belanda. Tujuan awal didirikannya sekolah memang dikhususkan untuk anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Setelah orang Belanda menetap di Indonesia mereka menyadari, ternyata banyak orang Belanda kaya/pegawai pemerintah yang pindah ke negeri Belanda karena perlop atau pensiun. Hal tersebut memungkinkan adanya perpindahan murid di setiap waktu. Karenanya sekolah Belanda di Indonesia dibuat sama dengan yang ada di negeri Belanda untuk memudahkan anak yang pindah.

Inspektur memiliki tugas mengusahakan sekolah mencapai mutu yang sama dengan negeri Belanda. Sekolah rendah maupun menengah. Guru yang mengajar pun harus memiliki kualifikasi yang sama seperti di negeri Belanda. Kemudian standar sekolah tersebut berhasil dicapai di Indonesia. Anak yang bersekolah di Indonesia yang kemudian pindah ke negeri Belanda tidak menemukan kesulitan untuk memasuki universitas di negeri Belanda. Masalah mulai muncul saat makin banyak anak-anak Indonesia dan Cina yang memasuki ELS. Perjalanan prinsip ini mulai dipertanyakan karena kenyataannya 90% dari anak-anak ELS tidak pergi ke negeri

Belanda. Kurikulum yang diberikan ELS tidak memiliki fleksibilitas dengan keadaan Indonesia. ELS berorientasi pada Belanda dan terpusat pada kondisi Belanda. Keadaan Indonesia diabaikan, bahasa Melayu bahasa populer Indonesia tidak masuk dalam bagian dalam kurikulumnya. Namun bahasa Perancis yang tidak memiliki fungsi untuk masyarakat Indonesia dianggap mata pelajaran yang penting (Nasution, 1995:31-32).

6. *Tidak Adanya Perencanaan Pendidikan yang Sistematis*

Kisaran tahun 1910 ditemui berbagai macam sekolah rendah untuk anak-anak Indonesia. Sekolah desa anak-anak yang tinggal di pedesaan, sekolah kelas Dua untuk anak orang biasa yang tinggal di kota-kota, sekolah kelas Satu untuk anak-anak ningrat dan anak golongan kaya, sekolah khusus untuk anak dari golongan militer, sekolah golongan aristokrasi di Sumatera, sekolah untuk pendidikan pegawai dan dokter di Jawa. Sekolah-sekolah tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya hubungan organisasi yang menggabungkan satu dengan lainnya. Sekolah-sekolah tersebut juga tidak memiliki jalan untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

Sekolah pegawai hanya dapat dimasuki melalui ELS. Sedangkan untuk anak-anak Belanda sejak 1860 sistem pendidikan memiliki organisasi lengkap yang sama di negeri Belanda dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka di universitas melalui sekolah rendah dan menengah yang saling terkait. Hal tersebut sangat merugikan untuk anak-anak pribumi. Karena tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan tidak dapat mendapatkan pekerjaan sesuai minat dan kemauan mereka. Tidak adanya organisasi yang menghubungkan antar sekolah untuk anak pribumi disadari setelah tahun 1910. Gubernur jenderal Idenburg kemudian mengajukan surat kepada menteri jajahan mengenai rencananya untuk menyatukan sekolah agar menjadi satu kesatuan (Nasution, 1995:32-33).

4.3 Pendidikan Dasar yang Beragam masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pendidikan Dasar masa pemerintahan kolonial Belanda mengalami beberapa pergeseran tujuan. Awal mula pendidikan dasar adalah pengaruh Portugis yang ingin menyebarkan agama Katholik kemudian Belanda merebut kedudukannya. Kedudukan Belanda ingin menghapus segala pengaruh portugis seperti agama Katholik dan menggantikannya dengan Kristen Protestan. Kemudian pendidikan dasar bertujuan penyebaran Kristen Protestan dan pencetak pegawai terdidik dengan upah murah, karena tujuan utama Belanda di Indonesia adalah eksploitasi. Datang masa liberal yang menuntut adanya pendidikan dasar yang lebih layak untuk anak-anak pribumi.

Selain untuk mencetak pegawai terdidik, pendidikan telah di sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang tinggal di Indonesia. Seperti anak-anak turunan Belanda yang sama sekali tidak bisa berbahasa Belanda dan penduduk pribumi yang buta huruf. Keadaan tersebut juga di sesuaikan dengan kondisi politik kolonial pemerintahan Belanda. Agar tidak membahayakan kedudukannya di Indonesia. Oleh karena itu fungsi dan tujuannya menjadikan sekolah dasar menjadi beragam jenisnya. Meskipun sekolah dasar terbagi bermacam-macam tujuannya sama. Mata pelajaran yang dipelajari disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Seperti penjelasan yang dapat membantu kehidupan sehari-hari seperti tingkah laku, kesehatan, binatang, tumbuhan, fenomena alam, dan lain-lain. Pendidikan dasar dalam penerapannya dibagi menjadi 2 kelompok, yakni sekolah berbahasa pengantar pribumi dan sekolah berbahasa pengantar Belanda (Stroomberg, 2018:81).

4.3.1 Pendidikan Dasar Pribumi masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pendidikan dasar pribumi adalah pendidikan dasar yang bahasa pengantar pendidikannya menggunakan bahasa melayu atau bahasa daerah. Pendidikan pribumi biasanya terdapat di desa-desa dengan murid asli Bumiputera. Pemerintah Belanda melihat pendidikan sebagai sarana yang paling tepat untuk mencapai kemerdekaan ekonomi dan politiknya. Tujuan utama mereka adalah untuk mendidik para elit, berdasarkan gagasan asosiasi. Ide pergaulan ini berarti bahwa kelas atas penduduk

harus benar-benar mengenal budaya Belanda, tanpa kehilangan budaya mereka sendiri. Tetapi karena hampir seluruh penduduk buta huruf pada awal abad ke-20, pemerintah juga melihat kebutuhan untuk mendirikan berbagai sekolah rakyat, di mana keterampilan dasar diajarkan kepada anak-anak. Kurikulum yang diajarkan sederhana yakni membaca, menulis dan berhitung (Laloli, 2001:8).

Pendidikan di Indonesia mengalami perluasan. Pendidikan tidak terbatas pada bangsa Belanda saja namun telah dibuka untuk orang-orang Bumiputera. *Fransen Van der Putte* seorang tokoh liberal yang mengenalkan pendidikan liberal di Indonesia. Pendapatnya, pendidikan Bumiputera harus ada dan diperluas dan tidak dibatasi pada usaha mempersiapkan calon pegawai pemerintah saja namun seperti di Netherland sekolah juga ditujukan untuk memajukan penduduk. Tujuan utama pemerintah kolonial memberikan pendidikan adalah untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik dengan biaya yang murah. Anggapan mereka akan memakan biaya yang besar jika mereka membawa bekerja dari Netherland.

Van den Bosch gubernur jenderal masa 1827-1834 merasakan jika penduduk Bumiputera terdidik tidak membantu pembangunan ekonomi Hindia Belanda tidak akan berhasil. Kemudian pendidikan dilaksanakan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dibangun sekolah-sekolah Bumiputera yang didirikan pemerintah kolonial di pulau Jawa. Sekolah ini diurus oleh rakyat, dibebankan kepada rakyat dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah kolonial Belanda. Karena kemandirian sekolah ini Bupati turut memperhatikan. Beberapa sekolah bangunannya berupa gubuk yang disusun dari dahan-dahan kulit kayu. Pembelajarannya disesuaikan dengan persyaratan untuk mendidik calon-calon pegawai dan penguasaan bahasa Melayu. Mata pelajarannya terkait mengukur tanah karena sekolah ini dihubungkan dengan pelaksanaan tanam paksa dan mendidik calon pegawai (Makmur, 1993:63-64). Berikut sekolah-sekolah khusus pribumi dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pendidikan:

- a. Sekolah dasar kelas Satu (*De School der Eerste klasse*) merupakan sekolah yang berdiri di ibukota karesidenan, ke bupatian, kewedanan, dan kota pusat

perdagangan kerajinan atau tempat yang perlu didirikan sekolah. Penerimaan murid sekolah ini adalah anak-anak golongan atas seperti anak bangsawan, tokoh terkemuka, dan anak Bumiputera yang dihormati. Tujuan diadakannya sekolah ini adalah memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan, dan perusahaan dengan lama belajar 3 tahun bahasa pengantar bahasa Melayu dan bahasa daerah yang lambat laun kebijakannya diganti menjadi bahasa Belanda.

- b. Sekolah dasar kelas Dua (De Schoolen der Tweede klasse) sekolah ini biasanya didirikan di distrik distrik atau kewedanan dan biasa disebut sekolah distrik. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah kebutuhan memenuhi pendidikan masyarakat umum. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak pribumi untuk mencetak pegawai rendah dengan lama belajar 5 tahun. Perbedaan dengan sekolah kelas Satu dengan sekolah kelas Dua adalah lokasi penempatan sekolah, latar belakang murid yang akan menjadi pelajar, biaya sekolah, guru, kurikulum, lama belajar (Makmur, 1993:66). Sekolah Bumiputera (Inlandsche School) Klas Dua, sekolah ini tergolong sekolah kelas 2 dengan lama belajar 5 tahun yang disediakan untuk anak pribumi golongan menengah.
- c. Sekolah desa atau sekolah rakyat (Volksschool) merupakan sekolah desa yang didirikan tahun 1907. Gubernur jenderal Van Heutz menyelenggarakan sekolah ini di desa untuk membantu mengembangkan desa itu sendiri. Seperti menghasilkan petani dan kaum buruh yang terpelajar.
- d. Sekolah lanjutan (Vervolgschool) merupakan sekolah yang dibuka di tahun 1914. Sekolah ini adalah sekolah lanjutan dari sekolah desa jangan lama belajar 3 tahun yang khusus disediakan untuk murid lulusan sekolah desa yang berprestasi baik.
- e. Sekolah peralihan (Schakelschool) sekolah ini disebut sebagai sekolah peralihan karena memang benar sekolah ini peralihan dari sekolah desa 3 tahun(Volksschool) dengan bahasa pengantar bahasa daerah dengan lama sekolah 5 tahun (Makmur, 1993:78-79).

Peta alur sekolah dasar pribumi dapat dilihat di lampiran

4.3.2 Pendidikan Dasar Non-Pribumi (Barat) masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pendidikan barat merupakan sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Sekitar tahun 1900 pemerintah Belanda membutuhkan banyak pegawai rendahan di kantor-kantor pemerintah dan tenaga teknis terlatih. Sekolah-sekolah didirikan dengan tujuan mendidik calon Biasanya yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Pada periode 1901-1920, sejumlah sekolah perdagangan dan sekolah teknik (TS) didirikan oleh pemerintah kolonial. Sekolah Teknik, yang didirikan pada tahun 1901, adalah sekolah-sekolah Eropa, yang berbahasa Belanda dan wajib mengikuti pendidikan sekolah dasar berbahasa Belanda (Laloli, 2001:8). Pendidikan sekolah dasar menjadi syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Pemerintahan kolonial membagi dalam 3 tipe sekolah dasar berbeda, yakni sekolah Eropa, Sekolah Belanda-Cina, dan sekolah Bahasa Belanda (Stroomberg, 2018:83).

a. Sekolah Eropa/ ELS (*Europeesche Lagere School*)

Tahun 1816 pendidikan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Kegiatan fokus tersebut hanya diperuntukkan untuk anak-anak berdarah Belanda. Pemerintah kolonial bermaksud memberikan pengajaran dasar kepada anak-anak berdarah Belanda yang tidak mampu berbahasa Belanda. Karena lahir dan tinggal di kampung di tengah-tengah orang pribumi yang menggunakan bahasa daerah. Secara ekonomis pun anak-anak tersebut keadaannya sama seperti penduduk biasa. Karenanya pemerintah kolonial mendirikan sekolah Belanda untuk anak Belanda miskin. Meski sekolah tersebut ditujukan untuk anak Belanda miskin, dalam penerapannya sekolah tersebut sama dengan sekolah di negeri Belanda. Peraturan yang digunakan sama dan diajarkan oleh guru-guru berkualifikasi Belanda.

Sekolah Belanda tersebut diberi nama *Europese Lagere School* (ELS) sekolah yang sengaja dibangun dengan standar yang sama dengan Nederland. Selama sekolah ini ada prinsip konkordasi mendominasi. Sekolah bertujuan utama untuk mengembangkan dan memperkuat kesadaran nasional di kalangan anak-anak turunan

Belanda yang kebanyakan berdarah Indo-Belanda. Termasuk anak-anak yang lahir dari hubungan yang tak legal. Hanya sedikit murid yang dapat berbahasa Belanda di tahun 1870.

Sekolah yang ada di negeri Belanda menjadi standar bagi sekolah rendah maupun menengah di Indonesia bahkan kurikulum dan buku pelajarannya sama untuk mencapai mutu dan kualitas yang sama. Namun prinsip konkoordinasi ini harus terancam karena banyak anak Indonesia dan Cina yang masuk sekolah ini. Penerimaan peserta didik baru dari kedua golongan ini menjadi masalah yang tak ada ujungnya. Kenyataannya anak-anak Indonesia diterima di sekolah ini menjadikan ELS faktor penting dalam perkembangan pendidikan anak-anak Indonesia (Nasution, 1995:90-91). Perkembangan pesat pada pendidikan di Indonesia. Jumlah sekolah dan murid kian bertambah. Peningkatan jumlah tersebut membuat pemerintahan kolonial Belanda memperbarui beberapa kebijakan dalam pendidikan di Hindia Belanda (Gunawan, 1986:14).

b. Sekolah Belanda-Cina/HCS (Hollandsche Chineesche School)

Tiga abad setelah Belanda tiba di Indonesia mereka tidak mencampuri pendidikan orang Cina dan tidak mau memberikan bantuan finansial meski orang Cina membayar pajak dengan baik. Kemenangan Jepang dengan Rusia membangun Asia dengan gerakan cina muda. Nasionalisme dan kebesaran negara mulai memenuhi pemikiran orang Cina yang tinggal di Indonesia. Terdapat perkumpulan orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia bernama *Tung Hoa Huee Kuan* (THHK) di tahun 1900 yang didirikan di gedung pertemuan dalam misi menyebarkan kebudayaan, kebiasaan, dan moral Cina menurut ajaran *Kong Fu Tse*. Kemudian perhatian mereka teralihkan pada pendidikan dengan pendirian sekolah.

Sekolah yang didirikan perkumpulan THHK awalnya berbahasa Belanda. Ternyata orang Belanda kurang suka jika bahasanya digunakan oleh orang bukan Belanda. Karena sulit untuk memasuki ELS untuk orang Cina, akhirnya THHK menggaji guru Belanda dengan biaya yang tinggi dan meminta bantuan pemerintah Hindia Belanda. Permintaan itu ditolak pemerintah kolonial. Kemudian THHK

meminta bantuan dari Cina dan mengganti guru dengan guru Inggris. Demikian bahasa Belanda dihapus dari kurikulum sekolah THHK (Nasution, 1995:107). Orang Cina memiliki peluang akan pentingnya bahasa Inggris. Karena mereka menyadari di luar Indonesia seperti semenanjung Malaya, Filipina, Hongkong, India, bahkan Jepang terbuka bagi orang yang dapat menguasai bahasa Inggris. Orang Inggris sendiri dengan senang hati bersedia mengajarkan bahasa mereka.

Makin banyak orang Cina mengirim anaknya ke Raffles institute di Singapura. Kaisar Cina menunjukkan perhatian dalam perkembangan pendidikan di daerah jajahan Belanda. Kaisar juga menyadari bahwa pendidikan dapat mencapai hubungan erat antara orang Cina perantauan dengan tanah leluhurnya. Sekolah THHK menjadi suatu bagian dari sistem pendidikan negara Cina. Tahun 1906 terdapat 76 sekolah dasar dengan 6.393 murid dan sekolah menengah di bawah naungan kementerian Pendidikan di Peking yang merupakan lembaga resmi. Pemuda Cina menjalani latihan militer dan sipil di Tiongkok.

Kaisar Cina juga merencanakan pembangunan universitas untuk pelajar dari Indonesia di Peking. Sebagai konsekuensi kebangkitan Nasional bahasa Cina menjadi pusat pendidikan. Pendidikan bersifat nasionalistik di sekolah THHK dengan pengajaran bahasa Cina dan Inggris. Pelajaran bahasa Belanda dikesampingkan. Orang Cina memandang rendah bahasa dan kebudayaan Belanda dan memiliki sifat anti Belanda. Hal tersebut menjadi kekhawatiran dan ancaman terhadap supremasi kultural yang mungkin menyangkut politik Belanda.

Pandangan masyarakat Cina mengingatkan pemerintah Belanda untuk meninggalkan politik non-intervensi dalam pendidikan anak Cina. Kemudian pemerintahan kolonial mendirikan sekolah Hollands Chinese School (HCS) di tahun 1908 (Nasution, 1995:108). HCS resmi di buka pada 1 mei 1908 (Syaharuddin & Susanto, 2019:41). Bertujuan agar bahasa Belanda dapat mengalahkan keinginan mempelajari lebih dalam bahasa dan kebudayaan Cina. Kurikulum HCS disamakan dengan ELS agar anak-anak Cina mendapatkan pendidikan Belanda yang murni (Nasution, 1995:108).

c. Sekolah Bahasa Belanda untuk Bumiputera HIS (Hollandsche Inlandsche School)

Pendirian HIS dilatarbelakangi oleh keinginan kuat kalangan orang Indonesia dalam meraih pendidikan barat. Keinginan untuk mengadakan pendidikan umum yang modern dan populer (Stroomberg, 2018:79). Keinginan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan sosial politik di timur jauh. Budi Utomo meminta dilonggarkannya peraturan masuk ke ELS untuk anak Indonesia. Karena ELS hanya satu-satunya pendidikan yang dapat menempuh ujian pegawai rendah dan melanjutkan di OSVIA, STOVIA, dan NIAS. Menghindari invasi, pemerintahan kolonial membiarkan anak Indonesia mempelajari bahasa Belanda yang diterapkan pada tiga kelas tertinggi sekolah kelas Satu (Nasution, 1995:113).

HIS (*Hollands-Inlandse School*) didirikan tanggal 16 Februari 1914 (Syaharuddin & Susanto, 2019:41). HIS merupakan pembaharuan dari sekolah Kelas Satu. Pendirian HIS memberikan peluang besar kepada murid-murid dalam melanjutkan pendidikan juga mempersiapkan diri memasuki pendidikan kolonial. Sekolah Kelas Satu diperbarui menjadi HIS karena tidak memiliki syarat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. HIS memiliki tujuan *standenschool* yang berarti sekolah berdasarkan status. Keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan calon siswa ditimbang apakah dapat memasuki sekolah ini. Namun dalam prakteknya HIS di tahun 1912-1927 terdapat banyak murid yang berasal dari golongan mengengah bawah. HIS membuka jalan untuk mobilitas sosial dan telah dibuka kesempatan bagi golongan berpenghasilan rendah (Depdikbud, 1998:74-75).

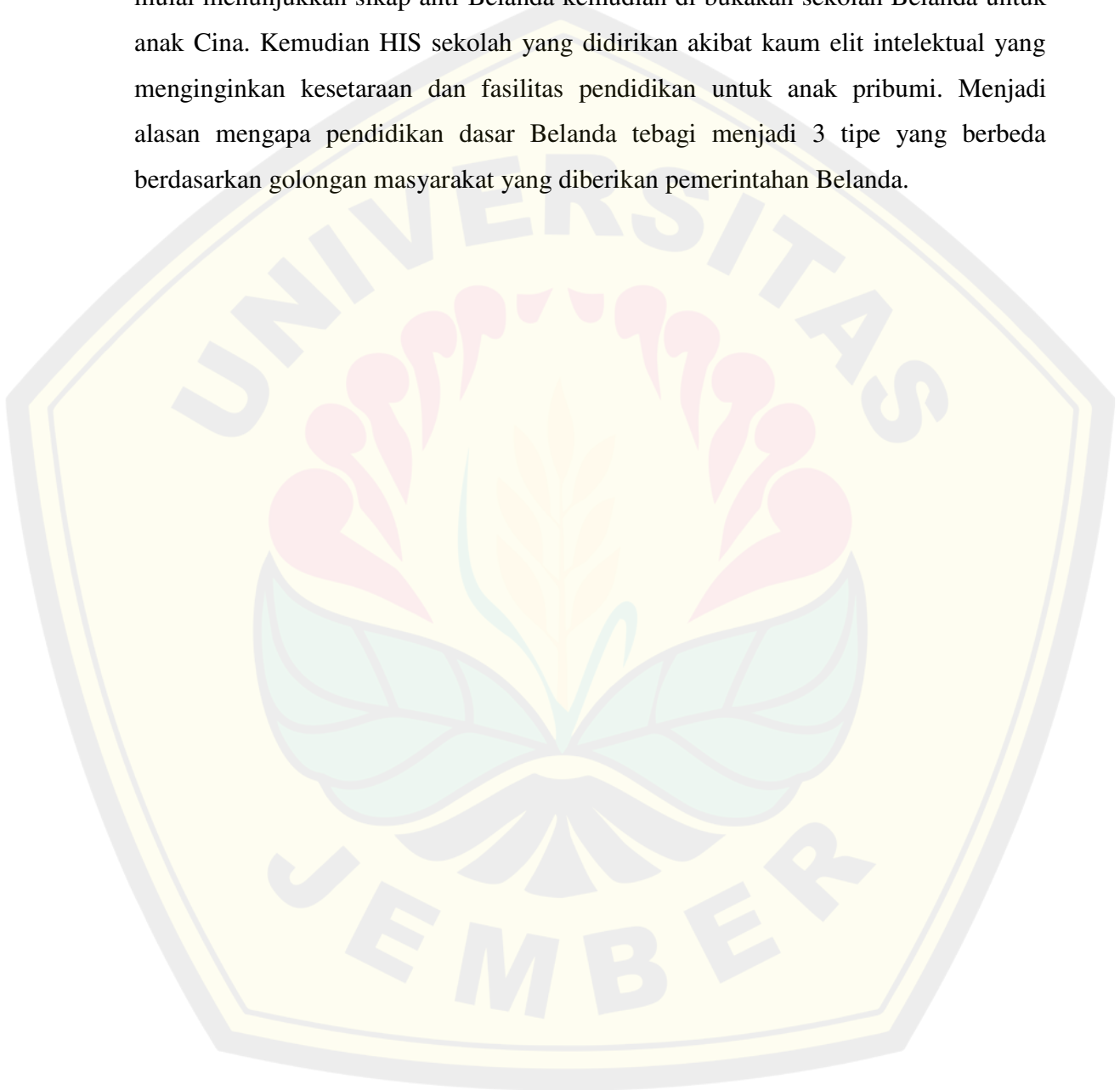
Masa belajar juga diperpanjang menjadi 7 tahun di tahun 1911. Namun rupanya sekolah ini belum mumpuni dan dipercaya di kalangan masyarakat. Karenanya banyak orang tua masih terus mengirimkan anaknya ke ELS setelah pendirian HCS tidak dapat dihentikan lagi bahwa terdapat kelahiran HIS. Pemerintah Belanda ada yang mengajukan keberatan terhadap didirikannya HIS. Sekolah ini dianggap menimbulkan problem pengangguran di kalangan elit intelektual yang tidak dapat dipekerjakan pemerintahan dan perusahaan swasta. Pembiayaan yang besar juga menjadi keberatan atas penyelenggaraan sekolah sehingga biaya untuk

mengurangi buta huruf diperkecil. Ada pula yang merasa takut jika kelompok nasionalis Indonesia yang terdidik akan menganggap diri mereka setara dengan orang Belanda.

Sekolah kelas Satu tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak dapat meneruskan pelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian terdapat ide untuk menghubungkan dengan MULO agar terjadi interaksi antara pendidikan pribumi dengan pendidikan barat. Namun kurikulumnya harus diperluas sejumlah mata pelajaran. Sekolah kelas Satu sesungguhnya telah menjadi HIS dan nama Holland inlander school secara resmi diberikan di tahun 1914 (Nasution, 1995:113-114). Pemerintah kolonial dengan tujuan politiknya menerapkan kebijakan dalam sistem pendidikan. Kebijakan tersebut berupa upayah untuk mendekati masyarakat Indonesia lapisan atas dengan kebudayaan Belanda. Anak-anak Indonesia dari kalangan lapisan atas sengaja untuk dididik menjadi pegawai dengan sekolah berpengaruh budaya barat (Depdikbud, 1984:39).

Pembagian Pendidikan barat dibagi menjadi 3 tipe sekolah dasar yang berbeda (Stroomberg, 2018:83) tersebut dijalankan berdasarkan keadaan. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* 1 Januari 1926 mengatakan bahwa rakyat Indonesia dibedakan menjadi tiga golongan yang diterapkan dalam pendirian pendidikan dasar Belanda yakni: orang Eropa, Bumiputera, orang timur asing. Golongan Eropa yang dimaksud adalah semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain, yang negerinya tunduk kepada hukum kekeluargaan yang memiliki asas yang sama dengan hukum Belanda, anak sah atau anak yang diakui menurut undang-undang dan keturunan orang Belanda, Eropa, Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain yang memiliki hukum dan asas yang sama dengan Belanda. Bumiputera adalah semua orang termasuk rakyat Indonesia asli dari "Hindia Belanda" yang tidak beralih kepada golongan rakyat lainnya dari mereka yang awalnya termasuk golongan rakyat lain kemudian mencampurkan diri dengan rakyat Indonesia asli. Orang timur asing adalah semua orang yang bukan Eropa atau Bumiputera (Mudyahardjo, 2006:257-259).

Pendirian ELS yang memang merupakan tujuan pemerintahan kolonial dalam mencerdaskan dan membangun rasa nasionalisme Belanda rasnya. Perkembangan ELS tidak dapat dijauhkan dari masuknya anak-anak pribumi dan timur asing di ELS. Keadaan yang tidak dapat di sesuaikan anak non-Belanda mengharuskan pemerintah kolonial membangun sekolah lain. HCS yang didirikan akibat masyarakat cina yang mulai menunjukkan sikap anti-Belanda kemudian di bukakan sekolah Belanda untuk anak Cina. Kemudian HIS sekolah yang didirikan akibat kaum elit intelektual yang menginginkan kesetaraan dan fasilitas pendidikan untuk anak pribumi. Menjadi alasan mengapa pendidikan dasar Belanda terbagi menjadi 3 tipe yang berbeda berdasarkan golongan masyarakat yang diberikan pemerintahan Belanda.



BAB 5. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DASAR YANG BERAGAM MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA TAHUN 1900-1920

Pemerintahan kolonial Belanda menyelenggarakan pendidikan di Indonesia didasari oleh kebutuhan politik ekonominya. Untuk membantu melancarkan kepentingan politik ekonominya pendidikan dasar yang dijalankan dengan menggunakan kebijakan Belanda. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar menciptakan pendidikan yang tertib dan disiplin. Diharapkan pendidikan dengan kebijakan akan mendidik anak-anak Hindia-Belanda untuk mengembangkan mental dan moralnya. Kebutuhan tersebut sama halnya seperti kebutuhan membaca dan menulis. Hal tersebut memang seharusnya diperoleh dari sekolah sesuai dengan kebijakan Kristen. Namun, dalam penerapan pendidikan Hindia-Belanda hanya condong pada satu sisi. Pendidikan negeri dan pendidikan swasta, pendidikan dasar dan menengah, orang Belanda dan orang Pribumi mendapatkan perilaku yang berbeda (Wiessing, 1901:35).

Pendidikan pemerintahan kolonial Belanda 10 tahun sebelum politik etis memiliki kebijakan pendidikan yang sederhana. Dengan hanya 3 jenis sekolah saja, sekolah pribumi kelas Satu, sekolah pribumi kelas Dua, dan sekolah dasae Eropa. Mekanisme kompleks tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Hindia-Belanda yang beraneka ragam. Kemudian di waktu yang relatif singkat, sekolah-sekolah berikutnya didirikan, seperti sekolah desa (1907), HCS (1908), HIS (1914), MULO(1914), dan sekolah lanjutan (1914). Pendidikan dasar dirasa cukup di selenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian mulai dikembangkan pendidikan umum menengah, menengah, pendidikan kejuruan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Sekolah untuk pendidikan pribumi (sekolah desa, sekolah kelas Dua pribumi, sekolah menengah) menggunakan bahasa pengantar bahasa pribumi. Kemudian sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai media pengajaran adalah Europese Lagere School (ELS), Hollandsch Chineesche School (HCS), Hollandsch Inlandsche School (HIS). Sekolah-sekolah menggunakan pengajaran barat ini biasa di

sebut pendidikan dasar Barat (Brugmans, 1938:335) yang dijelaskan lebih rinci dibawah ini:

5.1 Pelaksanaan Pendidikan Dasar Pribumi masa Pemerintahan Kolonial Belanda

5.1.1 Sekolah Dasar Kelas Satu (De School der Eerste klasse)

Sekolah Kelas Satu mulai dilaksanakan di tahun 1894 dengan hasil rombakan dari sekolah rendah. Sekolah Kelas Satu merupakan sekolah yang terbaik yang tersedia untuk anak-anak Indonesia. Sayangnya sekolah ini hanya terdapat di kota-kota penting di pulau Jawa, seperti kota pusat perdagangan, pemerintahan, dan lalu lintas. Bisa dibayangkan pulau-pulau di luar Jawa di anak tirikan karena tidak ada Sekolah Kelas Satu. Sekolah Kelas Satu pertama di luar pulau Jawa didirikan di tahun 1908 dan saat itu telah tersedia 60 sekolah di pulau Jawa. Kemudian jumlah sekolah bertambah menjadi 12 di tahun 1914 dan saat itu pulau Jawa memiliki 83 sekolah yang serupa. Keadaan tersebut mengakibatkan rasa tidak puas di kalangan penduduk luar Jawa yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan barat.

Sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda dianggap sekolah yang baik dan didambakan semua orang. Surat dari Tapanuli dan Kalimantan menyatakan keinginannya dalam bersekolah karena khawatir tertinggal dari anak-anak Jawa dan anak Cina. Colijn memandang bahaya Sekolah Kelas Satu yang meluas dengan cepat. Sekolah berkualitas dan mahal ini akan melahirkan prolektariat intelektual yang frustrasi jika tidak mendapatkan pekerjaan dalam masyarakat. Menurutny sebagai penasihat pemerintah, 3 hingga 5 Sekolah Kelas Satu saja sudah dapat untuk pendidikan pulau Sumatera. Dengan adanya sekolah tersebut tidak diperlukan lagi sekolah untuk anak-anak raja (Nasution, 1995:50).

a. Kurikulum Sekolah Dasar Kelas Satu

Kurikulum sekolah sesuai dengan peraturan pada tahun 1893. Yakni mata pelajaran hanya memuat menulis dan membaca yang dipelajari menggunakan bahasa daerah dengan huruf daerah dan latin, menulis dan membaca menggunakan bahasa

Melayu, berhitung, menggambar, ilmu alam, ilmu bumi Indonesia, sejarah pulau tempat tinggal, mengukur tanah. Program sekolah lebih terperinci terdapat pelajaran agama dan industri. Karena sekolah ini berbahasa daerah diberikan 7 macam program yaitu: bahasa Melayu Riau, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Mandailing, bahasa Makassar, dan bahasa Bugis. Kelas 1 dan 2 mendapatkan 18 jam pelajaran dalam seminggu, kelas 3 sampai 5 mendapatkan jam pelajaran 27 jam. Pelajaran di kelas 1 hingga kelas 3 diberikan pelajaran bahasa daerah masing-masing. Kemudian bahasa Melayu mulai dipelajari di kelas 4. Sedangkan pengajaran huruf latin diajarkan mulai dari kelas 2. Lama pelajaran diperpanjang dari 3 menjadi 5 kelas.

Sekolah dibagi dalam 5 kelas sekolah dengan satu ruangan tidak digunakan lagi. Sayangnya sekolah ini tidak populer di kalangan priyayi. Karena dalam kurikulumnya tidak memberikan pelajaran bahasa Belanda dan tidak membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. ELS masih menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Maka tidak dipungkiri banyak orang tua anak Indonesia yang memasukkan anaknya ke ELS. Akibat efek politik etis peraturan masuk ELS diperlunak. Sehingga terjadi lonjakan permintaan anak Indonesia yang masuk ELS. Karena lonjakan tersebut maka bahasa Belanda dimasukkan dalam program sekolah kelas 1 dan lama belajar diperpanjang menjadi 6 tahun di tahun 1907.

Perubahan yang berjalan sesuai waktu mengakibatkan langkanya guru Belanda. Guru-guru Belanda tidak tertarik bekerja untuk mengajar anak-anak Indonesia meski telah diberi gaji tambahan. Gedung sekolah dan fasilitas yang kurang memadai jika dibandingkan dengan ELS sangat jauh. Dan guru-guru ini tidak ingin bekerja di bawah pemimpin kepala sekolah yang berbangsa Indonesia. Meski bahasa Belanda telah dijadikan mata pelajaran namun sekolah ini tidak populer seperti yang diharapkan. Sekolah ini menjadi sekolah terminal tanpa kesempatan melanjutkan pelajaran. Bahkan sekolah ini tidak dapat memberikan pelatihan yang cukup untuk menempuh ujian pegawai rendah (Nasution, 1995:52-54).

Tabel 5.1 Jumlah Sekolah Kelas Satu

TAHUN	JAWA	LUAR JAWA
1899	27	-
1904	47	-
1907	50	-
1909	60	-
1910	67	1
1911	73	4
1912	77	9
1914	83	12

b. Guru Sekolah Dasar Kelas Satu

Reorganisasi 1892 tidak berjalan dengan cepat untuk perubahan radikal dalam pendidikan guru. Banyak anak-anak yang memasuki sekolah kelas Dua setelah itu baru masuk Sekolah Kelas Satu. Staff dan guru memiliki kualifikasi yang sama. Kedua sekolah tersebut memiliki perbedaan yakni sekolah kelas satu terdapat penambahan mata pelajaran bahasa Belanda. Sekolah kelas Dua menjadi kurang daripada Sekolah Kelas Satu dari segi kurikulum dan lama studi dan juga staf. Bertambahnya sekolah kelas rendah lambat laun mulai mempengaruhi sekolah guru. Hubungan tersebut berlangsung hingga tahun 1892. Sekolah dasar untuk anak golongan rendah kurikulumnya ditentukan oleh sekolah guru. Penentuan tersebut tidak terkecuali mata pelajaran yang diajarkan. Seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah guru kecuali ilmu mendidik diajarkan semuanya di sekolah rendah.

Penambahan mata pelajaran bahasa Belanda mengakibatkan pemerintah memasukkan bahasa Belanda ke dalam program sekolah guru. Umumnya orang-orang yang telah lulus dari sekolah guru, kebanyakan menduduki jabatan kepala Sekolah Kelas Satu atau sekolah kelas Dua. Kemudian setelah tahun 1900, jumlah sekolah kelas Satu dan Dua terus bertambah jumlahnya. Banyaknya sekolah tidak

memungkinkan pengangkatan jabatan kepala sekolah karena jumlah murid yang lulus sekolah guru tidak dapat mencukupi. Keadaan tersebut mengharuskan perekrutan kepala sekolah tanpa melihat latar belakangnya dengan serius. Untuk menghindari keadaan kepala sekolah yang kurang kompeten, pemerintah Belanda membuka kursus-kursus diperuntukkan untuk mendidik calon guru untuk sekolah kelas satu dan dua. Pada tahun 1909 kursus tersebut dibuka dan ditempuh selama 2 tahun. Pendidikan berjalan setiap sore hari karena paginya calon guru-guru ini harus bekerja sebagai guru bantu. Namun rupanya hal ini tidak berjalan sesuai rencana. Karena guru-guru cenderung lelah akibat aktivitas menjadi guru yang melelahkan ditambah lagi harus mempersiapkan pelajaran di malam hari sehingga tidak ada waktu untuk belajar (Nasution, 1995:56-57).

c. Buku Pelajaran Sekolah Dasar Kelas Satu

Buku sekolah kelas 2 masih digunakan. Penambahan mata pelajaran Belanda jelas membutuhkan buku-buku baru. Metode mengikuti negeri Belanda. Belajar membaca dilakukan mengikuti metode huruf yang mengkombinasikan huruf-huruf membentuk suku kata, kata, dan kemudian kalimat. Buku populer masa itu adalah buku berbahasa Melayu yang berjudul rempah-rempah kalangan Grivel. Untuk pelajaran menghitung menggunakan buku hitungan karangan Wisselink, satu cirit untuk setiap kelas menggunakan titik-titik segitiga segi empat untuk memberi pengertian bilangan (Nasution, 1995:55).

5.1.2 Sekolah Dasar Kelas Dua (De School der Tweede klasse)

Sekolah Kelas Dua didirikan dengan tujuan mengelompokkan masyarakat golongan rendah atau sekolah rakyat. Pendidikan yang diajarkan merupakan pendidikan sederhana yang dapat ditempuh untuk seluruh rakyat pribumi. Sayangnya Sekolah Kelas Dua tidak memiliki popularitas dikalangan masyarakat pribumi. Sekolah ini tidak berkembang menjadi sekolah umum untuk seluruh masyarakat, bahkan masyarakat mempertanyakan kesesuaian pendidikan yang diajarkan. Kemudian pendapat tersebut berubah karena perkembangan sekolah yang tidak

terduga. Sekolah yang ditetapkan dengan lama belajar 3 tahun ini memiliki kemungkinan untuk diperluas programnya berdasarkan rekomendasi komisi sekolah dan persetujuan inspektur. Karenanya perluasan program tersebutlah menjadikan sekolah kelas dua ini hampir tidak memiliki perbedaan dengan sekolah kelas satu. Pemerintah tidak perlu memikul finansial dan sosial politik sejenis karena sekolah bersifat umum untuk seluruh rakyat. Pemerintah menginginkan pengeluaran yang sedikit.

Sekolah kelas dua adalah sekolah dengan peminat yang rendah dikalangan penduduk Indonesia. 4% anak-anak mendapatkan tempat di sekolah. Sayangnya hampir setiap tahun banyak murid yang ditolak sekolah dengan alasan tidak adanya tempat duduk lagi. Dengan alasan finansial dan politik sosial pemerintah Belanda tidak berniat untuk meluaskan sekolah ini. Pada tahun 1927 sekolah kelas dua menjadi pengganti sekolah *Vervolgschool* yang merupakan sekolah lanjutan pendidikan untuk lulusan sekolah desa dengan lama belajar 2 tahun. Biasanya lulusan Sekolah desa melanjutkan pendidikannya ke sekolah lanjutan (*Vervolgschool*). Sekolah lanjutan memiliki program pendidikan setara dengan sekolah kelas Dua. Sistem yang dinilai lebih hemat biaya dan membuka kesempatan untuk anak desa melanjutkan pelajarannya. Kemudian batas sekolah desa dan sekolah sambungan lambat laun lenyap. Antara kedua sekolah tersebut tidak ada hubungan yang terjalin lagi dan sekolah desa bebas dari isolasi (Nasution, 1995:61-63).

a. Kurikulum Sekolah Dasar Kelas Dua

Statuta 1983 menjelaskan program Sekolah Kelas Dua terdiri dari mata pelajaran berhitung, membaca, dan menulis dalam bahasa melayu. Pengajaran agama dilarang di pelajari. Meskipun fasilitas memadai, seperti ruang kelas yang dapat digunakan dan pelajaran agama dapat dilaksanakan di luar jam sekolah. Kurikulum berjalan sederhana karena diperuntukkan untuk rakyat. Namun kemungkinan kurikulum dapat disesuaikan lagi sesuai keadaan sekolah, dengan tanda kutip persetujuan inspektur harus didapatkan dan pelajaran bahasa Belanda tidak di ajarkan. Perkembangan mata pelajaran lainnya menyamakan dengan Sekolah Kelas Satu.

Kemudian tahun 1895 diterbitkan peraturan baru yang berisi, program sekolah Kelas Dua disamakan dengan program sekolah Kelas Satu antara kelas 1-3. Lamanya menempuh pendidikan juga dihilangkan dengan menambahkan 4 bahkan kelas 5 pada sekolah kelas Dua. Hal tersebut dimaksudkan murid-murid sekolah kelas Dua dapat mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah pendidikan guru (Kweekschool).

Pelajaran menggambar diajarkan tahun 1892. Di kelas 3 sekolah kelas dua ini pelajaran bernanyi diajarkan namun dihapus tahun 1912 karena alasan fungsinya. Ilmu bumi diberikan di kelas 3 mulai dari lingkungan sekolah kemudian daerah geografis yang lebih luas tanpa melewati batas Indonesia. Mata pelajaran di perluas dengan pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yakni, pelajaran ilmu alam, tanaman, binatang, dan tubuh manusia yang dipelajari di kelas 4 dan 5. Kurikulum tahun 1892 dan kurikulum tahun 1918 tidak melibatkan mata pelajaran pendidikan jasmani dan ketrampilan/pekerjaan tangan. Tahun 1918 disediakan biaya sebanyak f 20.000,- untuk pendidikan jasmani di Kweekschool agar kemudian dilaksanakan di sekolah kelas Dua.

Pembelajaran bahasa menjadi masalah karena banyak bahasa daerah. Karena kebanyakan anak masa itu hanya mengenal bahasa ibunya saja maka tidak mungkin mendidik guru dalam tiap bahasa daerah yang lebih dari 200 buah atau menyediakan buku pelajarannya. Pekerjaan tangan menjadi masalah pembelajaran dan ramai diperbincangkan. Dalam memasukkan pekerjaan tangan sebagai mata pelajaran banyak pendapat hal tersebut tidak layak dipelajari di sekolah karena dapat dipelajari di rumah dan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diperdagangkan juga tidak menarik perhatian orang yang pergi ke sekolah (Nasution, 1995:64-65).

b. Inspeksi Sekolah Dasar Kelas Dua

Sekolah kelas dua dan sekolah kelas satu di bawah inspeksi yang sama hingga tahun 1914. Namun setelah bahasa Belanda menjadi mata pelajaran di sekolah kelas satu dan kemudian sekolah tersebut diubah menjadi HIS maka sekolah ini di bawah inspeksi pendidikan barat dengan demikian terbentuklah perbedaan antara kedua jenis

sekolah ini. Sebelumnya masih ada kemungkinan untuk seseorang berpindah dari sekolah kelas dua ke sekolah kelas satu. Tahun 1906 Indonesia dibagi dalam 6 wilayah inspeksi dengan 6 inspektur dan 6 pembantu inspektur. Wilayah tersebut meliputi Sumatera, Maluku, Makassar, Jawa barat, Jawa tengah, dan Jawa timur. Keadaan luasnya daerah dan sedikitnya jumlah petugas maka pengawasan tidak bisa dijalankan secara maksimal dan hal tersebut mengakibatkan merosotnya kualitas guru. Wilayah inspeksi mengalami perluasan di tahun 1916, dari 6 menjadi 10 dan akhirnya 12. Final inspektur 12 orang tersebut sangat ditak mungkin rasanya untuk memantau dan meninspeksi 3600 sekolah dengan kurun waktu satu tahun dan kondisi transportasi yang kurang mendukung.

Para inspektur tidak dituntut memiliki pendidikan khusus untuk menjalankan tugasnya. Pasalnya masa kolonial tidak pernah diberikan mata pelajaran administrasi pendidikan. Pekerjaan menjadi inspektur sekolah diangkat oleh pemilik sekolah biasanya dipilih dari kalangan guru atau kepala sekolah terbaik. Tahun 1945 sekitar 54% kepala sekolah bukan lulusan Kweekschool. Hal tersebut menjadi keluhan para inspektur karena guru tidak menguasai bahan ajaran. Bagi warga sekolah kunjungan inspektur atau pemilik sekolah ke sekolah merupakan keadaan yang besar dan menghebohkan. Hal tersebut dapat memperlihatkan segala sesuatu dan dapat mengumpulkan berbagai informasi sekolah (Nasution, 1995:67).

Tabel 5.2 Jumlah Sekolah Kelas Dua

Tahun	Jawa	Luar Jawa	Jumlah
1893	203	275	478
1897	207	267	474
1899	207	299	506
1904	258	345	603
1906	276	374	650
1907	278	382	660
1908	335	394	729

Tahun	Jawa	Luar Jawa	Jumlah
1911	633	417	1.050
1920	1.234	608	1.842

c. Fasilitas Sekolah Dasar Kelas Dua

Sekolah kelas dua tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk murid-muridnya belajar. Biasanya sekolah ini menggunakan berbagai macam gedung yang dapat dimanfaatkan menjadi gedung sekolah. Komunitas gereja di Ambon dan Manado bersedia meminjamkan Gerejanya untuk dijadikan gedung sekolah kelas dua ini. Biasanya tiap gereja yang berdiri memiliki hall (ruangan besar) yang digunakan untuk berdoa. Ruangan tersebut dimanfaatkan menjadi ruangan kelas yang dapat memuat beberapa kelas sekaligus. Meskipun sekolah ini diserahkan seluruhnya kepada penduduk lokal sekolah, pendirian sekolah memerlukan dana. Kondisi perekonomian penduduk lokal tidak memadai sehingga mempengaruhi pendirian yang jauh dari kata layak (tidak memenuhi syarat). Keadaan tidak jauh beda di beberapa sekolah kelas dua di daerah lain. Karenanya untuk memudahkan kegiatan pembelajaran sekolah di gratiskan atau tidak di pungut biaya. Gedung sekolah biasanya berupa rumah yang disewa, tangsi militer hingga benteng bekas yang tua.

Gedung-gedung tersebut sebenarnya tidak sesuai jika dipergunakan untuk sekolah karena tuntutan keadaan hal tersebut terpaksa dilakukan. Pemerintah kolonial tidak membantu dalam pembangunan sekolah kelas dua. Bahkan, jika ada dananya harus sudah dianggarkan oleh pemerintah kolonial. Jika tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan maka sekolah tidak pernah didirikan. Tiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda-beda berdasarkan daerahnya namun umumnya gedung sekolah di Jawa lebih baik daripada di luar Jawa. Kekurangan buku-buku untuk pelajaran menjadi gejala umum. Pemerintah menganggarkan dana alat bantu dalam kegiatan pelajaran tiap sekolah tidak melebihi f 200,- jadi setiap tahunnya kurang dari f 1,50,- untuk setiap murid per tahun (Nasution, 1995:66).

d. Buku Pelajaran Sekolah Dasar Kelas Dua

Buku pelajaran tidak ada bedanya dengan sekolah kelas 1 dan sekolah kelas dua maka untuk penggunaan buku digunakan buku-buku yang sama. Buku populer dan sering digunakan pada pendidikan sekolah kelas dua ini adalah buku Emboen. Buku yang ditulis dengan dua guru bahasa melayu dan Belanda ini memiliki kualitas yang sangat baik dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Terdapat 50 pelajaran penting yang dapat dipelajari dengan selipan pendidikan moral. Hubungan manusia dengan lingkungannya seperti mencintai binatang, hidup hemat, bersikap hormat dan sopan kepada orang lain, pelanggaran, hukuman atas kesalahan, hadiah untuk kejujuran dan lain-lain (Nasution, 1995:65).

e. Keadaan Murid Sekolah Dasar Kelas Dua

Sekolah kelas dua menjadi sekolah yang lebih tinggi derajatnya disbandingkan sekolah desa yang didirikan di tahun 1907. Sekolah yang tujuan awalnya untuk anak-anak golongan menengah keatas ini, tidak dapat memenuhi target dalam penerimaan siswa dari golongan itu.

Tabel 5.3 Jumlah Murid Menurut Usia Tahun 1909

Daerah	6-9 Tahun		10-13 Tahun		14-17 Tahun	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Jawa	30.189	2.454	34.592	592	6.061	6
Luar Jawa	22.047	7.751	19.426	4.463	5.380	509

Data 31 Desember 1909

Hanya sebagian kecil saja kelompok yang bersekolah sama halnya dengan yang terjadi di sekolah kelas satu. Untuk menambah jumlah murid yang kurang tersebut, anak dari golongan rendah akhirnya diperbolehkan sekolah di sekolah kelas dua. Dengan ini sekolah kelas dua diisi sebagian besar dari anak-anak golongan rendah. permasalahan ini juga dilatarbelakangi dari persaingan orang Cina karenanya

di Indonesia tidak berkembang golongan menengah yang kuat. Tahun 1900 anak golongan rendah lebih dari tiga kali lipat.

Tahun 1909 hampir 5 kali dan di tahun 1914 hampir 16 kali jumlah anak dari golongan atas. Anak perempuan di tahun 1900 di pulau Jawa berdasarkan presentase lebih banyak dari anak golongan atas yang bersekolah dibandingkan dengan gadis-gadis golongan rendah meski jumlahnya yang nyata dilampaui golongan rendah. Berhubungan dengan usia anak perempuan lebih cepat meninggalkan sekolah di usia muda dan hampir tidak ada anak perempuan yang berusia lebih dari 14 tahun masih berada di sekolah. Umumnya lebih banyak murid yang putus sekolah daripada melanjutkan atau menamatkan sekolahnya (Nasution, 1995:70).

Tabel 5.4 Jumlah Murid Sekolah Kelas Dua di Tahun 1915, 1917, 1919

Tahun		1915	1917	1919
Jawa	Pria	108.893	132.194	140.037
	Wanita	7.306	10.221	12.249
Luar Jawa	Pria	57.163	61.067	65.725
	Wanita	12.968	11.808	14.302

Tabel 5.5 Jumlah Murid Sekolah Kelas Dua yang Berasal dari Sekolah Desa

Tahun	Jumlah Murid Seluruhnya		Jumlah Murid yang Berasal dari Sekolah Desa	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1916	193.261	22.029	16.158 (8.3%)	736 (3.3%)
1917	196.296	22.753	29.900 (15.2%)	1.086 (3.6%)
1918	205.762	26.551	35.074 (17.0%)	1.682 (6.3%)

f. Masalah Putus Sekolah di Sekolah Dasar Kelas Dua

Jumlah anak putus sekolah melampaui jumlah anak yang menamatkan sekolah dengan mendapatkan ijazah. Hanya 8 sampai 10% dari anak perempuan dan sekitar 30% dari anak laki-laki yang berhasil menamatkan pelajarannya. Banyaknya angka putus sekolah dikalangan anak pribumi dikarenakan beberapa alasan seperti: berpindah tempat tinggal, pindah sekolah, sering tidak masuk sekolah, perilaku buruk, sakit, bekerja, melampaui batas umur pendidikan yakni 17 tahun, kematian, biaya sekolah dan alasan-alasan lain. Drop out yang tinggi juga disebabkan karena kurikulum sekolah yang tidak menarik perhatian siswa. Kondisi gedung sekolah yang mirip dengan gudang sangat disayangkan.

Kurikulum tidak memperhitungkan minat dan kebutuhan anak-anak pribumi. Guru-guru yang mengajar pun tidak dipersiapkan untuk memotivasi anak dan mengembangkan bakat mereka secara maksimal. Sekolah kelas dua tidak memberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan kecuali pekerjaan rendah. Bahkan untuk berpindah ke sekolah yang terdapat pelajaran bahasa Belanda dapat dikatakan tidak mungkin. Tapi banyak anak-anak yang awalnya memasuki sekolah desa 3 tahun kemudian meneruskan ke sekolah sambungan (Vervolgschool) 2 tahun sehingga sekolah kelas 2 akhirnya terpecah menjadi sekolah sambungan kelas 4 dan 5 (Nasution, 1995:72-73).

Hasil dari inspeksi di sekolah menduga banyaknya absensi dan putus sekolah diakibatkan oleh rendahnya uang sekolah bahkan sering dibebaskan biaya. Hal tersebut menyebabkan pandangan rendah terhadap pendidikan. Uang sekolah dikategori rendah adalah 10 sen untuk anak pertama dan 5 sen untuk anak selanjutnya.

Tabel 5.6 Uang Sekolah di Sekolah Kelas Dua

Kategori	Anak Kesatu	Anak Kedua	Anak Ketiga
Kategori 1	f 0,50	f 0,25	f 0,10
Kategori 2	f 0,25	f 0,10	f 0,08

Kategori	Anak Kesatu	Anak Kedua	Anak Ketiga
Kategori 3	f 0,10	f 0,05	f 0,05

Orang tua menyikapi secara berbeda-beda mengenai pendidikan. Di Sumatera tengah (1912) tidak semua anak dapat diterima di sekolah karena jumlah sekolah tidak mencukupi. Sementara di Semarang dan pekalongan orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di madrasah. Terdapat 45% absensi karena Sekolah Kelas Dua kurang dihargai di masyarakat. Karenanya pegawai pemerintah menggunakan kewibawaan untuk menghimbau orang tua melalui raja-raja lokal agar menyekolahkan anaknya. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat membendung presentasi absensi dan drop out yang tinggi (Nasution, 1995:72-74).

5.1.3 Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (Volksschool)



Gambar 5.1 Volksschool Jambi, Zuid-Sumatra tahun 1915

Nationaal Museum van Weredculturen.

Sekolah desa atau sekolah rakyat didirikan pada tahun 1907. Pendirian sekolah ini atas usul dan perintah Gubernur jenderal Van Heutz. Sayangnya, sekolah ini tidak diselenggarakan oleh pemerintahan. Pemerintahan kolonial tidak menaungi sekolah ini melainkan diselenggarakan oleh desa. Sekolah desa didirikan dengan tiga syarat yakni: syarat pertama pembangunan sekolah desa dan pengganjian guru

ditanggung oleh oleh masyarakat desa, namun pemerintah harus bersedia membantu jika terdapat keperluan terutama dalam bentuk sarana pembelajaran dan uang. Syarat kedua adalah pembangunannya harus melewati masa percobaan. Syarat ketiga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah desa tidak boleh dipaksa bersekolah, mereka harus memiliki kedarannya sendiri. Di tahun 1906 percobaan sekolah desa telah dimulai di 4 kabupaten yakni Kediri, Kedu, Cirebon dan Priangan. Maksud didirikannya sekolah desa untuk memberantas buta huruf khususnya untuk Bumiputera (Syaharuddin & Susanto, 2019:40).

Hakekatnya sekolah desa didirikan dengan tujuan mencetak petani dan buruh yang terpelajar. Akan tetapi dalam penerapan pendidikannya tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Sebagian besar orang desa berfikir sekolah membuang-mbuang waktu. Persekolahan yang umumnya diadakan dipagi hari menyita waktu anak-anak membantu orang tua mereka bekerja di sawah atau membantu pekerjaan rumah. Pemikiran tersebut sangat mencerminkan kehidupan sosial ekonomi kalangan rendah. Keberadaan sekolah desa juga tidak mudah disesuaikan oleh masyarakat desa karena tidak cocok dengan gaya hidupnya. Bahkan anak-anak desa yang bersekolah rela meliburkan diri tidak dan tidak pergi ke sekolah jika mereka diperlukan untuk membantu orang tua mereka memanen di sawah atau membantu keluarga mereka pada acara seperti pesta perkawinan atau keagamaan di rumah. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan anak-anak desa banyak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya. Permasalahan serupa otomatis telah menghambat manfaat adanya sekolah dasar bagi orang-orang bumiputera. Mungkin, orang-orang desa masih menganggap bahwa sekolah desa merupakan hal baru dan asing berbeda dengan pendidikan di pesantren yang telah dikenal di mana-mana. Sekolah desa dianggap tidak beruntung dan tidak dapat mewujudkan cita-citanya untuk mendidik warga desa. Tapi terdapat beberapa sekolah desa dengan guru berkualitas tinggi dan memberikan pengaruh baik meski hanya ditemukan sebagian kecil di Indonesia (Makmur, 1993:78).

a. Kurikulum Sekolah Desa

Laporan pendidikan tahun 1892 sampai 1893 jelaskan bahwa banyak jumlah penduduk pribumi buta huruf. Hanya 3.964 atau 8% dari 51.464 kepala desa di Jawa yang dapat membaca huruf tulisan lokal. Dari 26.708 juru tulis di Jawa hanya 6.560 atau 25% yang dapat menulis huruf latin. Kemampuan berhitung juga rendah terdapat 2% dari keseluruhan kepala desa di Pulau Jawa yang berhasil memecahkan soal berhitung dengan bilangan pecahan. Meskipun kurikulum sekolah desa sederhana namun sekolah ini memiliki solusi untuk kebutuhan rakyat desa. Saran perluasan kurikulum seperti pekerjaan tangan, pengetahuan tentang pertanian, atau pelajaran kurikulum tetap dianggap sederhana.

Kelas 1 mempelajari membaca, menulis dalam bahasa Melayu dengan huruf latin, latihan bercakap, berhitung 1 sampai 20. Kelas 2 mempelajari membaca dan menulis dengan huruf latin dan Arab, kemudian mempelajari dikte dalam kedua macam tulisan itu. Kelas 3 ulangan berhitung dari atas 100 dan mempelajari pecahan sederhana. Di pulau Jawa sekolah ini disesuaikan dengan kondisi setempat dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Sama halnya dengan sekolah kelas 2 sekolah ini tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan. Kesulitan keuangan juga menjadi masalah dan kemudian sekolah desa menjadi bagian dari sekolah kelas dua (Nasution, 1995:80).

b. Guru Sekolah Desa

Keinginan membuat sekolah desa yang sederhana Van Heutz merasa tidak perlu mencari guru yang cakap karena juru tulis desa telah mencukupi untuk memberikan pengajaran kepada murid desa. Lulusan kelas 2 dianggap cukup untuk menjadi guru sekolah desa. Pengadaan guru yang kompeten dianggap akan menguras biaya dan guru dengan kualifikasi tersebut biasanya tidak mau mengajar di lingkungan desa yang primitif. Guru lulusan sekolah kelas 2 yang berusia 12 sampai 13 tahun yang sangat mudah dirasa tidak mengatasi sekolah dengan 3 kelas dan murid sebanyak 50 sampai 100 murid. Saran-saran dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan mutu guru. Untuk menjadi guru tidak diperlukan ijazah guru. Jika ingin

menjadi guru mereka diharuskan magang pada sekolah yang terdapat guru berpengalaman. Kemudian di masa berikutnya untuk menjadi guru harus memiliki ijazah guru (Nasution, 1995:81-82).

Guru-guru yang mengajar di sekolah desa bukan guru dari pemerintahan kolonial melainkan dari pegawai desa itu sendiri. Karena sekolah ini diserahkan kepada desa otomatis perkembangannya berjalan lambat. Penyebabnya adalah lebih banyak penduduk desa di Indonesia hidup dengan kemiskinan dan tidak berminat pada pendidikan. Di tahun 1920 pemerintah kolonial akhirnya memberikan bantuan kepada sekolah desa. Dengan bantuan tersebut situasi pendidikan di desa mulai membaik. Rupanya perkembangan tersebut tidak berlangsung lama sesuai dengan harapannya. Depresi ekonomi yang terjadi di tahun 1930 mengakibatkan dana bantuan untuk sekolah desa berkurang. Perkembangan penduduk yang terus bertambah dan pemerintah kolonial yang acuh dalam penyediaan dana untuk pendidikan Bumiputera menyebabkan kurangnya pengadaan penambahan sekolah untuk anak Bumiputera (Makmur, 1993:78).

c. Inspeksi Sekolah Desa

Inspektur memiliki tanggung jawab kepada seluruh sekolah desa di Hindia Belanda berada naungan departemen dalam negeri. Namun dalam melaksanakan tugasnya inspektur dibantu 3 asisten ekspektur dan kepala sekolah dan penilik sekolah. Pengangkatan penilik sekolah berkebangsaan Indonesia ternyata sangat bijaksana. Tugas penilik bukan hanya menginfeksi pekerjaan guru tapi juga membimbing guru agar mengajar dengan lebih baik. Karena pendidikan desa memiliki latar belakang pendidikan rendah maka tugas inspeksi harus memiliki aspek penilikan dan pendidikan. Para penilik di bawah pengawasan instansi yang lebih tinggi (Nasution, 1995:84).

d. Keadaan Murid Sekolah Desa

Peresmian sekolah desa, yang sebelumnya adalah sekolah percobaan. Mengalami peningkatan yang sangat pesat. Jarak tahun 1707 hingga 1910 menjadi 70.000. kemudian di tahun 1914 terdapat penambahan siswa yakni 300.000 dengan

tambahan 40.000. Penambahan murid tidak besar jumlahnya diantara tahun 1914 dan 1920 hal tersebut terjadi karena perpindahan pengurus sekolah. Administrasi sekolah dari departemen dalam negeri yang dihormati rakyat diganti dan diberikan kepedpartemen pengajaran dan agama yang tak begitu besar pengaruhnya dalam pandangan masyarakat. Jumlah murid perempuan sangat rendah jumlahnya, hanya 6,3% di tahun 1914 dan 10,3% di tahun 1919. Angka putus sekolah sangat tinggi di sekolah desa khususnya di kelas rendah. Jumlah putus sekolah lebih dari 80% dari murid yang terdaftar di kelas 1 di kelas 2 memiliki murid kurang dari seperlima murid kelas 1 dan jumlah murid kelas 3 kurang dari 1/18 dari murid yang masuk kelas 1. Alasan putus sekolah diantaranya 50% muridnya sering bolos sekolah, 13% murid mengalami sakit atau meninggal, 16% lainnya berpindah tempat tinggal ke desa lain. Dan banyak orang tua yang memerlukan anaknya untuk membantu bekerja di rumah atau di sawah (Nasution, 1995:85-86).

Tabel 5.7 Jumlah Murid di Sekolah Desa

Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1910	-	-	71.239
1914	280.676	19.385	301.061
1915	286.823	24.044	310.867
1916	316.294	31.457	347.751
1917	329.655	34.420	365.075
1918	325.631	34.924	360.980
1919	321.360	36.320	357.680
1920	-	-	396.408

e. Fasilitas Sekolah Desa

Fasilitas di sekolah desa sangat memprihatinkan. Berbeda jauh dengan sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Gedung sekolah, rata-rata menggunakan gedung masyarakat yang dapat di manfaatkan menjadi ruang belajar. Sekolah desa tidak menyediakan fasilitas seperti meja dan kursi seperti sekolah barat

lainnya. Anak-anak muridnya hanya duduk dilantai seperti halnya yang di lakukan di rumahnya (lesehan). Mejanya menggunakan kaleng kosong yang diperoleh dari warung Cina. Dihalamannya diambil sebidang tanah dan dibangun pagar. Fungsinya untuk menitipkan hewan gembalaan murid-murid selama mereka mengikut kegiatan pembelajaran. Biasanya digaja oleh orang dewasa agar hewan gembalaan (kerbau, sapi, kambing) tidak hilang/lepas. Sekolah dibuka dari jam 09.00 hingga jam 12.00 siang dan jam 01.00 siang hingga jam 03.00 sore. Balai desa digunakan sebagai tempat belajar agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak (Nasution, 1995:83).

5.1.4 Sekolah Lanjutan (Vervolgschool)

Sekolah lanjut merupakan sekolah yang dibuka untuk sekolah lanjutan dari sekolah desa (Volksschool). Lama belajar di sekolah ini adalah 3 tahun sekolah ini dikhususkan untuk murid-murid sekolah desa yang memiliki prestasi yang baik. Pendirian sekolah ini bersamaan tahunnya dengan pendirian his yakni tahun 1914 (Makmur, 1993:79). Di beberapa lokasi sekolah diperluas dan terdapat mata pelajaran tambahan yakni pelajaran pertanian (Syaharuddin & Susanto, 2019:40).

5.1.5 Sekolah Peralihan (Schakelschool)

Sekolah peralihan merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa (Volksschool) yang lama belajarnya 3 tahun dengan sekolah berbahasa pengantar bahasa daerah. Kemudian ke sekolah peralihan dengan berbahasa pengantar bahasa Belanda dengan nama belajar 5 tahun. Sekolah peralihan (Schakelschool) dapat menampung murid-murid tamatan sekolah lanjutan (Vervolgschool). Sekolah ini dikhususkan atau mereka yang dianggap pandai dapat memasuki sekolah ini (Makmur, 1993:79).

5.2 Pelaksanaan Pendidikan Dasar Non-Pribumi (Barat) masa Pemerintahan Kolonial Belanda

5.2.1 ELS (Europese Lagere School)

a. Kurikulum ELS (Europese Lagere School)

Setelah lahirnya politik etis, ELS mendapatkan perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. ELS memiliki tujuan menjadikan anak turunan Belanda menjadi warga negara yang baik. Sebelumnya, tujuan pendidikan di bawah pemerintahan VOC adalah mendidik warga taat beragama & menyebarkan agamanya. Kurikulum yang diberikan ELS terdiri dari mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, sejarah, ilmu bumi dan mata pelajaran yang lainnya. Mulanya, agama merupakan faktor utama pemerintahan kolonial mengadakan sekolah. Kemudian tujuan tersebut ditiadakan dan menjadi pokok diskusi yang hangat dalam parlemen Belanda selama bertahun-tahun. Diskusi tersebut kemudian melahirkan peraturan kurikulum baru. Kurikulum dapat lebih diperluas lagi dengan tambahan mata pelajaran yang memiliki mutu tinggi. Mata pelajaran tersebut yakni ilmu alam, dasar-dasar bahasa Perancis, bahasa Inggris dan Jerman, sejarah umum atau sejarah dunia, matematika, pertanian, menggambar, pendidikan jasmani, keterampilan tangan, dan menjahit untuk anak-anak perempuan (Nasution, 1995:92).

Bahasa Perancis awalnya hanya dimasukkan ke ELS pertama di tahun 1868. Mata pelajaran bahasa Perancis merupakan mata pelajaran penting sebagai syarat memasuki HBS. Bahasa ini memiliki tujuan pengajaran dengan maksud siswa dapat menempuh ujian dan mendapatkan hasil yang baik dengan adanya tambahan pelajaran di sore hari. Tahun 1913 bahasa Perancis akhirnya diberikan kepada semua sekolah ELS pertama dan terdapat 16,2% ELS bukan pertama. Pentingnya bahasa Perancis sebagai bekal diterapkan pada pengangkatan kepala ELS. Penguasaan bahasa Perancis menjadi syarat sertifikasi untuk menjabat pada tatanan pemerintahan tersebut. Lambat laun kemudian muncul kritik terhadap pembelajaran bahasa Perancis. Banyak sekali saran agar mata pelajaran tersebut ditiadakan. Alasan banyaknya suara keberatan tersebut ialah lingkungan sekitar Indonesia. Indonesia terletak diantara

negara-negara jajahan berbahasa Inggris. Selayaknya bahasa Prancis harus digantikan dengan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di ELS. Australia, India, Burma, semenanjung Melayu, Jepang dan Cina semuanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perdagangan. Suara keberatan tersebut menganggap jika kita dapat menguasai bahasa Inggris kita akan mempermudah kegiatan perdagangan dengan bangsa-bangsa lainnya.

Keberatan tersebut juga didukung oleh perkumpulan guru-guru di Hindia Belanda. Hasil rapat umum tahun 1906 pada perkumpulan ini mengemukakan bahwa anak-anak Indonesia yang belajar bahasa Perancis dan belajar bahasa Belanda dalam waktu yang bersamaan, hal tersebut akan memakan banyak waktu. Bahasa Prancis juga dianggap tidak memiliki nilai praktis di negara Indonesia, dalam kehidupan sosial atau komersial. Meski banyak suara akan keberatan mempelajari bahasa asing (bahasa yang tidak digunakan orang-orang Indonesia). Penghapusan bahasa Perancis dianggap menurunkan mutu ELS dan menimbulkan kesulitan untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda. Padahal hanya terdapat 295 dari 6.087 murid atau terdapat 3% murid saja yang kembali ke Netherland. Kenyataan tersebut seharusnya sekolah lebih di fleksibelkan untuk anak-anak Indonesia. Namun dalam penerapan pendidikan pemerintahan kolonial tetap melancarkan prinsip konkordansinya. Bahasa Perancis terus dipertahankan hingga pemerintahan Belanda jatuh di tangan kependudukan Jepang.

Klausule (ketentuan khusus) mendapati perizinan dalam perluasan kurikulum. Menggambar dan pendidikan jasmani akhirnya dijadikan mata pelajaran di tahun 1894. Untuk gadis-gadis terdapat mata pelajaran menjahit di tahun 1911. Mata pelajaran yang tidak populer adalah bahasa Inggris dan bahasa Jerman alasannya karena tidak menjadi mata pelajaran ujian. Sehingga tidak ada acuan untuk mempelajarinya. Pertanian tidak dijadikan mata pelajaran, karena bertani di Indonesia orang Belanda anggap merendahkan martabatnya. Selama riwayat ELS bahasa Melayu tidak dijadikan mata pelajaran, karena memang tujuan sekolah ini adalah menanamkan kesadaran nasional bangsa Belanda. ELS sebagai lembaga resmi yang

didirikan oleh lembaga Belanda memang dipertahankan murni dengan mengabaikan kebudayaan sekitarnya. Geografi dan sejarah Belanda lebih dipahami oleh murid-muridnya dibandingkan kondisi di Indonesia. Lagu-lagu Belanda dinyanyikan di sekolah ini. Adat dan kebudayaan yang berbau barat sangat dihargai, bahkan di kalangan rakyat.

ELS sebenarnya sama halnya dengan sekolah lainnya yang dipandang sebagai alat politik sepenuhnya, dikuasai, dan diawasi oleh. Pelajaran bahasa Belanda menjadi peran penting dan utama dalam meresapi pelajaran yang lain. Penguasaan bahasa menjadi hal yang sangat berharga dan kunci agar menjadikan seseorang pegawai pemerintah. Sayangnya kemampuan berbahasa Belanda terbatas pada golongan terdidik dan golongan intelektual yang memiliki jabatan terhormat dalam masyarakat. Ujian khusus *Klein Ambtenaars examen* mengutamakan penguasaan bahasa Belanda, dan harus ditempuh untuk memperoleh pekerjaan meski pekerjaan yang didapat hanya pegawai rendah di pemerintahan. Pemerintah memiliki alat ampuh untuk mengontrol rakyat dengan bahasa Belanda. Inspektur sangat teliti memperhatikan mata pelajaran bahasa Belanda. Pendidikan juga memiliki alat kontrol lainnya yaitu guru ELS yang memiliki sumpah setia dan rahasia. Seragam, buku, dan kurikulum ditentukan oleh pemerintahan (Nasution, 1995:94).



Gambar 5.2 Europese Lagere School 1885-1910

Nationaal Museum van Wereldculturen

b. Guru ELS (Europese Lagere School)

Usaha yang keras dilakukan untuk memperoleh guru yang berkualifikasi tinggi. Pemerintah sengaja mendatangkan guru-guru dari negeri Belanda. Kemudian melatihnya di Indonesia atau menyuruh pemuda ke Netherland untuk pendidikan guru. Sangat tidak mudah untuk mendatangkan guru dari negeri Belanda oleh karenanya diberi sejumlah kemudahan kepada calon guru seperti diberikan uang sebanyak f 500 - f 700 untuk membeli keperluan saat tiba di Indonesia. Tambahan f 75,- untuk setiap akta, 10% dari uang sekolah untuk kepala sekolah, mendapatkan tempat tinggal di perumahan atau uang sebanyak f 60 - f 100 dalam satu bulan. Meskipun penghasilan guru terbilang cukup namun guru yang didatangkan sangat minim. Karenanya setiap tahun dikirim 24 calon ke Netherland yang belajar selama 2 tahun pada sekolah guru dan dibiayai oleh pemerintah. Kesulitan tersebut akhirnya mendorong untuk membuka kursus di Indonesia untuk mendidik guru ELS kursus normal berjalan selama 2 tahun dan kursus normal 3 tahun untuk mendapatkan jabatan kepala sekolah. Kursus tersebut diadakan tiap petang antara jam 16.30 - 20.00. kurikulum utamanya adalah pendalaman dan perluasan mata pelajaran yang diberikan di ELS kursus normal (Nasution, 1995:96).

Meski kursus telah dibuka dan terlahir guru-guru terdidik di Indonesia, nyatanya guru baru dari negeri Belanda tetap didatangkan. Alasannya karena masih terdapat kekurangan guru dan tujuan mendapatkan guru-guru yang fresh dari Netherland untuk tetap mempertahankan suasana Belanda yang murni. Suatu sekolah dapat dibuka jika jumlah murid telah mencapai 20 orang di Jawa dan 15 orang di luar Jawa. Awalnya tiap sekolah ELS terdapat tiga kelas yaitu kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas. Jika murid kurang dari 30 orang hanya satu orang kepala sekolah yang menanganinya. Jika terdapat 30 sampai 69 murid seorang kepala sekolah dan seorang guru yang menangani. Untuk 70 sampai 119 murid seorang kepala sekolah dan 2 orang guru yang menangani. Di tahun 1907 akhirnya ELS terbagi menjadi 7 kelas namun di kota-kota kecil beberapa kelas harus disatukan.

Lebih besar kemungkinan untuk anak Indonesia dapat diterima sebagai murid agar sekolah tidak ditutup karena kekurangan murid.

Adakalanya di sekolah serupa jumlah murid berbangsa Indonesia lebih banyak daripada murid berbangsa Belanda. Guru di tahun 1890 sebanyak 453 orang di 144 sekolah. 3,2 guru per sekolah dengan 12.377 murid. Di tahun 1910 jumlah guru mencapai 1.056 di 194 sekolah dengan 24.182 murid atau 5,4 guru per sekolah. Didapati masalah saat dua wanita Indonesia berhasil mendapatkan ijazah guru di Netherland. Mereka secara legal memiliki wewenang untuk mengajar di ELS, karena tidak terdapat undang-undang diskriminasi kebangsaan atau rasial. Namun rupanya dewan Hindia Belanda yang memiliki sifat konservatif melindungi kepentingan Belanda dengan memberitahukan dengan tegas bahwa pribumi tidak layak mendidik anak Belanda. Dengan alasan mereka lahir dan dibesarkan di lingkungan yang tidak sesuai dan sangat berbeda. Menurutnya pendidikan tidak mengenai pengetahuan guru, namun juga kepribadian, sikap moral, dan cara berpikir. Anak Belanda yang harus terdidik kebudayaan barat dan harus diasuh oleh guru berpikiran dan berperasaan barat. Jikalau guru pribumi dapat mengajar di sekolah Belanda (ELS) ia tidak akan dihormati oleh anak-anak Belanda. Setelah keputusan tersebut, bahkan hingga Belanda menyerah kepada kependudukan Jepang tidak seorangpun berdarah Indonesia yang diangkat sebagai guru di ELS. (Nasution, 1995:96-98).

c. Inspeksi ELS (Europese Lagere School)

Inspeksi adalah aspek yang penting dalam suatu sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Peraturan sekolah tahun 1818 topik utamanya adalah mengenai inspeksi. Terdapat penentuan jika tiap sekolah harus terdapat kunjungan setidaknya sekali dalam seminggu. Hal tersebut dimungkinkan karena jumlah sekolah yang kecil. Setelah jumlah sekolah bertambah dibentuklah badan inspeksi khusus yang bertugas untuk mengunjungi sekolah sekali dalam setahun. Inspeksi juga berlaku untuk sekolah pribumi.

Para inspektur diharuskan memeriksa kurikulum resmi yang diberikan Belanda dapat diikuti di sekolah dengan cermat. Para inspektur menghadiri kegiatan

belajar mengajar antara guru dan murid. Kemudian memberikan saran-saran perbaikan dengan cara yang tenang dan bijaksana. Guru dapat mengetahui hasil inspeksi dan mempertahankan diri. Biasanya hasil inspeksi berisi kesalahan dan kekurangan guru dan sekolah. Inspeksi juga melakukan pujian dan penghargaan atas usaha yang baik. Sekolah juga mendapatkan pengawasan yang ketat dalam segala tindak tanduknya. Diawasi oleh komisi sekolah lokal yang diketuai oleh kepala daerah setempat (Nasution, 1995:98).

d. Penerimaan Murid ELS (Europese Lagere School)

Semua anak orang Eropa dan anak yang secara legal disamakan dengan orang Eropa memiliki hak untuk dapat memasuki ELS, asalkan salah satu orang tuanya berdarah Eropa. Bahkan jika ibunya orang barat dan anaknya yang seharusnya tidak sah menjadi orang barat, diberikan kesempatan untuk memasuki sekolah ini. Orang Afrika juga dapat memasuki sekolah ini asalkan mereka beragama Kristen. Kelompok lainnya yang dapat memasuki sekolah ini adalah anak-anak serdadu dari Manado, Ambon, Ternate, dan Tidore, asalkan beragama Kristen dan berada di luar daerahnya. Anak serdadu golongan rendah dibebaskan dari uang sekolah. Loyalitas kepada pemerintah Belanda menjadi faktor yang dapat menentukan masuk tidaknya anak ke ELS di samping pertimbangan agama dan rasial. Sejumlah 1900 anak Belanda yang berjiwa Indonesia dan secara kultural lebih dekat dengan orang Indonesia, mereka memiliki hak untuk memasuki sekolah elit ELS.

Banyak anak dari golongan rendah memasuki ELS. Bukan kelas satu tapi mereka mendapatkan keringanan berupa uang sekolah yang lebih rendah bahkan untuk beberapa siswa mendapatkan kebebasan pembayaran. Orang tua dari golongan menengah dan atas mengirim anaknya ke ELS kelas satu yang uang sekolahnya minimal f 2,50 atau 1% dari gaji dan tidak terdapat kebebasan uang sekolah. Itulah sekolah untuk orang elit di kalangan ini yang sangat sulit dimasuki oleh orang Indonesia meskipun dari kalangan atas. ELS didirikan dengan maksud memberi pendidikan anak-anak Belanda, namun sekolah juga penting untuk anak-anak Indonesia karena sekolah ini juga menerima anak Indonesia. Akan tetapi anak-anak

Indonesia yang diterima menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan karena tidak memuaskan kedua belah pihak. Peraturan penerimaan anak Indonesia berubah-ubah sesuai keadaan politik tapi tidak semua anak Indonesia ditolak untuk masuk sekolah ini. Yang menjadi kesulitan adalah anak siapa dan berapa anak Indonesia yang akan diterima di sekolah ini (Nasution, 1995:99).

Europese Lagere School (ELS) yang memang didirikan untuk orang Eropa dan orang-orang yang disamakan statusnya kemudian diputuskan sebagai sekolah untuk pendidikan Eropa yang membiarkan anak Indonesia untuk memasukinya. Anak-anak di luar darah Eropa tidak ditolak. Selama jumlahnya lebih kecil daripada anak-anak Belanda tidak ada keberatan dalam penerimaan anak berdarah Indonesia. Penerimaan anak Indonesia dianggap penting dari segi politik. Anak-anak aristokrasi yang bersekolah di ELS membantu mempererat hubungan antara kedua bangsa. Penambahan murid berdarah Indonesia lambat laun di luar batas. Hal tersebut dianggap sebagai ancaman dan kemudian dikeluarkan kebijakan untuk membatasi penambahan selanjutnya (Nasution, 1995:99).

Masa lunak di zaman liberal membebaskan anak Indonesia yang ingin menempuh pendidikan barat nyatanya menimbulkan reaksi di kalangan orang Belanda yang terealisasikan dalam peraturan tahun 1894 yakni:

- a) Anak Indonesia yang bersekolah tidak boleh melebihi 7 tahun jika ingin diterima masuk sekolah peraturan ini tidak berlaku untuk anak Belanda
- b) Penerimaan siswa anak bukan Belanda tidak boleh menjadi penyebab ditolaknya anak Belanda karena kekurangan tempat
- c) Anak Indonesia diharuskan membayar uang sekolah yang lebih mahal
- d) Anak Indonesia tidak boleh menempati ruang kelas yang sama lebih dari 2 tahun hal tersebut tentunya tidak berlaku untuk anak Belanda
- e) Persoalan tersebut sepertinya tidak dimungkinkan untuk anak Indonesia menguasai bahasa Belanda pada usia 7 tahun, karena lingkungan tempat tinggalnya bukan orang-orang Belanda kecuali jika memang pada usia 3 tahun anak-anak tersebut ditempatkan di rumah orang Belanda.

J. H. Abendanon mengusulkan untuk memperluas penerimaan anak di Indonesia di ELS pada masa politik etis ditolak. Akhirnya di tahun 1903 peraturan tersebut diperlunak. Sekolah dokter Jawa yang merupakan pendidikan medis untuk Indonesia dan sekolah pegawai memerlukan calon murid yang memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik dan hal tersebut hanya dapat diperoleh jika menempuh pendidikan di ELS. Petugas medis sangat dibutuhkan dalam merawat buruh di perkebunan dan pegawai banyak dibutuhkan pada wilayah Belanda yang terus meluas di luar Jawa. Tujuan tersebut mengharuskan setiap tahun menerima 140 anak Indonesia di ELS bukan kelas satu (Nasution, 1995:100).

Terdapat reaksi terhadap kemudahan penerimaan anak Indonesia. Tahun 1905 diadakan angket untuk mengetahui bagaimana pengaruh anak-anak Indonesia terhadap untuk intelektual, moral, dan bahasa Belanda. Guru-guru kebanyakan menjawab dengan dasar rasa simpati atau antipati kepada bangsa Indonesia. Rupanya lebih banyak jawaban negatif terhadap kehadiran anak Indonesia di ELS. Tahun 1907 menteri jajahan mengeluarkan pernyataan bahwa ELS harus dihindarkan dari hal non-Belanda. Kemudian anak-anak Indonesia diberikan kesempatan belajar bahasa Belanda di luar ELS. Bahasa Belanda kemudian dijadikan mata pelajaran di sekolah kelas satu di tahun 1907. Tahun 1908 terdapat gerakan baru di Indonesia yakni Budi Utomo. Kongres pertama meminta kepada pemerintah Belanda agar anak Indonesia dipermudah untuk memasuki ELS.



Gambar 5.3 Europese Lagere School Danau Sentani, Jayapura, Papua tahun 1935

Universiteit Leiden Digital Collections

Sekolah kelas satu tidak dapat menyelesaikan masalah karena tidak adanya harapan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti ujian sertifikasi pegawai rendah. Di tahun 1911 terdapat peraturan untuk menerima anak Indonesia berdasarkan kebutuhan pendidikan barat. Tentu saja dengan mempertimbangkan status orang tuanya. Kemudian muncul unsur dalam penerimaan murid yaitu status sosial dan pendidikan orang tua. Jumlah anak Indonesia yang bersekolah di ELS lambat laun meningkat namun tetap dipengaruhi dengan peraturan yang berlaku. Tahun 1890 terdapat 808 orang atau 6,5% dari jumlah murid seluruhnya. Pada tahun 1905 terdapat 3.752 orang atau 19,3%. Kemudian menurun di tahun 1910 menjadi 3.453 orang atau 14,0% dan meningkat di tahun 1919 menjadi 5.285 orang atau 19,2% dari jumlah murid seluruhnya. Ada waktu di mana jumlah murid berdarah Indonesia melebihi jumlah anak Belanda di ELS. Di Sibolga terdapat 28 murid yang diantaranya 19 anak berdarah Belanda.

Tahun 1914 sekolah kelas satu diubah menjadi Hollands Inlandse School (HIS) sekolah berbahasa Belanda, namun peminat memasuki ELS tidak berkurang. Anak-anak dari golongan priyayi dan pegawai jabatan tinggi lainnya ingin agar anaknya mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak Belanda. Hal tersebut dipahami oleh pemerintahan kolonial Belanda dan akhirnya ELS tetap dibuka untuk anak Indonesia. Bahaya invasi anak-anak Indonesia golongan rendah tidak dikhawatirkan lagi karena biaya sekolah yang tinggi hanya mampu dibayar oleh segelintir orang Indonesia saja (Nasution, 1995:101).

Hampir seluruh anak penduduk golongan Eropa dapat menikmati pendidikan dasar meskipun mutu yang diharapkan belum memenuhi. Selain sekolah negeri terdapat juga sekolah Eropa swasta terdapat pula sekolah Eropa khusus untuk murid laki-laki dan murid perempuan. Terdapat pula sekolah Dasar Eropa khusus untuk anak-anak militer di tahun 1828 (Mudyahardjo, 2006:261). Tiga tingkatan ELS yaitu ELS kelas I (erste), ELS kelas II (twede), ELS kelas III (thirte). ELS kelas 3 diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia yang gaya hidupnya selayaknya orang Belanda (Rifa'i, 2017:61). Jumlah sekolah dan jumlah muridnya sangat banyak.

Karena sekolah yang didirikan tidak hanya didirikan oleh pemerintah kolonial saja namun juga oleh pihak swasta. Di Jawa barat ELS terdapat di Bandung 3 sekolah, di jalan Sumatera sekarang menjadi SMP 2, di jalan Dr Cipto sekarang balai pendidikan guru, dan di jalan Pasteur sekarang jawatan tera, di Rangkasbitung sekarang SMP 1 dan di Cirebon (Depdikbud, 1998:73).

Tahun 1923 berdiri sekolah di Surabaya bernama Broedersschool te Soerabaia sekolah ini merupakan sekolah gabungan ELS Broedersschool Santo Aloysius dan ELS Broedersschool Yosef. ELS BSA memiliki 120 murid dan 6 guru, kemudian ELS BSY memiliki 201 siswa dan 8 guru. Keduanya didirikan di Coen Boulevard Laan yang sekarang adalah Jalan Polisi Istimewa dan menjadi SMAK St. Louis 1 Surabaya (Prayudi, 2014:5).

e. Populasi ELS (Europese Lagere School)

Kurun waktu 3 dekade anak Belanda yang bertambah jumlahnya yang awalnya 12.421 di tahun 1890 kemudian menjadi 20.703 di tahun 1918 atau 68%. Peningkatan jumlahnya dikarenakan di tahun 1870 anak Belanda telah mendapatkan kesempatan bersekolah, dan jumlah murid Gian bertambah sesuai dengan pertumbuhan anak usia sekolah. Karenanya kebutuhan pendidikan harus tetap dipenuhi. Kalangan orang Indonesia mengalami keadaan yang sebaliknya, pendidikan lebih besar permintaannya daripada yang dapat diberikan oleh ELS. Sebanyak 808 murid di tahun 1890 kemudian jumlahnya meningkat menjadi 5.385 di tahun 1919 hal ini hampir 5,5 kali atau 8 kali lebih cepat pertambahan anak-anaknya daripada anak Belanda.

Sayangnya tidak ada kemungkinan untuk ELS menjadi sekolah umum yang dapat dimasuki anak Indonesia. Pertimbangan politik, ekonomi, dan rasial menjadi pertimbangannya. Hanya sebagian kecil anak terutama golongan elit sosial dan plutokratis kalangan Indonesia yang dapat memasuki sekolah ini. Sedangkan anak Belanda banyak diterima meskipun tidak membayar uang sekolah. Tahun 1910 lebih dari setengah jumlah anak Belanda bebas dari uang sekolah. Kebebasan tersebut dilatarbelakangi ras yang sama dapat menikmati pendidikan terbaik yang tersedia

dengan biaya pemerintah. Berikut adalah tabel jumlah murid di ELS berdasarkan kebangsaannya.

Tabel 5.8 Jumlah Murid ELS Berdasarkan Kebangsaannya

Tahun	Jumlah anak Belanda	Jumlah anak Indonesia	Jumlah anak orang asing	Jumlah Seluruhnya	Presentase anak Indonesia
1890	11.421	808	148	12.377	6,5
1895	12.690	1.135	185	14.010	8,1
1900	13.592	1.545	325	15.462	10,0
1905	15.105	3.752	525	19.382	19,3
1910	17.526	3.453	3.525	24.514	14,0
1915	19.712	4.187	1.093	25.002	16,7
1919	20.703	5.285	1.325	27.315	19,2

Anak kalangan timur asing atau Cina jumlahnya bertambah dibanding kelompok rasial lainnya. Tahun 1890 terdapat 148 orang kemudian bertambah menjadi 1.325 di tahun 1915 / 9 kalinya. Gadis-gadis kalangan anak Belanda banyak yang bersekolah, terdapat 45% atau hampir setengahnya. Untuk kalangan anak Indonesia gadis Kristen lebih banyak yang bersekolah daripada bukan Kristen. Hampir seperlima murid Indonesia adalah anak perempuan. Hanya 4% di tahun 1890 gadis yang bersekolah di luar agama Kristen namun meningkat di tahun 1914 menjadi 13,4% (Nasution, 1995:103-105).

f. Fasilitas ELS (Europese Lagere School)

Laporan inspeksi tahun 1891 dan seterusnya, gedung ELS selalu didapati dalam kondisi yang baik. Tahun 1912 pekarangan sekolah sampai dibersihkan oleh narapidana dan sejak itu sekolah ini dibersihkan oleh pesuruh. Perabotan, buku-buku, dan alat yang digunakan untuk mengajar dan lainnya selalu lengkap dan tersedia. Fasilitas yang terpenuhi tersebut membuktikan bahwa anak-anak Belanda memang disediakan sekolah yang paling baik dan paling lengkap yang sangat berbeda

keadaannya dengan sekolah untuk anak Indonesia. Sejak 1905 setiap sekolah ELS telah memiliki perpustakaan yang memadai, hal itu sengaja diperluas untuk murid kelas 3 hingga 7. Dana yang disediakan sejumlah f 0,40,- setahun untuk perpustakaan sekolah sedangkan untuk instalasi pertama diberikan sebanyak f 40,- dengan rata-rata sekitar 3600 buku per sekolah di tahun 1910. Menurut peraturan pemerintah gedung sekolah ELS dibuat dari batu bata dengan atap genteng dan terletak di lokasi yang tenang, bebas debu, dengan jarak yang jauh dari jalan raya. Pada halaman sekolah biasanya dibangun luas dan ditanami dengan pohon-pohon yang sangat rindang. Kebanyakan sekolahnya memiliki bangsa gymnastic untuk pendidikan jasmani di waktu hujan (Nasution, 1995:95).

Tabel 5.9 Jumlah Perpustakaan dan Buku di ELS

Tahun	Sekolah dengan Perpustakaan	Sekolah Tanpa Perpustakaan	Jumlah Buku
1891	137	10	31.187
1895	155	4	36.833
1900	168	1	46.069
1905	Semua	-	57.302
1910	Semua	-	61.196
1914	Semua	-	54.290

g. Lanjutan ELS (Europese Lagere School)

Lulusan ELS dapat menempuh dua macam jenis ujian yaitu ujian pegawai rendah (Klein Ambtenaars examen) yang dapat ditempuh setelah kelas 6 dan ujian masuk HBS (Hogere Burgerschool, sekolah menengah, setara dengan SMP dan SMA sekarang) setelah lulus kelas 7. Biasanya terdapat 80% siswa yang lulus dari kedua ujian tersebut. Meskipun telah memiliki ijazah *Klein Ambtenaars* (pegawai rendah) hal tersebut tidak menjamin mendapatkan pekerjaan. Kemudian ujian tersebut dihapuskan setelah didirikannya HCS dan HIS. HBS menjadi jalan satu-satunya

untuk melanjutkan ke jenjang universitas di negeri Belanda. Anak-anak yang tidak meneruskan pendidikan ke negeri Belanda dapat memiliki harapan untuk bekerja jika memiliki ijazah HBS. Pembatasan anak Indonesia yang masuk ke ELS dimaksudkan agar orang Belanda dapat memonopoli pekerjaan jabatan tinggi dalam pemerintahan (Nasution, 1995:94).

Keuntungan memasuki ELS ialah sekolah ini menjadi bagian integral sistem pendidikan dari sekolah rendah hingga perguruan tinggi. Pemerintah Belanda memperlancar peralihan antara ELS dengan HBS. Periode 1900-1904 sepertiga lulusan ELS melanjutkan pendidikannya ke sekolah kejuruan atau HBS. Periode 1905-1909 lebih dari setengahnya. Kemudian di tahun 1915-1919 jumlah menjadi 80% atau 4 dari 5 anak yang melanjutkan ke sekolah kejuruan atau HBS. Waktu di mana Indonesia belum mendapatkan pendidikan umum 3 tahun, anak-anak turunan Belanda telah menuju pendidikan universal yang ditempuh lebih dari 7 tahun. Perbandingan tersebut kian lama kian melebar (Nasution, 1995:95).

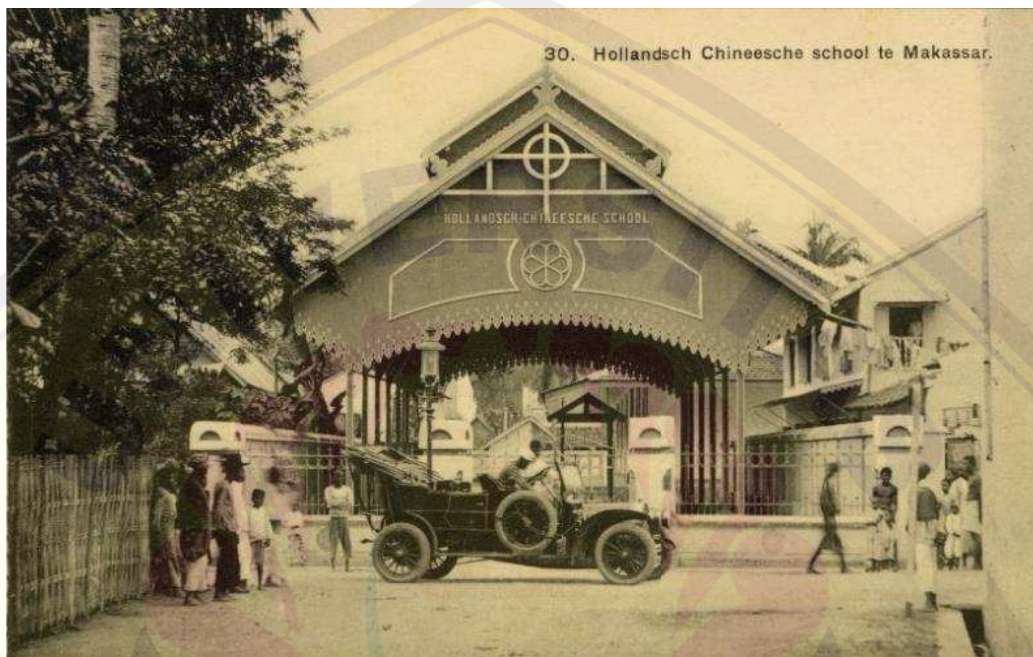
Tabel 5.10 Populasi Penduduk Eropa dan Belanda Menurut Usia tahun 1930

Kelompok Usia	Populasi Eropa		Populasi Belanda	
	Banyaknya	Presentase	Banyaknya	Presentase
0-19	93.989	39,1	84.158	40,4
20-59	129.629	54,0	110.885	53,3
60 tahun keatas	9.082	3,8	8.031	3,9
Tidak dikenali	7.462	3,1	5.195	2,5
Total	240.162	100	208.269	100

Hasil sensus yang dilakukan di tahun 1930 terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada kelompok umur 10 dan 25 tahun. Bagan tersebut menyimpulkan bahwa banyak orang Eropa menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan menengah dan tinggi di Belanda. Bahkan pada sensus yang dilakukan di tahun 1920 hal tersebut juga terjadi. Pola migrasi antara Hindia Belanda dan Eropa/Belanda sangat spesifik menurut usia ke Eropa sekitar akhir sekolah dasar, ke Hindia Timur

pada awal karir kerja, dan kembali ke Eropa saat pensiun. Fenomena ini disebut efek Katjangs, yang terinspirasi dari buku anak-anak klasik De Katjangs di mana tokoh-tokoh utamanya melakukan perjalanan dari Hindia Belanda ke Belanda untuk memulai pendidikan HBS mereka di sana (Beets, 2002:27-28).

5.2.2 HCS (Hollands Chineesche School)



Gambar 5.4 Hollandsch Chineesche School Makassar tahun 1910

Tahun 1910, Universiteit Leiden, Digital Collections

a. Kurikulum HCS (Hollands Chineesche School)

HCS memiliki dasar dan sistem pendidikan yang sama dengan ELS. Bahasa Perancis menjadi mata pelajaran yang diajarkan pada sore hari seperti bahasa Inggris yang sebenarnya tidak diberikan pada ELS. Karena kepentingan perdagangan akhirnya bahasa-bahasa tersebut diajarkan. Umumnya HCS memiliki kelas persiapan untuk anak-anak berusia 5 tahun. Hal tersebut ditujukan agar anak-anak lebih mudah mengikuti pelajaran di kelas satu. Sangat disayangkan bahwa fasilitas tersebut tidak

didapatkan untuk anak-anak berdarah Indonesia. Pengajaran bahasa Cina menjadi masalah serius. Pemerintah kolonial menolak dengan tegas adanya pembelajaran bahasa Cina. Padahal beberapa suara menganjurkan adanya bahasa Cina sesuai dengan kebutuhan murid.

Pemerintah kolonial tidak rela membiayai tujuan-tujuan nasionalis bangsa lain. Kelompok Cina sering mengadakan pengajaran bahasa Cina di luar sekolah yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah. Pembelajaran bahasa Melayu juga tidak berhasil karena bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa pasar yang biasa digunakan oleh para pembantu. Sehubungan dengannya orang Cina sesungguhnya menginginkan kebudayaan barat dan banyak diantara mereka menggunakan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari dan rumah tangga (Nasution, 1995:108-109).

b. Guru HCS (Hollands Chineesche School)

HCS memiliki kurikulum dan buku pelajaran yang sama dengan ELS. Tentu saja karena kesamaan tersebut diperlukan guru yang memiliki taraf yang sama. Jika dilihat dari segi politik seharusnya HCS mempekerjakan guru Belanda, namun karena jumlah HCS kian hari makin bertambah maka pendidikan guru Cina yang memiliki kualitas yang sama dengan guru Belanda menjadi pilihan mendesak. Tahun 1916 dibuka HKS (Hogere Kweekschool) adalah sekolah guru yang lebih tinggi untuk mendidik guru HIS yang dapat mendidik guru Cina. Akan tetapi orang Cina berpendapat akan terjadinya kemunduran jika calon guru HCS disatukan dengan guru Indonesia karena berlomba-lomba agar mendapatkan status legal yang sama dengan bangsa Jepang yang disamakan haknya dengan orang kulit putih.

Permusuhan antara orang Indonesia dan Cina yang kemudian menjadi motif didirikannya serikat Islam. Padahal Cina peranakan telah banyak menguasai diri dengan bangsa Indonesia dan menikmati kesusastraan, kebudayaan, dan kesenian Indonesia. Hakikatnya orang Cina merasa dirinya berbeda dengan Indonesia dan tidak memiliki keamanan jika di titik di bawah atap yang sama. Akhirnya di tahun 1917 didirikannya HCK (Hollands Chinese Kweekschool) yang merupakan sekolah guru zina di Meester Cornelis, Batavia. Calon guru diambil dari lulusan HCS/ELS dan

MULO. Biaya sekolah, tempat tinggal di asrama, dan buku-buku dibebaskan dari biaya. Belajar wanita disediakan asrama khusus.

Setiap siswa diberikan uang saku sebanyak f 20,- dalam satu bulan. Penyediaan guru Cina sebenarnya bukan untuk menyesuaikan program sekolah dengan kebutuhan orang Cina, tapi untuk mendapatkan guru yang murah untuk HCS yang terus bertambah jumlahnya. Kurikulumnya tidak diadakan perubahan dan guru-guru Cina telah bersifat ke barat-baratan sehingga merasa asing dengan kebudayaannya sendiri. Kenyataannya HCS adalah sekolah yang memberikan pendidikan barat seperti ELS (Nasution, 1995:109-110). Di Jawa barat HCS terdapat di Bandung dan di Jakarta (Depdikbud, 1998:74).

c. Inspeksi HCS (Hollands Chineesche School)

Kegiatan tinjauan sekolah sama halnya dengan ELS. Karena kedua sekolah tersebut memiliki kurikulum yang sama maka HCS ditempatkan di bawah inspeksi yang sama dengan ELS. Dua orang berdarah Cina yang memiliki pendidikan yang baik ditunjuk sebagai anggota komisi sekolah Belanda untuk mengelola HCS (Nasution, 1995:110).

d. Penerimaan murid HCS (Hollands Chineesche School)

HCS dibuka untuk anak-anak yang ingin mempelajari pendidikan barat yang didominasi oleh Cina-Indo yang lahir di Indonesia. Banyak anak berdarah Cina yang tidak memahami bahasa Cina dan tidak tertarik pada sekolah Cina nasional. HCS didirikan atas pertimbangan politik untuk menyaingi THHK. Usaha pemerintah kolonial tidak bisa dikatakan berhasil sepenuhnya karena orang Cina masih banyak mengirimkan anak mereka ke Tiongkok untuk belajar. Misalnya seperti orang Cina yang tinggal di Kalimantan barat. Mereka lebih memilih menyekolahkan anak mereka di Singapura atau Shanghai daripada di Batavia karena dianggap lebih dekat jaraknya. Menyekolahkan anaknya ke sekolah Cina kemudian ke Tiongkok. Meski pendirian HCS dijunjung tinggi di Jawa hal tersebut tidak dihargai jika ditawarkan pada orang Cina.

Bahasa Melayu juga tidak dihiraukan bahkan orang Dayak mempelajari bahasa Cina untuk berhubungan dengan orang-orang Cina. tahun 1915 HCS di Pontianak hanya memiliki 70 murid dari 10.000 penduduk Cina di Indonesia. Syarat memasuki HCS dipermudah untuk anak berdarah Cina. Usia maksimal 7 tahun dan penguasaan bahasa Belanda tidak diperlakukan dengan ketat. Kesempatan belajar anak Cina lebih baik daripada anak Indonesia. Sekolah makin meningkat jumlahnya dari 4 sekolah di tahun 1908 menjadi 29 di tahun 1915. Kemudian di tahun 1920 terdapat 34 sekolah murid dari 821 menjadi 5.323 kemudian 7.785 orang. Kesempatan belajar tersebut memberikan kemungkinan orang Cina untuk mendominasi. Bukan hanya bidang komersial tapi bidang intelektual dan dibantu kondisi finansial yang menguntungkan. Secara proporsional orang Cina lebih banyak memasuki universitas daripada orang Indonesia (Nasution, 1995:110-111).

Tahun 1924 terdapat HCS bersubsidi di Surabaya dengan nama Chirstelijck Hollands Chineesche School di Niuwe Kerkstraat yang memiliki 119 murid dan 5 guru sekolah tersebut sekarang menjadi bubutan Koblen. Kemudian di tahun 1926 didirikan sekolah khusus perempuan Tionghoa memiliki 121 murid dan 5 guru bernama Hollandsch Chineesche Meisje School yang sekarang berada di jalan Kanal. Kurikulum yang diajarkan kurang lebih sama namun terdapat penambahan mata pelajaran yakni Bijbel, sejarah Inggris dan pelajaran ketrampilan untuk perempuan (Prayudi, 2014:5-6).

5.2.3 HIS (Hollands Inlandsche School)

HIS didirikan di tahun 1914, merupakan sekolah yang menilai status sosial seseorang melalui keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Pemerintah juga berpegang pada penghasilan seseorang dan terbagi menjadi 3 kategori yaitu kategori A termasuk kaum bangsawan, pejabat tinggi, dan swasta kaya raya berpenghasilan bersih lebih dari 75 gulden per bulan. Kategori B adalah orang tua tamatan MULO dan Kweekschool ke atas. Kategori C adalah pegawai. Kategori C dianggap golongan

menengah ke bawah sedangkan kategori A, B dianggap kelas atas dan mendapatkan prioritas dalam memasukkan anaknya ke HIS (Depdikbud, 1998:75).

Karena peningkatan pendidikan golongan Bumiputera selama belajar HIS ditingkatkan menjadi 5 tahun, kemudian 6 tahun, dan meningkat menjadi 7 tahun. Di Jawa barat HIS negeri (didirikan pemerintah) terdapat di Jakarta, Bandung, Sumedang, Ciamis, dan Kuningan. Sedangkan HIS pasundan (swasta) terdapat di Bandung, Ciparay, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Karawang, Purwakarta, Tasikmalaya, dan kota-kota lainnya (Depdikbud, 1998:75).

Terdapat sekolah rendah khusus seperti, sekolah rendah untuk anak-anak Ambon (Ambonsche Burgerschool) yang kemudian dijadikan HIS, sekolah rendah untuk anak-anak serdadu Belanda (soldaten School) yang didirikan di kota-kota garnisun besar seperti di Magelang, Jakarta, Padang atau Bukittinggi, sekolah rendah untuk anak-anak raja atau bangsawan, (hoofdens School) yang awalnya didirikan di Tondano di tahun 1865 dan 1872 namun akhirnya diintegrasikan ke ELS atau HIS, sekolah rendah yang didirikan oleh Missi (dari agama Katolik) dan Zending (dari agama protestan) yang kebanyakan merupakan HIS swasta (Rifa'i, 2017:62).

a. Kurikulum HIS (Hollands Inlandsche School)

Kurikulum yang digunakan oleh HIS sebagaimana tercantum dalam Statuta 1914 nomor 764 yang meliputi seluruh mata pelajaran ELS bukan kelas satu. HIS juga diajarkan bagaimana itu membaca dan menulis bahasa daerah dengan aksara latin dan bahasa Melayu dalam tulisan Arab dan latin (yang menjadi pembeda HIS dan ELS) (Nasution, 1995:114) yang dapat dipelajari secara fleksibel. Maksudnya adalah siswa Cina tidak wajib mendapatkan pelajaran tersebut dan dapat dihilangkan. Kurikulum yang tidak jauh beda dengan ELS, yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia dan berorientasi pada Netherland. Buku-buku yang digunakan dalam pembelajaran ditulis oleh pengarang Belanda dan memandang Indonesia dengan sudut pandangnya sendiri. Tak heran jika jiwa ke belandaan tertanam dalam bagian besar jiwa siswa HIS (Arta, 2015:70).

Tahun 1915 kurikulum HIS tidak terdapat pelajaran sejarah, bernyanyi, dan pendidikan jasmani. Pelajaran sangat sejarah dianggap memiliki sifat sensitif dari segi politik. Kemudian untuk pelajaran bernyanyi dan pendidikan jasmani belum adanya guru-guru yang kompeten untuk memberikan pengajaran. Membaca di kelas satu ditujukan agar anak-anak memiliki keterampilan dalam membaca. Ilmu bumi telah diberikan agar dipelajari mulai kelas 3. Kemudian pelajaran umum diberikan dalam tiga bahasa yakni bahasa daerah, Melayu, dan Belanda. Mata pelajaran paling penting di HIS adalah bahasa Belanda, karena penguasaan bahasa Belanda adalah tujuan utama didirikannya sekolah ini. Meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran untuk mempelajari bahasa Belanda. Mata pelajaran yang lainnya juga menggunakan bahasa Belanda untuk membantu penguasaan bahasa. Dengan demikian waktu sesungguhnya untuk belajar bahasa Belanda adalah 66,4% (Nasution, 1995:114).

b. Guru HIS (Hollands Inlandsche School)

HIS adalah lembaga utama agar memperoleh pendidikan barat terkhusus untuk mempelajari bahasa Belanda sebagai kunci untuk meneruskan pendidikan selanjutnya. Hal ini menjadi pintu kebudayaan barat dan menjadi syarat untuk memperoleh suatu pekerjaan. Bahasa Belanda menjadi kunci yang menentukan status sosial masuk ke dalam golongan intelektual dan elit. Pembelajaran bahasa Belanda membutuhkan guru-guru Belanda akan tetapi sulitnya mencari kebutuhan guru di HIS yang terus bertambah jumlahnya, maka digunakan guru-guru berdarah Indonesia lulusan HKS (Hogere Kweekschool). Kepala sekolah yang menjabat di HIS ditunjuk orang Belanda yang mempunyai *Hoofdacte*, ijazah kepala sekolah. Namun HIS juga tidak keberatan jika orang Indonesia menjabat sebagai kepala HIS asalkan memiliki H. A. (Hoofdacte) (Nasution, 1995:115).

Selama pemerintahan kolonial Belanda memerintah di Indonesia hingga akhir kedudukannya, seluruh orang yang ingin menjadi guru terdapat dua jenis sekolah guru. Sekolah guru untuk mereka yang akan mengajar di sekolah rendah pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, dan sekolah guru untuk mereka yang akan menjadi guru di sekolah pribumi yang berbahasa lokal (bahasa-bahasa daerah, seperti

Jawa, Sunda, Melayu, atau Bugis). Sekolah rendah jenis pertama disebut sekolah pribumi kelas satu. Kemudian berubah menjadi HIS. Sekolah rendah yang kedua adalah sekolah pribumi kelas dua (Buchori, 2007:11).

Kedua sekolah guru tersebut memiliki tatanan yang berjenjang. Terdapat bagian di jenjang bawah dan ada bagian jenjang atas. Sekolah guru untuk sekolah rendah berbahasa Belanda pada jenjang paling bawah terdapat *Kweekschool*, kemudian jenjang di atasnya terdapat *Hogere Koes Kweekschool* artinya sekolah guru yang lebih tinggi. *Kweekschool* dalam bahasa Belanda memiliki arti sekolah pembibitan atau sekolah persemaian. Sekolah yang ditanamkan bibit-bibit guru. Awalnya sekolah ini hanya menerima tamatan sekolah pemerintah untuk anak-anak pribumi berumur paling tidak 12 tahun dan dari keluarga baik-baik. Kemudian kebijakan berubah hanya mereka yang telah tamat kelas 7 HIS yang dapat diterima di *Kweekschool*. studi *Kweekschool* 4 tahun lamanya.

Kweekschool memiliki peraturan yang berbeda-beda berdasarkan perkembangannya. *Kweekschool* versi 1853, *Kweekschool* perkembangan, *Kweekschool* versi baru 1915. Diantaranya memiliki perbedaan yang signifikan salah satu perubahannya adalah bahasa Belanda diajarkan sebagai mata pelajaran di *Kweekschool* lama, sementara di *Kweekschool* baru bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar perubahan lainnya seperti kurikulum yang lebih ramping dan sederhana di *Kweekschool* baru. *Hogere Kweekschool* (HKS) tahun 1927 di modernisasikan diganti dengan program mendidik guru yang baru kemudian nama sekolah dirubah menjadi *Hollands Inlandse Kweekschool* (HIK). Perubahan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Murid HKS di tahun 1927 menduduki kelas terendah kelas 1, dan dibagi menjadi dua kelompok yang bagus dan yang biasa. Mereka yang tergolong dalam kelompok bagus diharapkan mengulangi duduk di kelas 1 HIK. Mereka yang tergolong biasa naik ke kelas 2 HKS. Setelah berhasil menduduki kelas 3 di HKS kelompok biasa tadi dibagi lagi menjadi dua, yang dipandang cukup baik dapat melanjutkan naik ke kelas lebih tinggi yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Yang tetap dan nampak biasa saja dimasukkan ke kelas 4

terminal artinya kelas 4 yang tidak ada lanjutan lagi kemudian diberikan ijazah Kweekschool (Buchori, 2007:13).

Sekolah yang mendidik guru HIS adalah HKS (Hogere Kweekschool) yang pertama kali dibuka di Purworejo tahun 1914 sama dengan peresmian HIS. HKS dimulai sebagai kursus seperti MULO dan sekolah normal yang dibuka sebagai kursus MULO dan kursus normal. Diadakannya sekolah dan kursus tersebut menunjukkan kekhawatiran Belanda dalam membuka lembaga pendidikan baru. Hanya yang terbaik yang dapat lulus dalam ujian KS (Kweekschool) yang diterima di HKS. Terdapat 9 dari 23 lulusan Kweekschool school Bandung di tahun 1916 diterima di HKS. Yang merupakan lembaga pendidikan guru paling tinggi saat itu. Guru-guru sebagian berasal dari golongan sosial rendah. Terdapat 640 siswa KS tahun 1916 dan hanya 39 orang yang berasal dari golongan priyayi di atas wedana. HKS bukan sekolah untuk golongan elit sosial namun sebagai elit intelektual. 645 siswa yang mendaftar hanya 27 siswa wanita, jumlah kecil, karena hambatan adat istiadat, namun jumlahnya kian bertambah (Nasution, 1995:115-116).

c. Inspeksi HIS (Hollands Inlandsche School)

HIS yang merupakan sekolah peralihan dari sekolah kelas satu. Otomatis sekolah ini menjadi sekolah yang masuk dalam pengawasan inspektorat sekolah Belanda. Seperti halnya dengan KS dan HKS. Di HIS juga mempekerjakan guru-guru berbahasa Belanda. Terdapat dua orang Indonesia yang terdidik dan dapat menguasai bahasa Belanda ditambahkan ke dalam komisi sekolah Belanda (Nasution, 1995:116).

d. Penerimaan murid HIS (Hollands Inlandsche School)

HIS sama halnya seperti sekolah kelas satu, yang digolongkan sebagai sekolah golongan elit. Sebenarnya sekolah ini diperuntukkan untuk golongan sosial atas. Tapi dalam penerapannya sangat sulit untuk menentukan siswa mana yang termasuk dalam golongan elit. Prakteknya sekolah ini nyatanya tidak dapat mempertahankan statusnya sebagai sekolah elit. Karena anak-anak dari golongan atas tidak mencukupi kursi di HIS melainkan lebih memilih sekolah di ELS. Meski secara resmi diploma HIS sama dengan ELS, nyatanya dalam masyarakat ELS lebih dihargai. Kurangnya

murid golongan atas membuka jalan untuk murid golongan rendah dalam memperoleh kesempatan belajar. Banyak diantara anak golongan rendah memiliki bakat intelektual yang kemudian mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari anak golongan aristokrasi (Nasution, 1995:116-117).

e. Murid-Murid Menurut Jenis Kelamin

Seperti yang diduga sebagian besar murid yang bersekolah terdiri atas anak pria. Meskipun emansipasi wanita semakin populer karena pengaruh R. A. Kartini di akhir abad ke-19, nyatanya banyak gadis-gadis yang belum dapat menikmati kesempatan belajar yang sama dengan anak pria. Kebanyakan orang menempatkan wanita di rumah, dapur, atau sawah. Perkiraan jika wanita bekerja di kantor masih belum dapat diterima namun beberapa kemajuan mulai menonjol dengan bertambahnya jumlah murid wanita yang memasuki sekolah. HIS merupakan sekolah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mahal bagi kebanyakan orang di Indonesia. Biaya sekolahnya sama dengan ELS. Pembayaran paling rendah f 36,- pertahunnya.

Biaya tersebut hanya dapat ditempuh jika orang tua berpenghasilan f 3.000,- per tahun atau kurang. Lebih dari 90% orang tua yang memasuki HIS termasuk golongan tersebut. Menyisihkan f 3,- dalam sebulan untuk biaya sekolah bagi kebanyakan orang tua merupakan pengorbanan berat yang direlakan lebih dulu kepada anak pria daripada anak wanita. Tahun 1916 populasi HIS berjumlah 20.737 diantaranya 3.338 atau 16% anak wanita, ya kebanyakan dari mereka termasuk dari golongan atas. Di pulau Jawa atau di pulau-pulau yang lain kebanyakan gadis yang bersekolah merupakan anak pegawai. Di pulau Jawa 77,7% di luar Jawa 59,1% anak wanita berasal dari golongan atas. Pegawai pemerintah yang telah menempuh pendidikan barat rupanya memiliki pemikiran dan sikap untuk menyekolahkan gadis-gadisnya (Nasution, 1995:117).

f. Murid Menurut Kebangsaan

Pengaturan menegaskan tidak hanya anak Indonesia namun anak cina juga dapat diterima jika tidak mengharuskan ditolaknya anak Indonesia yang memiliki

kedudukan sosial yang baik. Anak Cina diberikan peraturan yang sama dengan anak Indonesia seperti tidak boleh lebih dari 2 tahun di kelas yang sama. Anak berdarah Belanda dapat diterima tanpa dipungut biaya jika di tempat tersebut tidak ada ELS. Umumnya hanya kecil minat anak Cina dan Belanda memasuki HIS. Tahun 1916 hanya 33 anak Belanda dan 211 anak Cina diantara 20.737 murid di HIS. Jumlah murid HIS mengalami perkembangan yang cepat. Peresmian tahun 1914 terdapat 19.181 murid, di tahun 1921 terdapat 38.211, 2 kali lipat dalam 7 tahun.

Penambahan murid tersebut bersamaan dengan kebutuhan pegawai pemerintah dan perusahaan setelah perang dunia 1 berakhir. Rupanya kebutuhan HIS akan tenaga kerja tidak berjalan karena zaman depresi. Kemudian keputusan diambil yang memutuskan HIS harus dikurangi dengan tegas untuk mencegah pengangguran. Harusnya pendidikan barat tidak dapat dibendung. Sekolah partikular atau sekolah swasta yang dicap sebagai sekolah liar tumbuh seperti cendawan yang memiliki murid yang banyak melebihi sekolah yang didirikan pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengatur dan menguasai pertumbuhan pendidikan di Indonesia lagi (Nasution, 1995:118).

g. Kemantapan belajar di HIS (Hollands Inlandsche School)

Terdapat 30% sampai 40% murid memasuki kelas 1 HIS dapat mencapai kelas 6 lebih rendah daripada ELS. Alasannya karena murid HIS tidak boleh lebih dari 2 tahun di kelas yang sama atau lebih dari 3 tahun di dua kelas berurutan. Banyak murid yang meninggalkan sekolah karena tidak dapat mengikuti program yang sulit, karena pembelajaran semuanya dalam bahasa Belanda. Kurikulum HIS sangat menitikberatkan kepada pelajaran bahasa, bahasa daerah, Melayu, dan terkhusus bahasa Belanda yang sangat berbeda strukturalnya dengan bahasa daerah. HIS dapat lebih sulit daripada sekolah rendah manapun di Eropa.

Gadis-gadis cenderung meninggalkan sekolah di usia yang muda. HIS mengakibatkan perubahan besar dalam produksi orang berpendidikan barat. Di tahun 1909 ELS merupakan satu-satunya lembaga pendidikan barat yang memborong 97,1 dari semua produksi. Akhir 1914 sebanyak 31,3% orang berpendidikan barat berasal

dari HIS kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 1924 yang kemudian menyaingi ELS (Nasution, 1995:118-119).

h. Lanjutan HIS (Hollands Inlandsche School)

Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian pegawai rendah. Para lulusan dapat diterima di STOVIA atau MULO. Mereka juga dapat memasuki sekolah guru, sekolah normal, sekolah teknik, sekolah tukang, sekolah pertanian, sekolah menteri ukur, dan lainnya dengan kemungkinan tidak perlu ujian masuk (Arta, 2015:70). Suatu kehormatan untuk anak-anak Bumiputera mendapatkan kesempatan belajar dan bersekolah. Di tahun 1940 tercatat anak-anak Bumiputera bersekolah di sekolah rendah berbahasa daerah sejumlah 2 juta lebih siswa. Kemudian di sekolah rendah Belanda terdapat 88.000 lebih siswa. Sayangnya banyak anak-anak yang putus sekolah di sekolah desa yang kemudian menjadi tuna aksara. Penyebabnya adalah guru yang tidak mampu memenuhi kebutuhan siswanya sehingga metode pengajarannya tidak berjalan dengan baik anak-anak muridpun tidak mendapatkan kesempatan mengembangkan diri (Rifa'i, 2017:62).

BAB 6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Awalnya pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda bertujuan untuk melanjutkan pelajaran anak-anak Belanda yang ikut orang tua mereka ke Indonesia karena tuntutan pekerjaan. Pendidikan diberikan supaya mereka tetap dapat mengembangkan diri meski telah berpindah ke negeri jajahannya. Lamanya orang-orang Belanda menetap di Indonesia mengakibatkan banyaknya pernikahan campuran. Anak-anak turunan campuran ini telah lahir dan besar di Indonesia sehingga mereka tidak dapat berbahasa Belanda. Pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk mencerdaskan rasnya kemudian sekolah yang awalnya khusus untuk anak-anak pegawai Belanda dapat dimasuki oleh anak-anak campuran. Hal tersebut diharapkan dapat mencerdaskan dan menanamkan sifat nasionalisme Belanda kepada anak-anak turunan campuran Indo-Belanda yang tinggal di Indonesia.

Suksesnya industri yang dijalankan pemerintahan kolonial Belanda dalam memperkaya diri, membutuhkan banyak pegawai yang dapat dipekerjakan di perusahaan Belanda dengan gaji murah. Sayangnya masyarakat pribumi banyak ditemui memiliki masalah buta huruf, untuk mengatasi permasalahan tersebut sekolah mulai dibuka untuk masyarakat pribumi. Sekolah yang didirikan dimaksudkan hanya untuk mendidik calon tenaga kerja, karenanya pembelajarannya hanya terkait pembelajaran sederhana yang dapat dimanfaatkan menjadi juru tulis di perkebunan saja. Kesuksesan industri yang dijalankan pemerintahan kolonial nyatanya tidak berjalan abadi. Eksploitasi yang terus menerus mengakibatkan merosotnya kondisi tanah Jawa otomatis menurunkan kesejahteraan masyarakat Jawa.

Keadaan yang sangat merosot ini telah menarik perhatian oleh kelompok sosialis yang kemudian melahirkan Politik Etis. Pendapat kelompok sosialis ini mendapatkan dukungan dari Ratu Belanda, karena sesuai dengan misi Kristen. Yakni sesama umat manusia harus saling membantu dan menyejahterakan. Politik Etis

berjalan dengan usaha menyejahterahkan masyarakat pribumi dengan mengembangkan, irigas, emigras, dan edukasi. Edukasi sebagai aspek yang sangat penting dan menjadi bahasan pokok dalam penulisan ini mengalami perubahan yang sangat signifikan daripada sebelumnya. Namun meski politik etis sangat erat dengan sifat moralnya gerakan ini hanya dilaksanakan oleh segelintir orang saja.

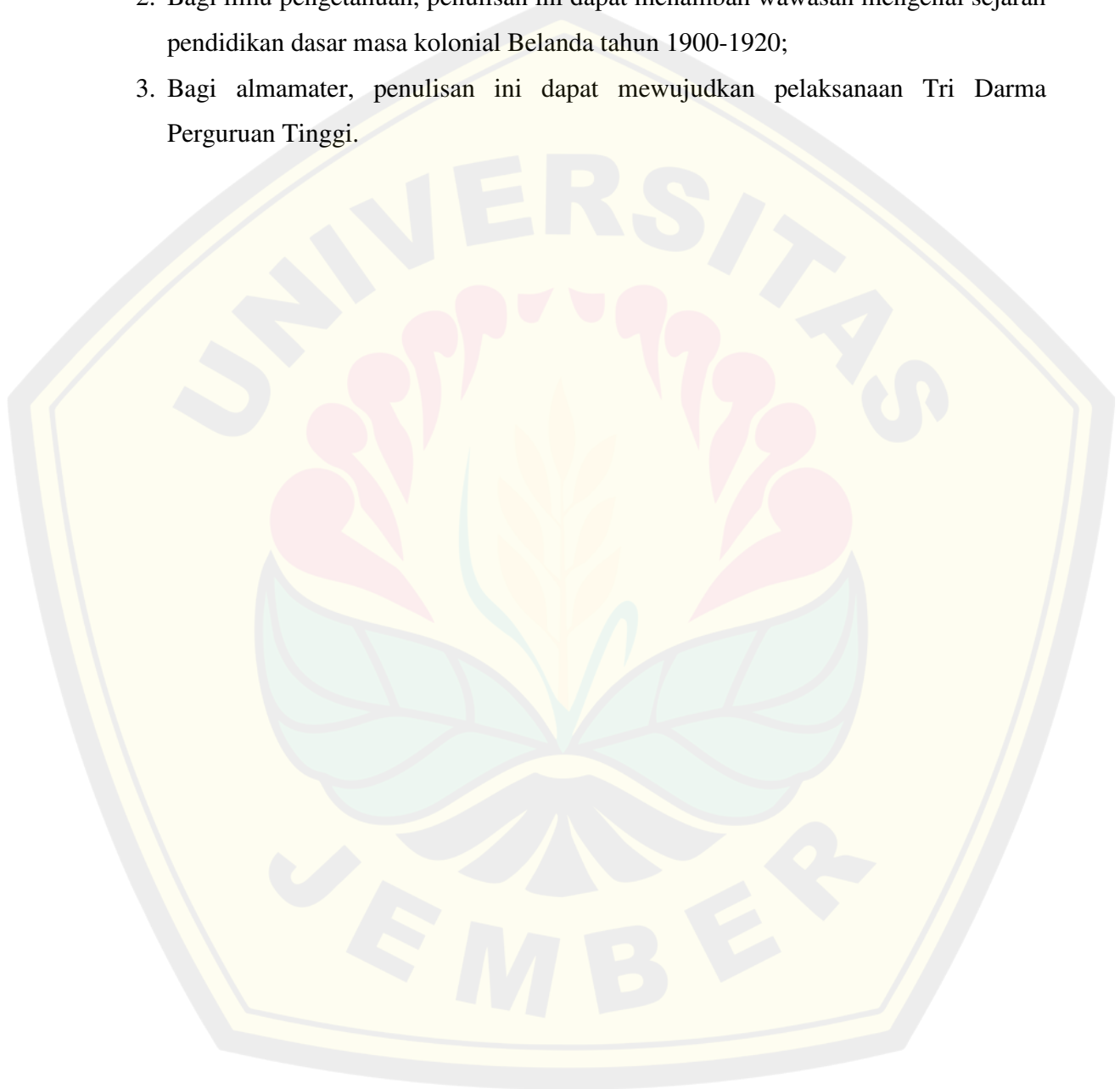
Nyatanya pendidikan dasar yang dijalankan masih dibeda bedakan. Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh tujuan pemerintah kolonial Belanda yang tidak menginginkan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi anak-anak pribumi. Pemerintah kolonial khawatir, hal tersebut akan menjadi bomerang dan menyerang mereka kembali. Kemudian pendidikan dijalankan dengan prinsip politik Belanda yakni: gradualisme, dualisme, kontrol sentral, keterbatasan tujuan, prinsip konkordansi, tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Pendidikan dasar masa kolonial Belanda dibagi menjadi 2 berdasarkan bahasa pengantarnya yakni: pendidikan dasar pribumi yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah dan pendidikan dasar non-pribumi (Barat) menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda.

Perbedaan kedua jenis pendidikan dasar ini juga sangat signifikan, seperti sekolah pribumi dibiayai sendiri oleh masyarakat desa, gedung sekolah berupa balai desa, pelajaran yang diajarkan hanya pelajaran sederhana, guru yang mengajar hanya tamatan sekolah dasar bahkan juru tulis pun dapat menjadi guru, guru belanda tidak mau mengajar karena takut kualitasnya menurun, minat belajar anak-anak pribumi juga buruk sehingga tingkat putus sekolah tinggi. Sementara untuk anak-anak belanda, mendapatkan gedung sekolah sendiri, pelajaran mencakup berbagai hal, dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, terdapat perpustakaan dengan banyak buku bacaan, pendidikan di tanggung pemerintah kolonial, bahkan bebas biaya untuk anak belanda miskin. Sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan jabatan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa, dapat melanjutkan penelitian ini pendidikan dasar atau jenjang lanjutan yakni pendidikan menengah hingga perguruan tinggi masa kolonial Belanda;
2. Bagi ilmu pengetahuan, penulisan ini dapat menambah wawasan mengenai sejarah pendidikan dasar masa kolonial Belanda tahun 1900-1920;
3. Bagi almamater, penulisan ini dapat mewujudkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Absiroh, U., Isjoni, dan Bunari. 2017. Understanding of History 350 years Indonesia Colonized by Dutch. *Tesis*. Riau: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau.
- Afandi, A. N., A. I. Swastika., & E. Y. Evendi. 2020. Pendidikan pada masa Pemerintahan Kolonial di Hindia Belanda tahun 1900-1930. *Artefak*. 7(1). 21-30.
- Alpian, Y., S. W. Anggraeni., U. Wiharti., & N. M. Soleha. 2019. Pentingnya Pendidikan bagi Manusia. *Buana Pengabdian*. 1(1). 66-72.
- Arta, K. S. 2015. *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Baidoo., A. 2015. *313 Quotes*. Ghana: Christian Authorhouse.
- Beets, G., C. Huisman., E. V. Imhoff., S. Koesoebjono., & E. Walhout. 2002. *De Demografische Geschiedenis van de Indische Nederlanders*. Nidi: Den Haag.
- Brugmans, I. J. 1938. *Geschiedenis Van Het Onderwijs In Nederlandsch-Indie*. Batavia: Bij J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij.
- Buchori, M. 2007. *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool sampai ke IKIP:1852-1998*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Burgers, H. 2011. *De Garoeda en de Ooievaar: Indonesie van Kolonie tot Nationale Staat*. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Daliman, A. 2017. *Sejarah Indoensia abad XIX-Awal abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- De Telegraaf. 1913. *Het Meest Verspreide Grootte Dagblad*. Amsterdam. 16 December. No. 7716.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Depdikbud.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Edisi II. Jakarta: CV. Pialamas Pemai.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Desiderius. 1914. De Ethische Beweging in De Opvoeding. Bandoeng: De Java-Post. 1 Mei. Halaman 277.
- Dunn, W. N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall. Terjemahan oleh Wibawa, S., D. Asitadani., A. H. Hadna., & E. A. Purwanto. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Frankema, E. 2013. Why was the Dutch Legacy so Poor? Educational Development in the Netherlands Indies, 1871-1942. *Masyarakat Indonesia*. 39(2). 307-326.
- Gunawan, A. H. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara Jakarta.
- Hdbl, S. 1914. *Algemeen Overzicht*. Bandoeng: De Java-Post. 1 Mei. Halaman 281.
- Herlina, N. 2020. *Metode Sejarah*. Edisi Revisi 2020. Bandung: Satya Historika.
- Jannah, R. N., Sumardi., N. Umamah. 2018. Education During National Movement In Java 1908-1928. *Historica*. 2(2). 128-141.
- Kuntowijoyo. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Edisi Baru. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Laloli, H. 2001. *Grenzen van de Ethische Politiek: Het Technisch Onderwijs en de Arbeidsmarkt in Nederlands-Indie, 1900-1941*. Amsterdam: Geraadpleegd op.
- Makkawaru, M. 2019. Pentingnya Pendidikan bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikannya. *Konsepsi*. 8(3). 116-119.
- Makmur, D., P. S. Haryono., S. Musa., & H. S. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Edisi 1993. Jakarta: CV. Manggala Bhakti.

- Mudyahardjo, R. 2006. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muller, F., J. H. D. Lange., & A. W. Sijthoff. 1873. *De Geschiedenis van het Cultuurstelsel in Nederlandsch-Indie*. Amsterdam: Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
- Nasution, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prayudi, G. M. & D. Salindri. 2015. Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya tahun 1901-1942. *Publika Budaya*. 1(3). 20-34.
- Rifa'I, M. 2017. *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Cetakan II. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sarnoto, A. Z. 2012. Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia. *Educhild*. 1(1). 30-40.
- Soepeno, B. 2018. *Fungsi dan Aplikasi: Teori dalam Penelitian Sosial*. Edisi ke dua. Jember: Jember University Press.
- Stroomberg, J. 1924. *1930 Handbook of The Netherlands East-Indies*. Java: Division of Commerce of the Departement of Agriculture, Industry and Commerce Buitenzorg. Terjemahan oleh Apriyono, H. 2018. *HINDIA BELANDA 1930 (Edisi Translate)*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Sulhan. 2016. Peningkatan Kesadaran Sejarah Siswa Melalui Pemanfaatan Sumber Isu Kontroversial pada Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Palu. *E-Jurnal Katalogis*. 4(9). 156-167.
- Sultani, Z. I. M. & Y. P. Kristanti. 2020. Perkembangan dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda di Indonesia Abad 19-20. *Artefak*. 7(2). 91-106.
- Sumarno., R. N. B. Aji., & E. S. Hermawan. 2019. Ethical Politics and Educated Elites in Indonesian National Movement. *Advances in Social Science*. 383. 369-373.
- Sunarso. 2021. *Politik Pendidikan Tiga Rezim*. Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Supardan, D. 2008. Menyingkapi Perkembangan Pendidikan Sejak masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis. *Generasi Kampus*. 1(2). 96-106.

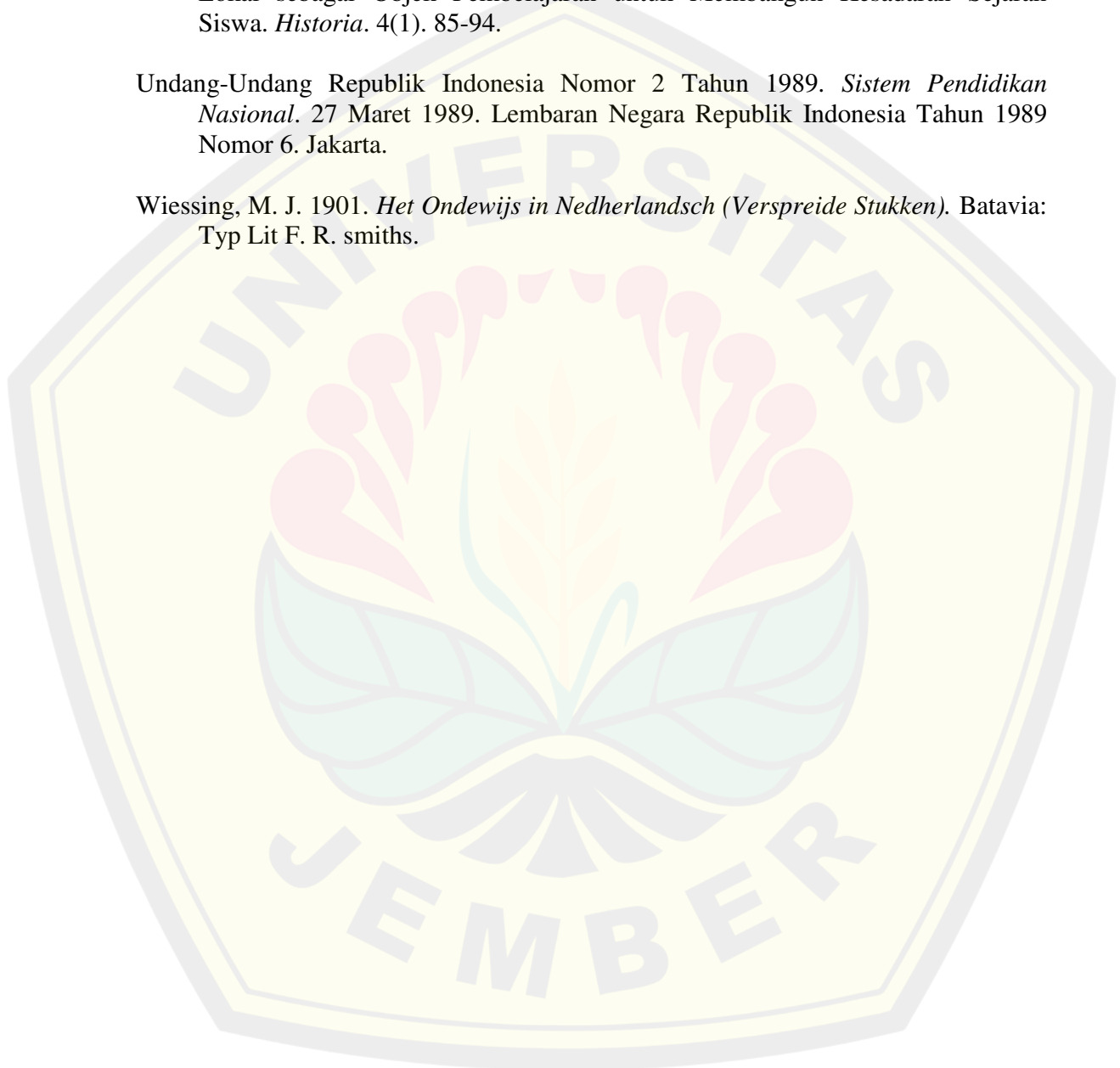
Suratminto, L. 2013. Educational Policy in the Colonial Era. *Historia*. 14(1). 77-84.

Syahrudin & H. Susanto, B. 2019. *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Revormasi)*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.

Syahputra, M. A. D., Syariyatun., D. T. Ardianto. 2020. Peranan Penting Sejarah Lokal sebagai Objek Pembelajaran untuk Membangun Kesadaran Sejarah Siswa. *Historia*. 4(1). 85-94.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. *Sistem Pendidikan Nasional*. 27 Maret 1989. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6. Jakarta.

Wiessing, M. J. 1901. *Het Ondewijs in Nedherlandsch (Verspreide Stukken)*. Batavia: Typ Lit F. R. smiths.



LAMPIRAN

De „Ethische beweging” in de opvoeding. ”

Wie met de opvoedingslektuur der laatste jaren bekend is, heeft met een vloed van pedagogische geschriften, voorstellen, zelfs instellingen (men denke aan de padvinders) kennis gemaakt, die uitgingen van een zoogenaamde „Vereeniging voor Ethische Kultuur“.

Deze is ontstaan uit het streven der Loge, het kerkelijk-confessioneele leven tot in zijn wortels aan te grijpen. Die vereeniging werd het eerst gesticht in New-York in 1876 door Professor FELIX ADLER. Iets later werd zij door Professor WILHELM FOERSTER (de vader van den beroemden pedagoog) naar Duitschland overgebracht. In 1890 werd ze te Eisenach omgevormd tot een interconfessioneele ethischen bond met een eigen weekblad, getiteld: „*Ethische Kultur*”. Haar program bestaat hierin, om „onafhankelijk van de zich scheidende leerstellingen der godsdienstige belijdenissen en partijen” het „echt menschelijke en gemeenschappelijke der zedenleer“ te bevorderen, niet „als machtspreuken van een bovennatuurlijk gezag“, — maar als de klare verstandseischen van een menschheid, die tot het bewustzijn is gekomen van haar waarde, haar eenig doel en de daarheen voerende middelen. 1)

12e Jaargang. VRIJDAG 1 MEI 1914. Nummer 18

DE JAVA-POST

WEEKBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG.

Alle stukken voor de Redactie te adresseeren aan de Redactie J. P. te *Bandoeng*, die voor de Administratie aan de Administratie van de JAVA-POST te *Bandoeng*.

Prijs per jaar franco per post voor Ned.-Indië f 6. — voor Nederland f 7.50.

Advertentiën voor de 5 woorden 20 Cent, met een minimum van f 1. — Grootte letters naar plaatsruimte.

Lampiran 1 Koran Jawa Pos tahun 1914

No. 7716. 4-UUR-EDITIE. DIN'DAG 16 DECEMBER 1913 21ste Jaargang

DIRECTIE EN ADMINISTRATIE:
TELEFOON 2285.
RAADHUISSTRAAT 1.
BUREAUX DER REDACTIE:
TELEFOON 2284 en 4933.
TELEFOON INTERCOMMUNAAL ledor T.
SI NICOLAASSTRAAT 37/43.
AMSTERDAM.

De Telegraaf

HET MEEST VERSPREIDE GROOTE DAGBLAD
waarin opgenomen de „Amsterdamsche Courant“ (294^e Jaargang)
Hoofdredactie: J. C. SCHRAAGEL. — H. J. DEN HEKTOU.

PRIJS VAN HET ABONNEMENT:
Voor Amsterdam en alle overige plaatsen in Nederland per kwartaal ./. 3.— en voor land in één sending / 7.50.
Voor België / 7.50.
Abonnementen buitenlands 5 Cents.

PRIJS DER ADVERTENTIE:
Van 1-4 regels f 1.25; elke regel meer 30 cents. In het Zaterdagavondsnummer van 1-4 regels f 1.45; elke regel meer 35 cents.
Ingezonden mededeelingen van 1-4 regels f 2.45; elke regel meer 60 cents. In het Zaterdagavondsnummer van 1-4 regels f 2.55; elke regel meer 70 cents.
Aanvragen en verzending van briefjes met 50%, korting. Groote letters naar plaatsverantwoordelijken.
Een bepaalde plaats wordt niet gewaarborgd.

Uitgeverde Agents voor Publiciteit voor FRANKRIJK, ENGELAND, BELGIË, ITALIË en FERRISLAND: de Cie Generale de Publicite J. J. JONIS & Cie, 10 Place St Louis, Boulevard Montmartre, Paris en Londres S. C. 1. 10 St. James Street, London. Verkoop: Voor DITLAND en OOSTERLAND: Firma D. A. J. B. & Co., G. de W. H., gravensteeg 48—51, Antwerpen.

Radicale ontstemming.

Onze Londensche correspondent schrijft d.d. 13 December:

Bij het heengaan van Gladstone stond de liberale partij er hier te lande zwak voor. Zijn opvolging bracht haar in 1894 bijna 'n tweede breuk toe (Home rule gaf 8 jaar vroeger aanleiding tot de eerste). De radicalen begeerden sir William Harcourt als leider, de Whigs, behoedzamer liberalen, verkozen lord Rozebery. Deze volgde Gladstone als leider en bewindvoerder op, de radicalen werden d i s h e d. Dat konden zij langen tijd niet verkroppen en was deels oorzaak, dat de liberale partij van dit land tien jaar lang in oppositie bleef. Campbell Bannerman soldeerde de inwendige scheuring, en Asquith maakte dit soldeersel nog wat hechter. Maar nog altijd kunnen de whigs en de radicalen het niet goed met elkander vinden. En de laatsten zijn opnieuw misshaagd, om tweeërlei reden.

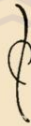
De liberale lord Lincolnshire liet zich hier Vrijdagavond op het banket, den oud-gezant en voormalig minister Bryce aangeboden, eenige onvoorzichtige woorden ontvallen. Sir Edward Grey zat dat banket voor en, toastend op hem, zelde genoemde lord: „Met vertrouwen zien wij uit naar den tijd, die eenmaal komen moet, dat hij (Grey) door den koning zal worden geroepen tot het hoogste ambt, dat een staatsman te beurt kan vallen. En geen waardiger persoon dan sir Edward Grey kan die groote taak worden opgedragen.“

Lampiran 2 Koran De Telegraaf tahun 1913

GESCHIEDENIS
VAN HET ONDERWIJS IN
NEDERLANDSCH-INDIË

DOOR

DR I. J. BRUGMANS



371
B 370

Ludi litterarii magistrum esse
proximum regno munus est.
Erasmus.

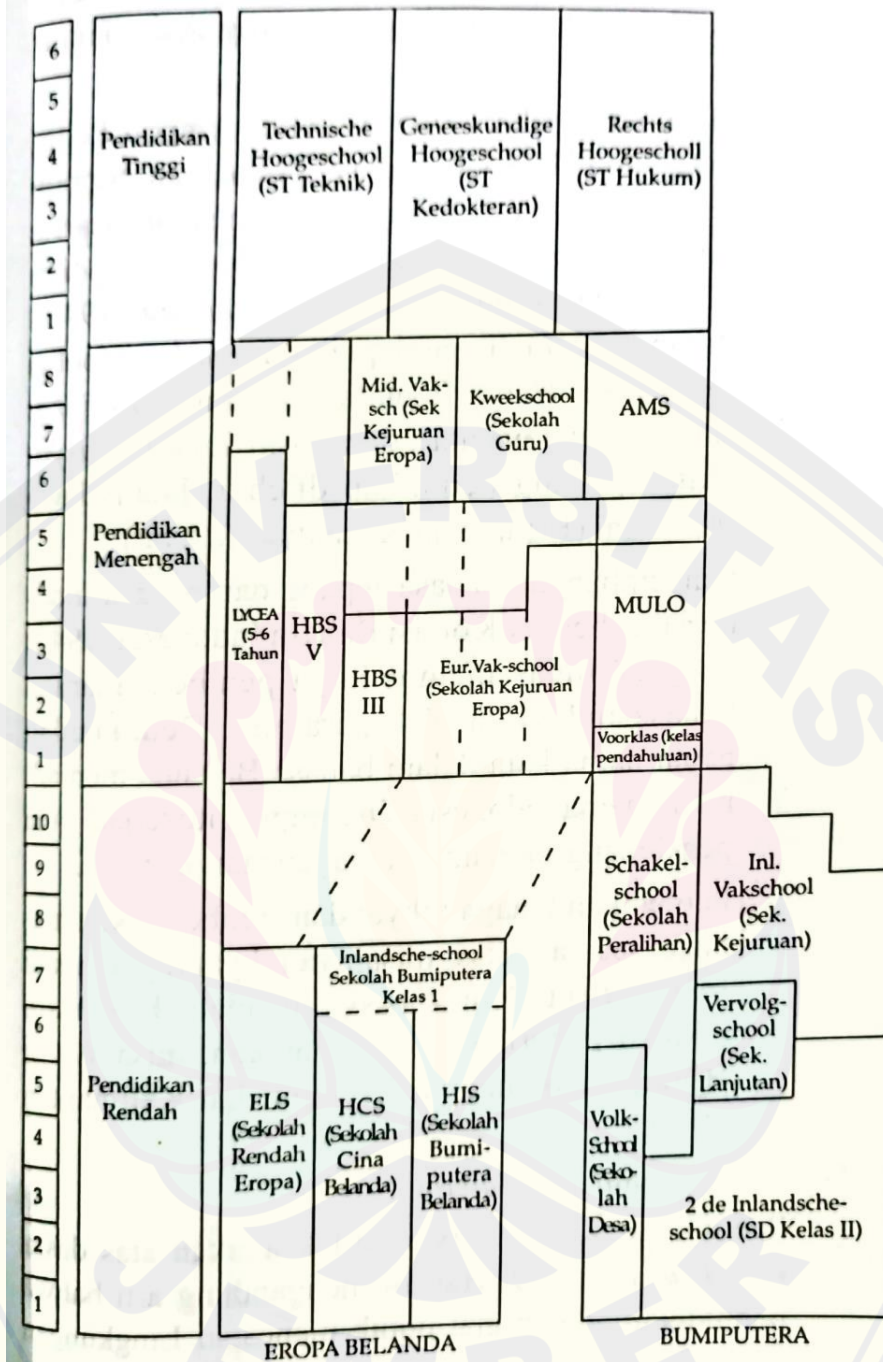
PERPUSTAKAAN
FAKULTAS SASTR*

f 4.90

1938
BIJ J. B. WOLTERS' UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ N.V.
GRONINGEN — BATAVIA

Lampiran 3 Buku Pendidikan Hindia Belanda tahun 1838

Sistem Persekolahan Zaman Kolonial Belanda Abad ke-20



Lampiran 4 Sistem Persekolahan Zaman Kolonial Belanda abad ke-20

(Mudyahardjo, 2006:267).